

## **Bagian III**

### **Transkripsi Diskusi Radio 68 H**

Bagian ini memuat transkripsi acara diskusi radio di 68H Jakarta.

Acara ini kegiatan ini dikoordinir oleh KontraS. Diskusi ini menghadirkan narasumber dari pemerhati HAM dan Aceh dikalangan ulama, aktivis perempuan dan masyarakat sipil lainnya.

Acara diskusi radio ini disiarkan pula di sejumlah radio di Aceh; Radio Prima FM dan radio Antero FM, di Banda Aceh, Radio Sonia Manis, Radio Getsunal FM dan Radio Anditya FM di Beureh, Radio Gitsi FM di Langsa, Radio Adiyem di Loksmawe, Radio Dalka, dan juga Radio Matahari di Meulaboh

## **Keadilan vs Perdamaian Proyek Integrasi di NAD** (Wawancara dengan Otto Syamsuddin Ishak, 18 November 2007)

**PENYIAR** : Selamat siang Saudara, kita berjumpa kembali dalam program Kabar Aceh Interaktif dari KBR 68H, edisi Minggu, 18 Desember 2007. Selama satu jam ke depan, saya Sri Widayanti akan menemani Anda dalam Kabar Aceh Interaktif yang dibantu Mondy Krekers di meja produser. Saudara, siang ini Kabar Aceh Interaktif hadir dengan edisi khusus dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh. Saudara, koalisi ini adalah kumpulan sejumlah organisasi yang konsen dengan isu-isu HAM, perempuan dan resolusi konflik di Aceh dan Jakarta. Ada pun tema untuk Kabar Aceh Interaktif ini adalah Keadilan versus Perdamaian, Proyek Integrasi di Nanggro Aceh Darussalam. Namun sebelum kita mengupas lebih dalam tema Kabar Aceh Interaktif siang ini seperti biasa saya menyapa dulu yang mendengar Kabar Aceh Interaktif ini melalui Prima FM dan radio Antero FM di Banda Aceh, Radio Sonya Manis AM, Get Sonara FM, Radio Adinta FM di Biren dan Radio Gipsi di Lansa, Radio Atimaja di Loeksmawe, Radio Ekstra FM di Singkil, Radio Delta dan Radio Matahari di Malaboh. Selamat siang juga bagi Anda pendengar Radio Citra Pesona FM, Radio di Sebeh Salam Aceh Singkil, Radio Megaphone FM dan SK FM di Siglidi, Radio Fatali FM di Blangpidi, Radio Nakata M di Loksukon, Radio Rapise di Ramno, Radio Suara Indah Tapak Tuan di Tapak Tuan. Selamat malam bagi Anda pendengar di Radio CHM di Janto Aceh Besar, Radio Semelu Foiz di Semelu serta Radio Semong FM di Sinabang. Selamat siang juga bagi Anda pendengar yang di Deli Bama FM

dan Tastra FM di kota Aceh Selatan, Radio Amanda FM di Takengon serta Radio Pro FM di Sabang dan Telangke di Gayu Luwes, Radio Patalia M di Plangpidi Aceh Barat Daya mendengar Radio Tastra FM di Aceh Selatan, selamat siang, pendengar Radio Kutras FM di Kota Selatan serta Radio Gurita FM Sua Baku Kandang Aceh Selatan NAD. Untuk yang di Jakarta saya menyapa yang mendengarkan Kabar Aceh Interaktif melalui radio Utan Kayu di 89,2 FM.

Saudara, Aceh sekarang sudah banyak berubah pasca-Tsunami dan kesepakatan damai. Sudah banyak bangunan baru, ada juga rumah-rumah baru, bahkan pemerintah, hal lain yang baru. Nah, semua dalam proses pembangunan; tetapi, apakah perubahan itu berjalan dengan baik, sudah memperhatikan hak asasi manusia? Salah satu indikator sebuah perjanjian damai pasca-penghentian kekerasan dan menurunnya insiden pelanggaran HAM, dari segi jumlah maupun kualitas yang juga penting, adalah berubahnya kondisi sosial-politik di NAD. Posisi Aceh jadi penting karena daerah ini punya sejarah konflik yang sangat keras yang diakhiri dengan perjanjian Helsinki. Lewat perjanjian damai itu dibuka ruang bagi seluruh rakyat Aceh dan semua pihak untuk meneruskan agenda perdamaian. Yang tidak kalah pentingnya di sini adalah soal keadilan, karena keadilan merupakan komponen dalam setiap proses perdamaian, tidak terkecuali bagi NAD. Seluruh pihak yang bertikai, Saudara, ketidakadilan yang terjadi di masa lalu berhadapan dengan masyarakat secara luas. Ketidakadilan sosial-ekonomi seperti, misalnya, pembakaran rumah, pelantaran lahan pertanian dan hilangnya pendapatan berkaitan penderitaan masyarakat yang timbul dari konflik bersenjata dan pelanggaran hak asasi manusia. Memorandum Helsinki menegaskan bahwa pihak yang terlibat di

dalamnya harus bersungguh-sungguh menyikapi ketidakadilan di masa lalu, dengan mewujudkan adanya pengadilan hak asasi manusia, serta pembentukan komite rekonsiliasi Aceh. Hal ini juga memikat pemerintah Indonesia untuk memberikan bantuan bagi bekas tentara GAM, tahanan politik yang di-amnesti serta penduduk sipil yang terkena dampak hal tersebut melalui suatu program reintegrasi. Nah, bagaimana kondisi terakhir di NAD, Saudara, kita akan membahasnya lebih detail dengan Bapak Otto Syamsuddin Ishak yang adalah seorang sosiolog Aceh. Selamat siang, Mas Otto.

OTTO : Selamat siang, *assalamualaikum*.

PENYIAR : *Wa'alaikum salam*. Saudara, seperti biasa kita juga mengundang Anda untuk berinteraksi; Anda bisa memberikan pendapat atau bertanya tentang tema kita siang hari ini dengan menghubungi nomor bebas pulsa. Anda bisa mencatatnya sekarang di 08001403131, 08001403131 atau pesan pendek di 081211888181, 081211888181. Kita ke Mas Otto. Mas Otto, pasca-MOU, perkembangan di NAD sejauh ini bagaimana?

OTTO : Kalau perkembangan politiknya, ya kita sudah dekat dengan transisi demokrasi, demokrasinya semakin jelas sosoknya. Artinya sudah ada undang-undang apa, sudah ada Undang-Undang Pemerintahan Aceh, sudah ada gubernur baru dari kandidat independen, kemudian sudah ada partai-partai lokal yang bersiap-siap untuk diverifikasi; kemudian juga, dari struktur pemerintahannya yang agak lamban ini, belum ada pergantian yang cukup signifikan, dan itu juga akan mempengaruhi kebijakan pembangunannya. Kalau dari aspek ekonomi, kita ketahui sekarang banyak bantuan untuk Aceh terutama berkaitan dengan

Tsunami ya. Jadi, ekonomi berkembang cepat karena, memang ini, memang masyarakatnya juga masyarakat saudagar, jadi suatu ..., cepat tumbuh di pasar ya. Jadi fluktuasinya naik-turun; nah, anti-klimaksnya sekarang sudah akan normal, iya kan? Kemudian, situasi sosialnya aja; situasi sosial, kita ketahui, ya karena segala cepat berubah desain besarnya juga gak jelas mau ke mana. Maka sedikit ada kecemburuan sosial, ada kriminalitas yang meningkat bahkan bersenjata. Tapi juga kalau kita hitung dari apa yang terjadi untuk Sumatra Utara sebenarnya, kriminalitas bersenjata di Aceh cukup kecil, hanya saja pihak-pihak tertentu berusaha mempolitisirnya, membesarkannya, seolah-olah Aceh menjadi rawan, lalu APBN mengeluarkan dana daerah, rawan untuk Aceh dan diterima oleh kaum serdadu, mungkin.

PENYIAR : Nah, kemudian persoalan-persoalan yang masih menyisa yang sejauh ini masih saja belum tertuntaskan di NAD, apa saja ini Bung?

OTTO : Kembali ketiga hal ya. Yang *pertama*, berkaitan dengan pemerintahan, ya yang harus dirombak sesuai dengan Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Yang *kedua*, berkaitan dengan Tsunami, daerah masih harus mengejar kerja kerasnya karena dia akan berakhir pada tahun 2008, untuk segala agendanya dan 2009 segera ditutup bulan April. Jadi, banyak persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penyelesaian masalah rekonstruksi. Yang *ketiga*, yang berkaitan dengan masalah-masalah keadilan bagi rakyat Aceh, yang terutama khususnya yang menjadi korban pada masa konflik yang lalu.

PENYIAR : Dan soal pelanggaran HAM, juga kita singgung di pengantar awal tadi. Dalam MOU ini sendiri kan,

apakah diatur juga bagaimana pandangan terhadap para korban pelanggaran HAM di masa lalu ini?

OTTO : Nah, kalau kita lihat MOU itu kan sebenarnya mencerminkan apa, *political will* dari pemerintah ya, *spirit* dari jiwa dari kaum politisi, khususnya di parlemen. Nah, kalau kita lihat dari Undang-Undang Pemerintahan Aceh, ya itu, masalah pelanggaran HAM dicoba untuk melupakan yang lalu, iya kan? Jadi, mereka mengatakan pengadilan HAM itu berlaku setelah undang-undang ini ditetapkan. Jadi memang, kemauan politiknya memang, bukan rendah, bahkan sangat rendah. Memotong duluan secara legal bahwa pelanggaran di masa lalu sebelum ditetapkan undang-undang itu, itu tidak ditetapkan. Tetapi di lain sisi ada tekanan politik juga dari pihak Aceh bahwa kalau kita belajar dari masa lalu, maka semua *spirit*, ya, semua *spirit* yang berkaitan dengan tata kehidupan di Aceh, harus mempertimbangkan konvensi-konvensi internasional yang hal ini sama sekali tidak tercantum dalam undang-undang yang berkaitan dengan otonomi maupun otonomi khusus seperti yang di Papua mungkin.

PENYIAR : Saudara kita masih membahas tema kita lebih jauh, tapi kita kan jeda sejenak; kita kan sudah mengundang Anda yang berinteraksi pada tema kita siang hari ini. Anda bisa menghubungi kami di 08001403131 untuk nomor bebas pulsa, sementara untuk sms, Anda bisa mengirimnya di 08121188181. Apakah Anda sudah merasa damai dan adil di NAD. Itulah tema kita pada siang hari ini. Dan Kabar Aceh Interaktif akan hadir setelah jeda berikut.

[Iklan ...]

Saudara, Anda masih bersama Kabar Aceh Interaktif dan tema kita siang hari ini adalah Keadilan versus

Perdamaian, Proyek Integrasi NAD. Di studio sudah hadir Bung Otto Syamsuddin Ishak, sosiolog Aceh. Dan kita akan membahas lebih lanjut tema kita siang hari ini, dan Saudara, saya juga mau mengingatkan Saudara yang ingin memberikan pendapat Anda, Saudara bisa menghubungi [kami] di 08001403131; itu adalah nomor bebas pulsa kita, 08001403131. Sementara untuk sms, Anda bisa mengirimkan di 08121188181, 08121188181. Bicara keadilan, tidak lepas juga [dari] bicara masalah pembangunan ya Bung Otto. Apa saja kemudian yang perlu diperhatikan pemerintah Aceh saat ini supaya proses pembangunan yang berlangsung tadi tidak melupakan juga soal penegakan HAM, perdamaian dan keadilan itu sendiri?

OTTO

: Nah, kita di Indonesia ini kan sudah punya pengalaman ya, pembangunannya begitu *kenceng*, keadilannya kurang, *gitu loh*. Itu terutama pada masa Orde Baru, itu berakibat pada satu hal politik yang luar biasa dengan kejatuhan rejim Soeharto. Nah, sekarang untuk Aceh, punya beban juga, sebenarnya hampir-hampir mirip ya dengan konteks Indonesia pada masa Orde Baru, yakni kalau di masa Orde Baru itu pada masalah pelanggaran HAM yang kaitan dengan G-30S, maka di sini ada pelanggaran HAM yang berkaitan dengan gerakan Aceh merdeka versus pemerintah. Nah hal-hal inilah yang harus diselesaikan pemerintah; yang pertama penyelesaian itu sebenarnya sudah dicantumkan di MOU yang berkaitan dengan hak-hak korban, hak-hak tapol-panapol dan kombatan sendiri artinya gerilyawan. Mereka sudah diberi kompensasi; nah di sini kelemahannya adalah bahwa pemerintah tidak melihat itu menjadi masalah nasional, *gitu loh*. Tetapi ini adalah masalah Aceh. Oleh karena itu, Badan Reintegrasi dibentuk berdasarkan Keputusan

Gubernur, bukan berdasarkan Keputusan Presiden. Seharusnya, kalau pemerintah melihat ini peristiwa nasional, maka sebaiknya pemerintah itu menempatkan suatu badan yang setara dengan BRR untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik. Akibat sikap politik pemerintah pusat yang demikian maka masalah-masalah pendanaan, masalah-masalah profesionalitas di dalam implementasi MOU itu khususnya, untuk reintegrasi, itu tidak berjalan dengan baik. Misalnya saja, kalau BRR itu kan menerima dana langsung dari APBN tetapi BRA itu dananya dinas sosial. Nah, jadi jaring birokasinya itu secara vertikal terlampau panjang, *gitu*. Nah, itu salah satu yang menghambat proses pembayaran kepada para korban, kepada Benis Besari atau yang berhak menerima itu. Nah yang *kedua*, karena lembaganya itu tingkat lokal Aceh, maka tingkat profesionalitasnya juga agak rendah. Seharusnya kan ini kesempatan ya, bagi beberapa aktivis atau kaum profesioanal yang tertarik untuk menyelesaikan masalah konflik yang ada di Indonesia. Seharusnya, mereka bisa dilibatkan di sini dalam menyelesaikan masalah kewajiban-kewajiban pemerintah yang berkaitan dengan reintegrasi. Nah, ini perlu diperhatikan.

PENYIAR : Ya, kita ke penelepon dulu Mas Otto. Sudah ada Pak Andi di Aceh Utara. Selamat siang, Pak Andi. Pak Andi..., ternyata terputus. Tadi kita singgung kompensasi ya, Bapak bilang. Nah, kalau bicara keadilan, itu juga kompensasi juga mengemuka. Nah, keadilan versi apa yang kemudian yang dikedepankan di sini yang kemudian bisa diterima, kemudian tidak menjadi bibit konflik baru?

OTTO : Di sini ada dua hal ya, yang mesti dipertimbangkan. Yang *pertama* adalah kewajiban pemerintah yang telah



dijanjikan pada masa MOU Helsinki. Artinya, pemerintah akan memberikan bantuan dana, maupun rumah, maupun tanah kepada para pihak. Para pihak di sini [adalah] mantan gerilyawan, mantan tapol-napol Aceh, kemudian para korban. Itu satu hal. Jadi, ini bukan kompensasi, jadi ini janji politik pemerintah pada mereka. Yang *kedua* adalah yang berkaitan dengan kompensasi. Kompensasi ini lazim sangat erat proses kaitannya dengan proses keadilan. Jadi, kalau keadilan itu tidak diproses, tidak diberikan kepada korban secara legal, maka korban tidak pernah terima kompensasi itu. Inilah problem sosial di Aceh, akibat dari itu muncullah problem sosial soal kecemburuan, soal birokrasi yang terlampau panjang, soal yang kita ketahui juga tentang bahwa kondisi sosial korban itu kan biasanya adalah pihak yang lemah ya. Dalam hal ini, bisa lemah secara mental, karena mengalami proses penyiksaan dan sebagainya, bisa lemah dalam hal akses karena di kampung-kampung, kemudian bisa juga lemah karena tekanan politik, ketakutan, trauma dan sebagainya di masa lalu. Ini yang perlu diperhatikan betul. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kebijakan pemerintah lokal, pemerintahan Aceh itu memang akan ada perhatian khusus ke arah itu. Nah, kalau memang pemerintah punya apa lokal ya, berhasil menangani masalah ini, maka tetap juga itu bukan kompensasi tetapi adalah memang kewajiban politik pemerintah untuk mengatasi sisa-sisa perang atau dalam kategori mereka yang miskin.

PENYIAR : Kembali ke penelepon, Bung Otto, nanti kita sambung lagi. Sudah ada Pak Adi di Aceh Utara. Pak Adi, selamat siang. Halo, Pak Adi.

ADI : Halo.

PENYIAR : Ya, silahkan Pak Adi!

- ADI : Halo, selamat siang. Ya, ini dari Pak Adi di Sumatra Utara. Saya merasa Aceh Utara ini ya masih kurang aman. Di mana-mana sering terjadi perang peka, cerita bersenjata. Pemerintah harap menanganinya itu. Itu saja ya. Terima kasih.
- PENYIAR : Terima kasih, Pak Adi. Tadi menyinggung soal keamanan ya. Ternyata belum aman juga ini?
- OTTO : Nah, seperti tadi ya, sudah saya katakan bahwa ternyata kejahatan bersenjata di Aceh itu jauh lebih kecil dari pada Sumatra Utara. Bandingannya itu lipat 100% bahkan. Jadi, sebenarnya yang menjadi masalah bukan masalah perdamaian, tetapi masalah keamanan. Nah, kalau keamanan itu kan jadi tanggung jawab pihak kepolisian. Tampaknya ini menjadi pertanda bahwa proses transformasi polisi dari serdadu perang menjadi serdadu keamanan itu tampaknya belum sukses, *gitu loh*. Nah, itu dilakukan oleh pihak pemerintah. Nah, kenapa demikian? Karena di MoU Helsinki itu ada klausul yang mengatakan bahwa Polisi di Aceh itu perlu ditransformasi, *gitu loh*. Dari mereka yang cakap perang menjadi cakap untuk memelihara keamanan. Proses-proses ini harus diabadikan. Nah, proses ini meskipun juga kita ketahui ada juga agenda nasional besar bahwa akan ada polisi masyarakat, *gitu loh*. Tetapi kan proyek ini belum berjalan dengan baik.
- PENYIAR : Oke. Kembali ke penelepon dengan Pak Nawi di Aceh Utara. Pak Nawi, silahkan.
- NAWI : Nah, itu sependapat dengan penelepon di belakang tadi, bahwasanya di Aceh Utara itu masih banyak perampokan-perampokan. Nah, itu kepada pemerintah ditanggulangi dengan cepat. Itu saja.

PENYIAR : Baik, terima kasih. Soal keamanan terus yang ditanyakan ya Pak.

OTTO : Ya, karena memang agak sulit juga, *gitu loh*. Karena tiba-tiba dia meledak besar sekali ya, 100% lebih dalam waktu 10 bulan itu, udah 100% lebih angka kriminalitas itu meningkat, *gitu loh*. Dan memang pada awalnya pencurian di kampung, kemudian pencurian lembu, seperti itu. Tiba-tiba ini menjadi berkaitan dengan senjata, tapokan senjata dan sebagainya. Nah, masyarakat menjadi bertanya-tanya, siapa ini yang punya senjata sekarang; iya kan? Kalau kita mengambil dari konflik yang lalu, pihak yang konflik di Aceh itu kan pihak serdadu dan pihak gerilyawan. Dan ada satu lagi sebenarnya pihak milisi yang menjadi binaan pihak serdadu. Nah, pihak milisi ini tidak tercantum di dalam MOU Helsinki. Jadi, senjata yang beredar sekarang adalah senjata dari kelompok ini. Seperti kita ketahui juga bahwa akhir-akhir ini sudah ada penyerahan senjata karena ada himbauan dari Kapolda Aceh untuk menyerahkan senjata ilegal ya. Dan, ternyata memang senjata yang paling banyak diserahkan itu memang adalah dari kelompok milisi. Dan, senjata ini adalah senjata rakitan. Senjata rakitan ini berasal dari luar Aceh tentunya, karena tidak ada pabrik senjata di Aceh; iya kan? Kita ketahui bahwa senjata rakitan itu bisa muncul dari daerah lain, seperti di Poso, dulu banyak senjata rakitan, di Ambon juga banyak senjata rakitan, di Timor sebelumnya juga ada senjata rakitan. Nah, itu sangat berkaitan dengan merk-nya Indonesia, *gitu loh*. Jadi, seolah-olah kita Indonesia ini produsen senjata rakitan, senjata ilegal khususnya, yang rakitan; yang itu bisa merupakan industri rumah tangga. Kalau di Aceh dulu bengkel sepeda *aja* bisa ditangkap karena memotong pipa yang diduga merupakan laras senjata. Oleh karena itu, senjata sebagai *home industri* tidak berkembang dengan baik, *gitu loh*.

PENYIAR : Kita jeda lagi, sudah ada penelepon. Sudah ada Pak Andi di Krungruku. Selamat siang, Pak Andi.

ANDI : Selamat siang, Mbak. Saya ingin memberi tanggapan tentang yang kita bicarakan sekarang Pak. Saya merasa kurang kondusifnya keamanan di Aceh mungkin karena masih banyaknya senjata-senjata ilegal yang ada pada orang yang kurang berhak memilikinya; *gitu* Pak. Juga saya ingin memberi tanggapan tentang adanya kecemburuan sosial dalam masyarakat Aceh, yang sekarang mungkin yang berada terus berada, yang miskin terus miskin, *gitu*. Juga pemerintah, saya rasa perlu memperhatikan nasib kesejahteraan PNS, TNI, POLRI, bukan cuma para pihak yang bertikai, Mbak. Tapi saya rasa semua lapisan masyarakat perlu diperhatikan; *gitu* Mbak. Karena kita tidak tahu politik ini besok *gimana* kelanjutannya, Mbak. Terima kasih banyak. Itu tadi belum berujung pada konflik Aceh ini, Mbak...

PENYIAR : Oke baik, terima kasih, Pak Andi di Krungruku. Kita sudah menangkap maksud Anda. Dan, Saudara, untuk menjawab pertanyaan Pak Andi di Krungruku, tetapi kita akan jeda sejenak. Saudara, Anda masih bersama Kabar Aceh Interaktif dari KBR 68 H, edisi Minggu 18 November 2007. Kabar Aceh Interaktif hadir dengan edisi khusus bekerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh yang didukung pula Yayasan TIFA. Saudara, jangan lewatkan, Anda diundang lewat kreasi menciptakan slogan bagi Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh dengan tema menuntut keadilan. Slogannya tentu harus kuat, menarik dan pas. Kuis ini akan berlangsung dari edisi pertama *KontraS* yang jatuh hari ini 18 November sampai edisi terakhir nanti 30 Desember. Ada sejumlah hadiah yang menarik bagi 15 slogan terbaik. Hadiah tersebut adalah seperangkat alat kampanye

dan penjelasan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh. Isi paket tersebut adalah buku, poster, liflet, stiker dan T-Shirt eksklusif. Nah, dari 15 slogan terbaik itu dipilih 3 slogan teratas, untuk pemenangnya ada tambahan berupa uang sebesar 500 ribu rupiah. Kita akan kembali ke tema kita siang hari ini. Tadi sudah ada pertanyaan dari Pak Andi di Krungruku. Tetapi sebelum menjawabnya ini sudah ada [telepon dari] Pak Sulaiman di Biren, Pak Otto. Selamat siang Pak Sulaiman; ya silahkan.

SULAIMAN : Kalau menurut pendapat saya, memang keadilan juga ini. Contohnya, ya seperti kawan-kawan cerita dari yang GAM itu kan. Dulu yang berperang itu, yang memegang senjata itu termasuk yang saya bilang, ya istilahnya, tentara kecil. Tetapi sekarang banyak duit, yang banyak bantuan itu kan yang mereka komandan-komandannya itu. Jadi, yang kecil kan otomatis *gak* kuat. Kemudian masyarakat juga sebelumnya kan, mereka waktu dulunya kan kita bilang mungkin lebih sengsara dari yang berperang sekarang. Karena apa, misalnya, masuklah kepolisian dan TNI, tanya GAM ke mana. Dibilang *gak tau* kena pukul kan itu, kalau nanti bilang dari sana, nanti juga kena. Jadi pas sekarang, yang menikmati hasil itu yang susah ini mereka kan *gak* ada. Jadi, otomatis kalau ini *gak* ditangani, mudah-mudahan, tengoklah nanti. Jadi saya rasa itu saja. *Assalamualaikum*.

PENYIAR : *Wa'alaikum salam*. Terima kasih, Pak Sulaiman dan Pak Andi di Krungruku yang tadi sudah menyinggung soal banyaknya senjata-senjata ilegal yang ada di sana. Dia bilang ada kecemburuan di Aceh Darussalam terkait dengan keadilan yang berlaku di sana termasuk pertanyaan Pak Sulaiman di Biren. Silahkan Mas.

OTTO

: Kembali kecemburuan sosial. Kecemburuan sosial ini kan bisa dimunculkan oleh dua hal. *Pertama*, oleh konflik dan yang kedua Tsunami dan yang lebih parah lagi bahwa korban konflik juga korban Tsunami. Ini yang lebih parah lagi; Kadang-kadang mereka justru agak diam karena mereka sudah mendapatkan bantuan sebagai korban Tsunami. Jadi korban konfliknya bisa ditunda, kira-kira begitu. Tapi ada korban konflik yang tidak bisa ditunda, *gitu loh*. Karena memang satu-satunya harapan dari situ sumbernya, ini yang jadi masalah. Masalah yang *kedua* itu berkaitan memang yang kita ketahui muncul kelas menengah baru ya. Ini biasanya [yang] muncul adalah, umumnya, dari kalangan gerilyawan. Seperti yang dikatakan pak Sulaiman tadi, biasanya adalah para komandan, dan komandannya itu mendapatkan material yang cukup besar; dan itu ditujukan dengan gaya hidupnya yang baru, misalnya, mereka punya mobil, rumah baru, bisnis baru dan sebagainya.

Kecemburuan ini bukan saja di kalangan masyarakat Aceh, tapi kecemburuan ini juga dirasakan pihak serdadu. Misalnya, kasus *kayak bakong*; nah, itu dulu karena mantan gerilyawannya ini mondar-mandir dengan mobil baru di depan pos militer, maka serdadunya ini *ngamuk gitu loh*, marah. Jadi, kecemburuan sosial ini memang menjadi pemicu, seperti orang katakan, seperti Pak Sulaiman tadi, agak mengancam ya, tunggulah nanti akan terjadi konflik besar. Padahal, kita ketahui juga secara historis bahwa kita di Aceh itu tidak punya konflik horizontal. Tidak seperti di Poso, di Ambon, apalagi dengan basis ekonomi. Nah, kalau dengan basis politik, justru ini memang terjadi, yakni antara pihak milisi dan pihak GAM. Yang dengan etnik, ya yang bermain etnik. Katanya ini Gayo, ini raja pesisir oleh karena itu diusir dan sebagainya. Nah, jadi memang agak aneh karena

ini berbasis etnik ya. Basis etnik ini orang dekat diusir, orang jauh diterima, transmigran diterima, tapi *kok* tetangga dekat diusir. Maka dia bercampur ideologi, jadi hal-hal demikian bisa bercampur. Nah, yang berkaitan dengan kecemburuan sosial ini, khususnya yang berkaitan dengan GAM sendiri, kan itu saya melihatnya bahwa memang transformasi perubahan dari organisasi militer atau organisasi gerilyawan menjadi organisasi sipil di dalam tubuh GAM tidak berjalan dengan baik. Misalnya, Muzakir Manaf menjadi panglima militer di dalam tubuh GAM, kemudian GAM tampaknya tidak bisa menjadi organisasi sipil yang sebenarnya orangnya itu-itu juga. Karena apa? Karena berkaitan dengan masalah politik, masalah ekonomi, kesejahteraan anggota, dan sebagainya. Nah, ada satu hal yang perlu dicatat dalam MoU Helsinki bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memfasilitasi proses transformasi ini. Jadi, kalau terjadi kecemburuan sosial, misalnya, bahwa anak buah tidak dapat apa-apa, panglima dapat mobil dan sebagainya, ini merupakan pembiaran di dalam proses transformasi sosial yang merupakan kewajiban pemerintah, tetapi tidak dilakukan. Nah, lalu nilai politiknya apa? Apa maknanya politik sehingga terjadi pembiaran seperti ini, *gitu*. Ini kan bisa menciptakan kegelisahan sosial yang akhirnya nanti akan menelan biaya yang lebih besar lagi.

PENYIAR : Ya, kita kembali ke pendengar, Bung Otto. Sudah ada Pak Sutami di Caklagan, Aceh Barat. Selamat siang, Pak Sutami. Silahkan, Bapak.

SUTAMI : Menurut saya gini. Konflik yang di Aceh ini bukan TNI dan GAM, [melainkan] semua rakyat, rakyat Aceh itu semua konflik. Jadi, pengangkatan Sekdes sebagai PNS ini, yang bekerja waktu konflik orang lain, tapi yang anggota sekarang saudara orang lain.

Syaratnya cuma aktif; tentu dari masa konflik ini semuanya sudah dipecat, sudah dimutasi. Makanya, pemerintah *nggak* adil sekarang. Kami dulu dalam masa-masanya konflik, diancam, sekarang yang sudah enak, ini. Cukuplah, Mbak.

PENYIAR : Itu saja Pak Sutami?

SUTAMI : Ya.

PENYIAR : Baik, terima kasih, Pak Sutami di Caklagan, Aceh Barat. Ini keluhan...

OTTO : Nah, ini berkaitan dengan PNS. Kan ada suatu seperti jatah atau apa ya, bahwa korban-korban konflik itu mendapat prioritas di dalam penerimaan PNS. Nah, ini masalahnya muncul lagi; kenapa saya katakan muncul lagi? Karena, dulu sudah pernah. Jadi, [ketika] dulu DOM dicabut, pemerintah menjanjikan perlakuan khusus untuk para korban. Nah, ternyata yang masuk adalah KKN, *gitu loh*. Justru, korban tidak mendapatkan jatah untuk masuk ke PNS. Jadi memang apa ya, mungkin sistemnya atau mekanisme rekrutmennya itu *gak* bener, ya. Mungkin seharusnya kan dicari pelajaran apa pasca-DOM itu, masalah rekrutmen PNS ini. Dan saya kira juga di dalam masyarakat ini kan sebaiknya mereka juga mengorganisir dirinya. Mengorganisir dirinya, mungkin sebagai korban, mengorganisir dirinya, sehingga ada peluang-peluang atau kemungkinan menerima bantuan, itu semuanya bisa mereka musyawarahkan sendiri. Ini memang salah satu kelemahan masyarakat sipil adalah cenderung tidak terorganisasikan dengan baik. Misalkan saja masalah tadi, jatah terhadap rehabilitasi atau pembangunan para korban, misalnya. Itu nanti ternyata bisa orang yang tidak berhak yang mendapatkannya, *gitu loh*.



PENYIAR : Nah, terkait dengan keadilan di sini, kemudian [yang] banyak disinggung adalah soal KKN. Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi kita mungkin akan singgung juga. Perkembangannya ini *gimana*, sudah 2 tahun pasca-MoU Helsinki?

OTTO : Nah, kalau kita lihat atas dasar perkembangan undang-undangnya, jelas itu tidak ada peluang ya untuk melakukan itu. Jadi, begitu perdamaian tercapai, ternyata undang-undang KKR dicabut ya, tidak diberlakukan. Nah, itu satu. Tetapi, kita melihat bahwa ada peluang di dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh ya. Jadi, sekarang ini seperti ada dua kelompok. *Pertama*, kelompok sarjana hukum akademisi di universitas, Yakob Wa'la, yang melihat bahwa ini kefakuman hukum, karena dicabut itu maka apa yang diamanahkan dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh tidak bisa dijalankan. Oleh karena itu, ada surat dari gubernur untuk mempercepat proses perpu, perpres dan sebagainya yang berkaitan dengan penyelesaian masalah pelanggaran HAM di masa lalu. Tetapi ada juga kelompok aktivis HAM yang melihat bahwa cukup dengan Undang-Undang PA [Undang-Undang Pemerintahan Aceh], maka pengungkapan kebenaran itu bisa dilakukan. Nah, tetapi kita bisa melihat bahwa kalau itu didasarkan pada Undang-Undang PA, maka turunannya adalah qanun atau perda. Kalau perda maka hal yang bisa dihasilkan adalah masalah yang ada di dalam Aceh. Tetapi, tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan masalah di luar Aceh.

Nah, ini yang agak masalah dalam kaitannya dengan karakter konflik itu sendiri. Bahwa konflik di Aceh adalah konflik vertikal. Oleh karena itu, sebenarnya yang perlu dilakukan adalah rekonsiliasi antara Aceh dan Indonesia; iya kan? Sesuai dengan perjanjian itu;

*gitu loh*. Kalau MOU itu kan kontrak politik baru ya, antara Aceh dan Indonesia. Oleh karena itu, KKR juga harus menyelesaikan kaitannya dengan Jakarta, kan *gitu*. Tetapi, memang keadilan itu sesuatu hal yang mendesak secara historis, maupun politis. Saya katakan secara historis, bahwa pemberontakan Aceh yang baru ini, yang diinisiasi oleh GAM itu, mempunyai kaitan dengan tidak adanya penyelesaian pelanggaran HAM di masa DI/TII. Itu yang dipakai untuk melakukan propaganda bahwa ada pembantaian Keleter Jempa; Indonesia tidak pernah memberi keadilan dan sebagainya. Nah, itu secara historis. Kemudian, secara politik yang berkaitan dengan janji politik pemerintah itu sendiri untuk memberikan keadilan yang dituangkan dalam MoU Helsinki, maupun yang dituangkan atau dijabarkan dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Jadi, kedua pihak ini sudah cukup sebenarnya, bagi semua pihak untuk menyelesaikan atau merekonstruksikan satu basis legal bagi penyelesaian masalah keadilan ini.

PENYIAR : Oke. Kembali ke penelepon, Bung Otto, sudah ada Pak Mus di Aceh Barat Daya. Pak Mus, selamat siang, silahkan.

MUS : Saya sebagai masyarakat yang duduk di pinggiran hutan sekarang merasa tersisih dengan korban tsunami karena korban tsunami itu bantuannya dari BRR. Sedangkan kami korban konflik di tepi hutan yang sangat menderita masa-masa konflik dulu sampai sekarang masih terpinggirkan, *gitu*. Jadi, masalah tampaknya sesuai di lapangan itu, pemerintah Indonesia kurang mensosialisasikan MoU kesepakatan Helsinki. Contohnya, sekarang pemberdayaan ekonomi mantan tapol-napol A, *gitu* kan. Jadi, pemberdayaan ekonomi sampai sekarang

*nggak* ada. Jadi macan-macan KPA yang kecil itu sekarang sudah tahan langsung, karena sudah selama mereka tidak tahu lagi kembali ke pekerjaannya. Makanya, yang tampak menonjol, pemikirannya pandai, main proyek, mendapat kerja yang bisa menguntungkan, sedangkan [yang] kecil-kecil ini, *gak* ada. Makanya, tampak kesenjangan ekonominya. Saya harap ke pemerintah Indonesia tolong MoU yang ditandatangani itu betul-betul dilaksanakan, sehingga korban-korban itu tersentuh, *gitu*. Ini banyak harta benda, harta bergerak, korban konflik sampai sekarang tidak ada ganti ruginya. Begitu.

PENYIAR : Itu saja bapak?

MUS : Ya, itu saja harapan saya.

PENYIAR : Oke, terimakasih Pak Mus di Aceh Barat Daya. Dua kelompok yang tersisihkan terkait dengan keadilan itu, korban tsunami dan korban konflik di NAD.

OTTO : Tapi, kalau korban tsunami itu kan mengalir trus ya, korban konflik tidak, *gitu loh*. Nah, memang kita sudah mengisyaratkan dulu, itu akan terjadi kecemburuan sosial. Nah, masalahnya juga berkaitan dengan masalah politik, dan pemerintah Indonesia itu tidak tegas dalam hal, katakanlah, dalam pernyataan politik bahwa para pihak donor boleh terlibat dalam pemberian kepada korban konflik. Nah, itu tidak ditegaskan pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, kalau kita ke Aceh kita selalu bertanya bahwa mereka memang tidak memberikan *slop* ya, memberikan jatah atau mencanangkan dananya untuk korban konflik. Bahkan itu terjadi setelah MoU Helsinki. Nah, di sisi lain lagi yang menjadi masalah adalah, padahal ada asumsi bahwa rehabilitasi rekonstruksi di Aceh itu tidak bisa berjalan, atau pembangunan di Aceh tidak

bisa berjalan, kalau tidak ada perdamaian. Nah, jadi ini kontradiksi-kontradiksi yang terjadi di dalam hal yang terwujudkan dalam bentuk sikap para donor untuk memberikan bantuan. Akhir-akhir ini, kita juga mendengar di Aceh bahwa karena uang tsunami itu tidak habis-habisnya, mereka mulai beralih atau menyisihkan dana itu untuk pada korban konflik. Yang kembali menjadi masalah adalah itu tidak ada basis hukumnya, tidak ada mekanisme yang jelas. Oleh karena itu, saya memang menyarankan, sudahlah, pada Pak SBY, Pak Presiden, ambillah BRA itu, dan berikan basis kepada keputusan presiden. BRA, karena kita ketahui berapa tahun belakang ini dan integrasi di Aceh ini atas SK Gubernur itu *gake* bisa berjalan. Oleh karena itu, saya kira harus diambil segera, dibentuk suatu badan yang berstatus nasional, *gitu loh*. Seperti BRR *gitu*, sehingga donor pun punya keyakinan bahwa pemerintah membuka pintu untuk memberikan bantuan kepada para korban konflik dan para profesional pun bisa bekerja bagaimana memikirkan gimana sistem harus dibangun, sehingga semua bantuan bisa diterima oleh para korban.

PENYIAR : Kembali ke penelepon, sebelum kita jeda ada Pak Tarmizi di Digli. Selamat siang, Pak Digli.

TARMIZI : Ya, selamat siang.

PENYIAR : Ya, silahkan, Bapak.

TARMIZI : Ya, kita di sini ya, sebagai masyarakat biasa, dan saya sebagai mahasiswa pun juga merasakan kehancuran yang selama ini terjadi di NAD selama pasca MoU-nya. Mungkin, saya sebagai masyarakat biasa ya, dapat mengklasifikasikan kejahatan ataupun pelanggaran yang terjadi selama ini di masyarakat, yang mungkin inilah masalah pemerintah sendiri. Karena di sini

pemerintah sendiri tidak pernah, pemerintah sendiri cuma memperhatikan para tokoh pendiri. Contoh, ya saya kasih *tau* saat penderitaan yang diterima rakyat Aceh adalah [karena] peperangan antara GAM dan RI sendiri, sedangkan setelah MoU ini selesai dan setelah kelar, ternyata pemerintah, baik luar atau pun pemerintah dalam negeri sendiri, itu lebih memperhatikan pejabat-pejabatnya ataupun pemimpin-pemimpin dari orang yang membikin ulah di NAD itu sendiri. Seharusnya, mereka sendiri tahu bahwa sebenarnya ya, ulah dari kedua pihak tersebut, maksudnya TNI dan GAM tersebut, korbannya adalah masyarakat biasa. Tapi, di sini pemerintah yang paling salah; mereka memberikan bantuan kepada pihak tersebut dan lebih mementingkan kepada pejabat-pejabat itu sendiri. Makanya, saya bisa mengklasifikasikan bahwasanya kejahatan yang terjadi selama ini adalah, mungkin ya, adalah kecemburuan sosial. Tadi, penelepon yang masuk mengatakan bahwa kecemburuan sosial, yang mana GAM yang kecil-kecil itu mungkin tidak mendapat perhatian yang lebih dari pada pemerintah itu sendiri. Mungkin di sini saya akan memberikan penjelasan ya, bahwa pemerintah itu harus lebih genius dari pada masyarakat itu sendiri. Sekian. *Wassalam*.

PENYIAR : *Wa'alaikum salam*. Terima kasih, Pak Tarmizi di Sigli. Ya, nanti kita akananggapi pendapat dari Pak Tarmizi, tapi kita akan jeda sejenak. Saudara, Anda diundang untuk berkreasi menciptakan slogan Koalisi Pengkapan Kebenaran Aceh dengan tema menuntut keadilan. Slogannya harus kuat, menarik dan pas bagi koalisi. Kuis ini berlangsung dari *talkshow* pertama yakni hari ini 18 Desember sampai dengan 30 Desember. Ada hadiah untuk 15 slogan terbaik; hadiah tersebut adalah seperangkat alat kampanye penjelasan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh. Isi

[hadiah] tersebut adalah buku, poster, liflet, stiker dan T-Shirt eksklusif. Nah dari 15 [yang] terbaik itu dipilih 3 teratas untuk pemenangnya, [yang akan] mendapatkan tambahan uang sebesar 500 ribu rupiah. Sebelum kita menjawab pertanyaan tadi ada sejumlah sms. Kita baca juga, Bung Otto. Dari ADT di Banda Aceh: “Menurut saya, keamanan belum sepenuhnya berpihak kepada rakyat, ancaman penyakit, ancaman hidup di jalan raya, ancaman publik serta ancaman kekejaman bersenjata.” Ada dari Naga Daya : “Masalah di Naga Daya cukup baik, namun [ada] korupsi politik yang sangat tidak peduli, baik dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Saya khawatir, konflik baru akan terjadi karena pemerintah kabupaten sangat tidak punya etika dalam bertindak dalam kegiatan Aceh saat ini, [yang] disebabkan oleh pendatang yang [oleh pemerintah setempat, kedatangan mereka] tidak selektif.” Ada yang tidak menyebut namanya: “Saya melihat pemerintah ini tidak serius dalam mensosialisasikan MoU dalam masalah Aceh. Contoh [adalah] dalam pemberdayaan ekonomi, ganti rugi harta rakyat mulai dari harta gerak maupun tidak bergerak. Masalah kompensasi yang dicicil pemerintah sehingga pembagian di lapangan jadi susah, sehingga tidak dijadikan modal yang bisa menggerakkan ekonomi si penerima.

Mungkin ini pertanyaan terakhir, Bung. Bagaimana mungkin nantinya pemerintah sendiri mengintegrasikan agar perdamaian dan keadilan ini bisa berjalan searah? Tidak menimbulkan konflik dan kecemburuan sosial tadi?

OTTO : Sebenarnya kan, kalau itu serius ditangani ya, Badan Reintegrasi Aceh itu bisa memiliki *data base*, khususnya tentang para korban. Nah, *data base* inilah

yang sebenarnya menjadi basis untuk memberikan keadilan dalam artian hukum, kemudian memberikan kompensasi logis dari proses keadilan itu. Tetapi, Badan Reintegrasi Aceh ini tidak bekerja dengan baik dan kapasitasnya sangat rendah serta wewenangnya juga rendah, dan kemudian nilai politiknya di hadapan para pihak juga rendah, maka dia tidak bisa bekerja secara maksimal. Oleh karena itu, saya berharap, saya ulangi bahwa BRA ini lebih baik diadopsi pemerintah pusat menjadi sebuah agenda nasional. Dan kalau ini sukses, maka pemerintah juga akan bisa menangani [dengan cara yang serupa untuk masalah] di Ambon, Poso, di Papua dan daerah konflik lainnya.

PENYIAR : Memperkuat posisi BRA ini menjadi...?

OTTO : *Ah*, BRA, dan kembali juga kita jelaskan bahwa kalau Aceh dulu berontak karena ekonomi dan sebagainya, tetapi ternyata masalahnya kan keadilan. Oleh karena itu, kata keadilan ini adalah kunci bagi penabungan Indonesia di masa depan, tidak ada pemberontakan lagi dan sebagainya.

PENYIAR : Terima kasih, Bung Otto, waktu kita sangat sempit sekali dan ini mungkin menjadi akhir kebersamaan kita dalam Aceh Interaktif siang ini. Terima kasih kepada Saudara yang sudah berinteraksi mengirimkan pesan pendek atau menelepon langsung ke pesawat kami. Dan terima kasih, Bung Otto yang sudah hadir di studio Utan Kayu.

OTTO : Sama-sama.

PENYIAR : Dan Saudara, inilah akhir kebersamaan kita dalam Aceh Interaktif siang ini. Kita berjumpa lagi pekan depan, saya Sri Widayanti undur diri. Salam.

## Transisi Politik di Aceh

(Talkshow bersama Amiruddin al Rahab, 2 Desember 2007)

PENYIAR : Selamat siang, Saudara. Kita kembali lagi dalam Kabar Aceh Interaktif, di KBR 68H, edisi Minggu, 2 Desember 2007. Selama satu jam ke depan, saya, Sri Wijayanti akan menemani Anda dalam Program Kabar Aceh Interaktif. Siang ini, Kabar Aceh Interaktif hadir dengan edisi khusus, bekerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh, yang didukung oleh Yayasan TIFA. Adapun tema Kabar Aceh Intrakatif siang ini adalah Transisi Politik di Aceh. Untuk membahas tema kita siang ini sudah hadir Bung Amiruddin al Rahab, peneliti Senior Elsam yang sudah hadir di Studio Utan Kayu. Selamat siang, Bung Amir!

AMIR : Selamat Siang. *Assalamu'alaikum wr. wb.*

PENYIAR : *Wa'alaikumsalam wr. wb.* Dan, sementara nanti kita juga akan menghubungi narasumber di Banda Aceh, melalui telepon, dengan salah seorang tokoh Aceh yang juga anggota DPR Pusat, Bapak Imam Syu'ja. Saudara, pasca-perundingan damai, Pemerintah Indonesia dan GAM mulai membuka lembar kehidupan baru, salah satunya bisa dilihat dari ranah politik praktis. Di mana wajah para aktor dan aktris politiknya mulai terlihat di berbagai rupa. Ini ditandai dengan bekas anggota GAM, yang justru kini menjadi Gubernur NAD, Irwandi Yusuf. Aktor lama juga masih terlihat di DPRD. Sementara itu, anak-anak muda mulai bergeliat menyemarakkan perpolitikan lokal. Yang menarik adalah kini mereka muncul ke permukaan dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dulunya korban konflik, ada yang dulunya



pelaku dan ada juga yang bukan keduanya. Seperti apa gambaran transisi politik di NAD? Bagaimana perubahan-perubahan ini berpengaruh terhadap masa depan Aceh nantinya? Akankah Aceh bisa mempercepat kemajuan dan pembangunan, atau justru tersandera pertikaian antara aktor-aktor politik yang baru bermunculan tersebut? Kita akan mengupasnya lebih dalam pada Kabar Aceh Interaktif siang ini. Tapi sebelumnya saya mengingatkan, bagi Anda yang ingin berinteraksi langsung, ada dua *line* telepon yang akan kita buka. Ada di nomor telepon bebas pulsa 08001403131 atau di 021 85909947. Sementara pesan pendek di 0812 1188181. Bagi Anda warga Aceh, apakah Anda sudah merasakan perbaikan keadaan di masa transisi ini? Apakah perdamaian benar-benar telah tercipta di Bumi Nanggro Aceh Darussalam? Bagaimana Anda melihat aktor-aktor politik yang bermunculan di Aceh saat ini? Silahkan Anda berpendapat. Sementara, Anda yang berada di luar Aceh yang mendengarkan program ini, Anda juga bisa berpartisipasi tentunya. Langsung kita membahas tema kita siang ini; langsung ke Bung Amir ya. [Tentang] gambaran transisi politik di Aceh, mungkin bisa dijelaskan? Gimana *nih* saat ini Bung Amir?

AMIR : Ya, selamat siang semua. Ya, ini bisa kita katakan Aceh memasuki masa transisi, dari satu keadaan konflik bersenjata yang cukup panjang, ke tahap satu pembangunan sistem politik dan masyarakat yang lebih baru, setelah adanya perjanjian dengan Indonesia. Nah, dalam konteks ini apa yang dicita-citakan tidak akan langsung datang. Tapi, dia memasuki masa peralihan. Dan di situ, peralihan dari konflik ke satu masyarakat yang mempunyai tatanan baru itu. Nah, transisi ini [merupakan] suatu hal yang kritis (*critical*), di mana keadaan bisa saja menjadi

buruk bila setiap aktor politik tidak bisa menciptakan hubungan-hubungan baru dan menciptakan suatu keoptimisan di hadapan masyarakatnya. Nah, inilah yang kita sebut dengan transisi. Sehingga, dalam situasi seperti ini, semua pihak mesti bisa menahan diri dan juga bisa menyumbang kepada pembaruan-pembaruan secara lebih positif.

**PENYIAR** : Dan kemudian, harapan besar semua warga Aceh ini kan, dengan semua latar belakang yang mana pun, adalah menuju Aceh yang damai dan adil. Bagaimana kemudian transisi politik ini berperan dalam mewujudkan Aceh yang damai dan adil ini?

**AMIR** : Nah, itu tadi yang saya sebut dengan situasi yang kritis. Untuk Aceh, saat ini bisa kita katakan, untuk satu tahun ini, modal dasarnya sudah ada, yaitu adanya kepemimpinan baru dalam sistem pemerintahan Aceh, saat ini. Namun, demikian ini saja tentu tidak cukup untuk mengantarkan Aceh ke proses yang positif dari transisi ini. Dalam hemat saya, ada tiga hal penting yang harus menjadi perhatian besar dalam konteks transisi ini. Yang *pertama* adalah faktor keamanan. Ini berhubungan dengan bagaimana masalah-masalah konflik bersenjata itu direduksi sedemikian rupa sehingga situasi keamanan ini bisa menjadi suatu hal yang berkesinambungan. Sehingga, perasaan optimis di tengah masyarakat muncul di dalam bidang lain. Faktor yang *kedua* – ini sangat krusial kalau ini tidak bisa dicarikan jalan keluar yang tepat – yaitu problem sosial ekonomi. Yang dimaksud problem sosial ekonomi adalah bagaimana menatap kehidupan politik ekonomi ke depan, baik mengenai masalah pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang lain, sekolah, rumah sakit dan lain-lain, yang berhubungan dengan itu, yang tujuannya tentu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kemiskinan

dan pengangguran di Aceh. Saat ini tingkat kemiskinan hampir 40% dari semua penduduk Aceh, yaitu sekitar 1,2 juta orang dari 4,2 juta penduduk. Nah, ini harus diselesaikan. Langkah-langkahnya harus ditempuh, mulai saat ini, sehingga masyarakat memiliki keoptimisan dengan sistem yang baru. Nah, yang *ketiga*, yang sangat kritis juga – saya rasa ini harus menjadi perhatian paling tidak di dalam 5 tahun pemerintahan gubernur baru ini, bapak Irwandi ini – yaitu masalah menyelesaikan [pelanggaran] HAM, yaitu masalah HAM yang terjadi di masa konflik. [Ini harus diselesaikan], jika tidak, itu akan menjadi ganjalan bagi transisi ini ke sisi positifnya. Nah, ketiga faktor itulah yang sangat penting, atau menentukan arah dari transisi Aceh ini. Dia positif atau negatif ujungnya [maksudnya: transisi tersebut bisa mengarah kepada hasil yang positif atau negatif, tergantung dari proses yang berlangsung dan tindakan yang diambil. *Ed.*]. Saya pribadi berharap, ini bisa menjadi positif, sehingga pemerintah Aceh saat ini dan pemerintah pusat bisa menyelesaikan tiga hal yang paling mendasar itu.

**PENYIAR** : Kalau merunut ketiga hal itu tadi, [yakni] keamanan, sosial ekonomi dan HAM; yang kemudian prioritas, yang harus segera dituntaskan apa ini, Bung?

**AMIR** : Tiga hal tadi bukan sesuatu yang [bersifat] hirarkis, tapi satu sama lain saling melengkapi. Sehingga, dalam ketiga hal itu ada langkah serentak [untuk] ditangani; tentu [perlu] ditentukan prioritas masing-masing di tiga hal itu. Korelasi ketiga penanganan ini [mesti] terlihat di lapangan, sehingga bisa menumbuhkan keyakinan di masyarakat bahwa masalah ini memang sedang diurus, *gitu*. Jadi, bukan suatu hierarki – memilih ini lebih penting atau itu – tapi ketiga-tiganya. Maka itu, diperlukan kecerdasan dan imajinasi politik

baru, dan juga ekonomi baru, dalam menyusunnya di tengah masyarakat saat ini.

PENYIAR : Ya, Bung Amir, di ujung telepon kita sudah terhubung dengan Pak Imam Syu'ja, anggota DPR asal Banda Aceh. Selamat siang, Bung Imam. *Assalamu'alaikum wr. wb.*

IMAM : *Wa'alaikumsalam wr. wb.*

PENYIAR : Bung Imam, kita tadi sudah bicara sedikit soal transisi di Aceh saat ini. Menurut Bung Amir, ada tiga hal pokok yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah, khususnya, dan pemerintah pusat yaitu soal keamanan, sosial ekonomi, dan HAM. Nah, ketiga hal tersebut saat ini kalau dilihat di NAD sendiri, seperti apa Bung?

IMAM : Ya, memang, sebenarnya kan kita ingin perubahan yang sangat signifikan, setelah sekian lama Aceh konflik. Tiga puluh tahun Aceh berkuah darah ya. Nah, tentu kita ingin – dalam rangka implementasi dari perdamaian dan lahirnya UU No. 11 tentang Pemerintahan Aceh – kita sangat *kepingin* ketiga hal itu bisa dinikmati oleh masyarakat. Nah, hal pertama tadi keamanan. Saya kira keamanan juga jauh lebih kondusif bila dibandingkan dengan sebelum terjadinya perjanjian MoU itu, apalagi kemudian lahirnya UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dan kita bersyukur, pemerintahan di Aceh telah dipilih secara sangat demokratis, dan dimenangkan oleh Pak Irwandi Yusuf dan saudara Nandar. Jadi, kita berharap, keamanan ini akan lebih signifikan lagi, tapi ketakutan-ketakutan mungkin masih ya, sisa-sisa ketakutan masih, karena di sana-sini ada krikil-krikil kecil, riak-riak kecil yang mengancam keamanan.

Nah, justru itu, kita berharap krikil-krikil kecil ini bisa dengan secepatnya hilang, dan seutuhnya perdamaian itu bisa abadi di Aceh. Kedua, persoalan ekonomi, ini juga masih dalam transisi. Di mana masih belum semua komponen masyarakat bisa mendapatkan kesempatan menjadi pelaku ekonomi. Kemudian juga terakhir, persoalan HAM, juga masih kita berharap ada perubahan, antara lain ini kan masih ada tahanan GAM yang belum semua bisa lepas dari tahanan-tahanan. Nah, ketiga komponen ini sejalan seirama-lah – persoalan keamanan, ekonomi, HAM bisa terwujud dengan baik.

**PENYIAR** : Nah, kemudian kalau kita melihat luka politik masa lalu, ini juga masih menjadi kendala serius juga ya untuk menata masa depan di NAD?

**IMAM** : Ya, makanya, rekonsiliasi itu kan sangat perlu dilakukan secepatnya. Ya di sana-sini, masih ada luka politik. Artinya, ketika kita mendeklarasikan perdamaian, itu kan seharusnya kita menutup buku lama membuka lembaran baru, untuk kehidupan yang damai abadi di Aceh itu. Memang kalau kita ingatkan, [kita kecewa dan sakit] – apalagi masa lalu itu – menerima pengorbanan-pengorbanan yang tidak sedikit. Kita kehilangan harta, jiwa. Nah, kalau itu kita tutup, kemudian kita bukan lembaran baru. *Insyallah*, luka politik lama itu bisa kita obati secara berlahan-lahan.

**PENYIAR** : Kembali ke Bung Amir. Kalau kita lihat transisi politik ini, yang paling kesulitan melalui transisi ini siapa Pak? GAM atau siapa? [Bagaimana dengan] para pemain baru tadi, seperti yang disinggung?

**AMIR** : Tingkat kesulitan masing-masing pihak sama, karena harus menerima hal-hal yang bukan dari dirinya. Itu

kan jadi soal dari transisi. Sehingga semua pihak harus berbagi ruang politik dan pengaruh. Misalnya, saya kasih satu contoh: GAM. Semua komponen GAM, tadinya dalam satu barisan, sekarang mereka masuk ke pemerintahan; tentu tidak mudah bagi yang lain untuk menerimanya. Ini kan satu situasi yang membuat, yang tadi saya katakan, semua pihak harus bisa menahan diri dan bisa mengambil tindakan yang proporsional tentunya. Nah, dalam konteks itulah tadi, yang disampaikan oleh Imam Syu'ja, kita harus menggaet ke depan. Nah, dalam menggaet ke depan itulah, [ada] satu hal yang disampaikan, [yaitu] rekonsiliasi. Dalam pandangan saya, masalah rekonsiliasi ini harus mendapatkan perhatian yang maksimal bagi semua pihak; sehingga semua langkah-langkah itu harus diambil baik-baik, dalam langkah-langkah formal atau langkah-langkah sosial ke masyarakat. Nah, ini sekarang yang belum begitu ya, walaupun dasar untuk itu sudah ada sebenarnya untuk bisa diambil langkah-langkah seperti itu.

**PENYIAR** : Ya kita akan menuju ke penelepon yang ingin bergabung dengan kita. Sudah ada Bapak Yoga di Aceh. Selamat siang, Bapak Yoga. Silahkan, Bapak Yoga.

**Yoga** : Selamat siang. Gini ya Mbak. Tentang masalah HAM di Aceh, menurutku, apalagi di Aceh sekarang ada Syariat Islam, Syariat Islam di Aceh tidak sepenuhnya dilaksanakan. Karena begini, kalau kita lihat yang jatuh ke jurang kemaksiatan adalah kebanyakan orang Ziha sendiri. Jadi, tentang masalah perdamaian di Aceh saya sangat mendukung. Tapi kami sangat mengharapkan, selaku warga sipil, kalau bisa bapak Gubernur, bapak Presiden [mengusahakan] agar Aceh ini ke depan lebih maju, jika dibandingkan dengan masa-masa yang kemarin. Itu *aja*.

PENYIAR : Baik, itu saja Pak Yoga? Terima kasih, Pak Yoga. Dan kita akan menanggapi pertanyaan dan tanggapan Pak Yoga tadi setelah iklan berikut ini.

[Jeda iklan]

PENYIAR : Saudara, terima kasih, Anda masih bersama Kabar Aceh Interaktif. Dan siang ini kita membahas tema transisi politik di NAD, kerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh, yang didukung oleh Yayasan TIFA. Di studio sudah ada Bung Amirudin al Rahab dan di ujung [telepon] sudah ada bapak Imam Syu’ja, salah satu tokoh dari NAD. Pak Imam, tadi kita sudah ada telepon dari Pak Yoga di Aceh, tentang Syariat Islam. Ada yang pro-kontra di sini. Ada yang mendukung, ada pula yang menyatakan Syariat Islam ini dipakai oleh sebagian orang untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak demokratis. Apakah memang seperti itu pelaksanaannya sejauh ini Pak Imam?

IMAM : Ya, saya kira, [tentang] Syariat Islam itu kan jangan sampai terjadi multitafsir ya; Syariat Islam itu kan meliputi ibadah, hukum keluarga, juga *muamalah*, perdata, *jinayah*, pidana dan lain-lain. Jadi semua Syariat Islam itu kan bisa diatur dengan Qanun di Aceh atau disebut dengan Perda. Tetapi persoalannya, Syariat Islam yang sebenar-benarnya Syariat Islam, yang betul-betul kita jalankan secara *kaffah* (sempurna, *ed.*). Nah, dari sisi lain timbul pro-kontra, senang dan tidak senang – mungkin apa yang tadi dikatakan Pak Yoga tadi – terjadi [tindakan] diskriminatif. Misalnya, maling-maling kecil itu mendapat hukuman, mendapat cambuk, tetapi di satu sisi Syariat Islam ini belum melihat maling-maling kelas kakap, koruptor dan sebagainya. Ini mungkin yang dimaksudkan oleh Pak Yoga tadi; makanya kita

berharap ada revisi pada Qanun di Aceh, agar tidak terjadi diskriminasi. Karena, perlu dipikir Qanun-Qanun untuk mencari koruptor yang telah merugikan harta dan kekayaan rakyat. Karena itu, saya setuju [dengan] Pak Yoga, mudah-mudahan Qanun atau Perda ini bisa menyentuh semua pihak, tidak tebang pilih.

PENYIAR : Sebelum kembali ke Pak Amir, ada penelepon lagi dari Pak Doro di Padang, Sumbar. Selamat siang, Pak.

DORO : Ini Bu. Kalau saya menilai, *gini*, pemerintah harus mempunyai perhatian penuh terhadap Aceh. Jadi, pemerintahlah yang bersikap setengah-setengah terhadap pemulihan di Aceh ini. Saya minta pendapat narasumber kita [tentang] bagaimana Aceh ke depan. Terima kasih, Bu. Itu *aja*.

PENYIAR : Terima kasih, Pak Doyo di Sumatera Barat. Tentang soal perhatian pemerintah Pusat yang setengah-setengah; apakah memang seperti itu Bung?

AMIR : Untuk saat ini kita tidak bisa katakan perhatian pusat atau daerah yang setengah-setengah, yang harus kita katakan saat ini adalah bahwa penanganan masalah Aceh itu harus mendatangkan keoptimisan bagi semua pihak di sana untuk maju. Saya ingin mengatakan, yang ingin digagas dengan adanya perdamaian, tentu Aceh yang baru. Nah, Aceh baru itu [seperti] apa ke depan? Itu tadi yang saya katakan [dengan] tiga faktor [yaitu] keamanan, sosial ekonomi dan HAM; dalam Aceh yang baru [ketiga faktor] itu harus mendatangkan suatu keoptimisan dan juga mendatangkan ruang yang lebih luas bagi rakyat Aceh untuk bergerak. Nah, dalam konteks itu, kalau kita tempatkan Syariat Islam yang diterapkan di Aceh, dia harus memberikan pijakan yang lebih optimis



terhadap tiga hal itu. Nah, itu yang sekarang ini belum terjadi; Syariat Islam belum memberikan keoptimisan bagi rakyat Aceh. Dalam konteks perubahan rakyat Aceh ke depan, Syariat Islam menjadi penjara bagi rakyat Aceh [sendiri] , karena dia akan membatasi berbagai macam tindakan. Dalam konteks itu mestinya kita tempatkan hal-hal seperti itu. Nah, tadi apa yang disampaikan Bung Doyo di Padang tadi, perhatian itu tempatnya di situ, jadi bukan lagi perhatian di masa lalu, di mana pemerintah menguasai segala hal dalam konteks perubahan sosial-politik di Aceh.

**PENYIAR** : Menarik pula [tentang] adanya peran partai politik di Aceh; bagaimana pula peran partai politik di Aceh, di transisi politik setempat?

**AMIR** : Nah, partai lokal mesti kita tempatkan sebagai institusionalisasi perubahan Aceh untuk mencapai perubahan yang baru, dari konflik ke situasi perdamaian. Partai lokal menjadi aktor yang sangat penting ke depan. Saya yakin, dalam konteks seperti itu, partai lokal harus lebih banyak menyumbang hal-hal yang positif terhadap politik dan ekonomi di Aceh. Sehingga, masalah HAM menjadi perhatian serius juga dari partai-partai lokal ini. Nah, masalahnya, seberapa besar ruang-ruang partai lokal ini tercipta? Karena partai-partai lain, yang menjadi cabang partai nasional, juga akan berupaya memperbarui pengaruhnya. Nah, itu tadi yang saya katakan, kalau masing-masing pihak bisa mencapai satu titik kompromi, pembaruan dalam konteks pembaruan di Aceh itu, maka transisi Aceh ini akan menjadi titik yang positif. Rakyat Aceh, dengan memilih Gubernur Irwandi secara langsung, sudah memberikan pondasi ke depan dalam konteks itu. Ini mesti menjadi perhatian serius partai lokal, yang

nanti akan ikut dalam pemilihan 2009. Jadi, setahun lagi itu akan menjadi kenyataan. Di situ parpol akan penting menjadi aktor politik lokal.

PENYIAR : Nah, kemudian apakah ada kekuatan demokratis yang kemudian muncul dominan di Aceh saat ini?

AMIR : Sulit kita mengatakan akan ada yang dominan. Transisi politik yang terjadi ini kan dalam konteks Aceh saja; dibanding dengan konteks transisi dari Indonesia secara keseluruhan, jauh lebih dinamis di Aceh ini. Ruangnya kan jauh lebih terbuka untuk transisi menuju ke tingkat positif itu. Nah, dalam konteks inilah tentu akan muncul aktor baru secara politik, misalnya GAM akan beralih menjadi parpol terbuka. Saya yakin dengan kerja mereka selama ini mereka akan menjadi salah satu dari aktor politik yang paling menentukan di Aceh di masa yang akan datang.

PENYIAR : Ya, kembali ke penelepon. Sudah ada Pak Dani di Aceh Pidi. Selamat siang, Pak Dani. Silahkan, Bapak.

IMAM : Ya, langsung saja. Saya melihat masyarakat Aceh setelah konflik ini, lukanya memang belum bisa *diilangin*, padahal MoU sudah tiga tahun; pembangunan di Aceh ini pun berjalan lambat *gitu*, belum menyentuh masyarakat-masyarakat di pedalaman. Saya melihat sendiri masih banyak pemuda-pemuda Aceh, rakyat Aceh yang masih *nganggur, gitu* kan. Rasanya, rakyat Aceh ini masih ada bencinya *gitu* sama pemerintah kita, apa kesal atau kecewa saya kurang tahu kan. Karena saya sendiri pun pendatang di sini kan; pemerintah kurang bijak, *gitu*. Apalagi Syariat Islam juga belum seratus persen dilaksanakan. Saya rasa itu *aja* Pak.

PENYIAR : Baik, terima kasih Bapak Dani di Aceh Pidi. Kita ke Pak Imam. Halo, Pak Imam, masih ada keluhan dari masyarakat; ternyata lukanya ini belum bisa sembuh, apalagi masih banyak permasalahan-permasalahan yang muncul pasca-kesepakatan damai ini; masih banyak yang *nganggur*, lebih ke persoalan ekonomi juga ini. Ini bagaimana ini Pak?

IMAM : Ya, betul sekali ya. [Untuk] pemerintahan Pak Irwandi ya, yang pertama kan mereka juga harus melakukan konsolidasi ke dalam. Ini juga kan memakan waktu, melalui proses yang saya kira memerlukan kebijaksanaan-kebijaksanaan [yang tidak semudah] seperti membalik telapak tangan. Jadi karena itu, ada sinergi ya antara masyarakat Aceh sendiri dengan pemerintahan Aceh sekarang. Sinergi itu, ya, mudah-mudahan ada kemauan dari masyarakat untuk melakukan *sharing*; apa keluhan-keluhannya tentu harus disampaikan kepada pemerintah, tentunya lewat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, DPRA. Nah, selain itu apa yang saya katakan tadi, kita memerlukan kesabaran. Karena, proses luka lama, seperti yang saya sebutkan, itu kan sudah menimbulkan korban, dendam dan sebagainya. [Karena] itu kita mengerti bahwa ada komponen masyarakat Aceh yang belum merasakan kenikmatan dari pemerintahan baru itu. Jadi, semua pihak harus melakukan introspeksi untuk melihat jauh ke depan dalam rangka membangun apa yang tadi dikatakan oleh Pak Amir tadi, masyarakat Aceh baru itu. Masyarakat Aceh baru tentu harus beda dengan masyarakat lama, tentu masyarakat Aceh baru itu hidupnya layak; dia mendapatkan fasilitas pendidikan perlindungan hukum dan sebagainya. Itu saya kira tambahan dari saya.

PENYIAR : Bagaimana Bung, (maksudnya Amir, *ed.*) ada yang disampaikan?

AMIR

: Ya, saya sangat apresiatif sekali [dengan] apa yang disampaikan oleh Dani tadi ya, dari Aceh Pidi. Memang luka itu belum sembuh. Nah, itu tadi saya katakan, kenapa tiga faktor yaitu keamanan, sosial ekonomi dan HAM [mesti] ditangani secara tepat dalam waktu lima tahun ini sebagai masa transisi. Sehingga, selama 5 tahun di bawah kepemimpinan Bapak Irwandi Yusuf ini, [ia] meletakkan dasar untuk perbaikan-perbaikan itu. Maka dari itu, [untuk] masalah ekonomi, misalnya, mesti ditempuh kebijakan baru yang berbeda dengan kebijakan masa lalu, yaitu bagaimana tiga kawasan Aceh itu secara ekonomi bisa berimbang, yaitu antara Pantai Timur, Lhokseumawe sampai Aceh Besar, itu kan ekonominya berbeda dengan Aceh yang bagian tengah, yaitu Gayo sampai Bane Meria, dan akan berbeda juga dengan Pantai Barat. Nah, [yang perlu adalah] bagaimana [terhadap] daerah-daerah ini bisa dibuat satu kesamaan, paling tidak tingkat derajat pertumbuhan ekonominya. Sehingga, masyarakat di daerah itu, yang terkepung puluhan tahun itu, bisa lebih baik keadaannya dan ekonominya. Nah, saya ingin mencatat, menggarisbawahi satu hal yang disampaikan oleh Pak Imam Syu'ja, [yaitu] masalah Aceh baru. Apa bedanya Aceh baru ini dengan masa lalu? Kita buat satu pembatas begitu ya, berdasarkan pengalaman rakyat Aceh sendiri. Nah, bagaimana pengalaman itu bisa dibawa ke tengah percaturan politik praktis Aceh? Nah, di situ tadi saya pikir ada satu hal yang dititiktekan oleh MoU di Helsinki dan UUPA, yaitu perlu dibentuknya semacam komisi kebenaran di Aceh dalam konteks menangani masalah HAM. Nah, dengan adanya hasil kerja komisi ini nanti, kita bisa melihat apa *sib* masa lalu yang membebani kita di masa depan, sehingga dia bisa kita tangani bersama, sehingga dia tidak lagi menjadi ganjalan dalam menyusun atau menciptakan Aceh

Baru itu. Nah, semua aktor politik di Aceh mesti mendukung, sehingga [para] aktor politik [itu] tahu Aceh baru seperti apa yang mau disusun. Kalau tidak, kita hanya akan bicara soal Aceh baru tetapi tidak tahu [apa sebenarnya] bedanya dengan masa lalu? Nah, itu satu hal penting [yang ada] dalam pikiran saya, yang sedang harus kita bahas di Aceh.

PENYIAR : Kembali ke pendengar, sudah ada Pak Nyak Sarum di Aceh. Terputus ... Dan, Anda masih bisa menghubungi kami di nomor telepon bebas pulsa 08001403131 atau di 02185909947. Sementara pesan pendek di 08121188181. Kabar Aceh Interaktif akan kembali setelah jeda berikut.

[Jeda Iklan]

PENYIAR : Saudara, Anda masih di Aceh Interaktif di KBR 68H. Siang ini kita membahas transisi politik di NAD, [yang] adalah program kerja sama antara KBR 68H dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh, yang didukung oleh Yayasan TIFA. Dan kita akan langsung menuju ke penelepon. Sudah ada Pak Nyak Sarum di Aceh Besar, sudah terhubung kembali. Halo, selamat siang. Ya, silahkan.

SARUM : Ya, begini ya. Menyangkut masalah pokok tadi, misalnya dengan keamanan, ekonomi dan HAM ya. Memang, yang sangat dibutuhkan sekarang [adalah] menyangkut pemberdayaan ekonomi dan pelanggaran HAM. Menyangkut keamanan, *insyaallah*, walaupun Pak Imam *ngomong* tadi ada riak-riak kecil, itu biasa, dan pasti ada. Cuma yang paling penting adalah menyangkut masalah pemberdayaan ekonomi, karena kadang pemberdayaan ekonomi itu sangat beda sekali antara GAM yang sudah memimpin di pemerintahan dengan GAM yang masih di kampung-

kampung atau di desa-desa. Mereka itu sungguh sedih kita lihat, karena kadang pemimpinnya itu sudah lupa daratan. Itu *satu*. Yang *kedua* [adalah] menyangkut pelanggaran HAM. Misalnya yang terjadi di Aceh adalah masalah pelaksanaan syariat. Pelaksanaan syariat itu, sebenarnya bagi kami orang Aceh, itu kamuflase politik pusat. Kenapa saya bilang *gitu*? Karena waktu penerapan Syariat Islam itu, hari ini dicetuskan besok terus berlaku. Sementara, yang menerima perlakuan (pemberlakuan hukum, *ed.*) itu adalah rakyat jelata yang tidak berdaya. Sedangkan anggota dewan, atau pejabat-pejabat koruptor itu, sama sekali tidak tersentuh. Memang demikian yang dibuatnya supaya rakyatnya beralih perhatiannya kepada Islam. Padahal, sejak nenek moyangnya, mereka sudah beragama Islam. Jadi, tak perlu Syariat Islam di Aceh; hanya yang perlu adalah pelaksanaannya ditingkatkan. Demikian.

PENYIAR : Baik, terima kasih. Dari Pak Nyak Sarum di Aceh Besar. Kita ke Pak Imam dulu. Pak Imam, [soal] pemberdayaan ekonomi, kalau tidak salah, di Aceh kan sudah ada Badan Integrasi Aceh untuk damai; kemudian juga ada BRR yang punya banyak uang di situ. Tapi ini masih menjadi persoalan pokok juga di NAD. Bagaimana ini?

IMAM : Ya, terima kasih Mbak. Pak Sarum tadi ya; beliau menggarisbawahi persoalan ekonomi dan persoalan Islam. Kalau kita lihat, sebetulnya dana yang ke Aceh itu sudah cukup banyak, tinggal bagaimana *manage*-nya agar dana itu bisa bermanfaat untuk membangun perekonomian rakyat. Pembagian dana pada tahun 2007 ini sampai 4 trilyun. Kemudian pada 2008 nanti, mungkin sampai 8 trilyun. Kalau 8 trilyun itu kita bagi dengan 4 juta rakyat Aceh, saya kira uang tunainya berapa itu; bisa dinikmati oleh tiap pribadi

orang Aceh. Tapi di sisi lain bagaimana ya me-*manage* ini; bagaimana melakukan keadilan di bidang ekonomi. Jadi tidak ada diskriminasi, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Sarum. Ini saya tafsirkan seperti itu. Di sisi lain, kan di Aceh sudah ada Dinas Syariat Islam, sudah ada Majelis Permusyawaratan Rakyat, sudah ada Majelis Rakyat Aceh. Saya rasa tiga lembaga ini, tiga jabatan ini, bisa *sharing* bagaimana berdiskusi untuk menghasilkan keputusan politik ya, walaupun nilainya [kembali] kepada keikhlasan. Tapi, istilahnya [itulah] keputusan politik agar betul-betul nilai-nilai spiritual dari Syariat Islam [terakomodir di dalamnya].

Bagaimana kita berfikir tentang Syariat Islam? Syariat Islam itu sebenarnya, menurut saya, adalah [soal bagaimana] orang mau mengamalkan syariat-Syariat Islam. Jadi, tidak dalam bentuk sanksi, dalam bentuk orang takut kepada hukum; tetapi orang Aceh itu harus takut kepada Allah, tidak takut kepada sanksi-sanksi hukum, sehingga dalam Islam itu kan ada nilai *ibsan*. Nilai *ibsan* itu kan, kalau Allah tidak bisa kita lihat, yakinlah Allah itu bisa melihat kita, sehingga kita tidak akan melakukan pelanggaran-pelanggaran syariat. Ini yang saya inginkan, agar generasi ke depan betul-betul tidak melanggar wilayah-wilayah syariat. Sehingga kita, ya, hubungan *hablun minallah* kita tidak rusak. Kemudian kalau rusak hubungan kita dengan Allah, tentu hubungan dengan manusia, *hablum misannas* juga bisa rusak. Saya dukung ya Pak Sarum. Mudah-mudahan ke depan ini – dalam waktu dekatlah – lembaga Dinas Syariat, Majelis Permusyawaratan Ulama, Majelis Adat Aceh itu bisa duduk dan mendiskusikan bagaimana melahirkan Qanun-Qanun, atau merevisi Qanun-Qanun yang dianggap sangat diskriminatif untuk masyarakat Aceh. Saya kira *gitu* Mbak.

PENYIAR : Bung Amir, yang menarik tadi dari pernyataannya Pak Nyak Sarum adalah semacam rasa kecemburuan terhadap para bekas anggota GAM yang bisa menduduki level-level pemerintahan, kemudian mereka melupakan [rekan-rekan mereka] yang masih banyak di lapangan dan belum merasakan perekonomian yang seimbang.

AMIR : Ya, itu tadi yang saya sampaikan, situasi yang kritis. Artinya begini, kalau tokoh-tokoh Aceh yang sekarang memegang otoritas di berbagai lembaga baru tidak sadar dengan keadaan faktual di lapangan, itu akan menjadi faktor pendorong rusaknya perdamaian ini. Nah, makanya, dalam konteks menyelamatkan perdamaian dalam lima tahun ini, [yang] situasinya transisi, kritis, harus ditempuh langkah-langkah yang bisa mendatangkan keoptimisan semua pihak bahwa kita akan memasuki suatu era baru di Aceh. Nah, dalam konteks itulah saya sampaikan, misalnya dalam konteks pembangunan ekonomi, bagaimana rakyat Aceh harus mengetahui bahwa dalam lima tahun ke depan kemiskinan di Aceh itu jumlahnya menurun sedemikian rupa, lapangan kerja terbuka, sehingga semua pihak khususnya orang-orang muda merasa bahwa keadaan memang berubah. Itu *satu* ya. *Kedua*, dalam konteks ini, pemimpin Aceh, siapa pun orangnya apa pun aliran politiknya, harus bisa menerima semua proses bahwa apa yang terjadi di masa lalu harus kita buka bersama, kita lihat bersama-sama; apa [persoalan] dari masa lalu itu [yang] menjadi kendala buat kita ke depan untuk mewujudkan Aceh Baru itu? Itu kita selesaikan. Nah, dalam konteks ini, saya ingin mengatakan, rakyat Aceh jangan lagi menempatkan diri pada posisi, apa ya, [sebagai] orang korban yang lemah *gitu* ya; tetapi mari kita sama-sama menjadi sebagai orang yang mampu memenangkan



konflik ini, di mana kita adalah orang yang keluar dari konflik dengan selamat. Nah, kalau pikiran ini terwujud, kita adalah orang yang menang, mari kita sama-sama, retas jalan untuk menuju Aceh baru itu, dengan satu keoptimisan bahwa kita tidak sedang meminta-minta kepada Jakarta, *gitu*. Tetapi, Aceh sedang membangun dirinya, di atas tangannya sendiri, di atas kewenangan yang diberikan [kepadanya] pada saat ini, dengan pemimpinnya sendiri yang dipilihnya sendiri.

Yang *ketiga* adalah, dalam konteks ini, bagaimana kita memperhatikan luka yang terjadi di masa lalu itu. Luka itu kita obati bersama, kita secara bersama-sama [sebagai] rakyat Aceh, mampu membuat luka itu sebagai peringatan yang tidak perlu lagi kita ulang ke depan. Nah, untuk mencapai suatu kohesi sosial baru di Aceh, dan [supaya] semua komponen bisa saling melengkapi dan betul-betul mewujudkan Aceh baru yang betul-betul berbeda dengan Aceh di masa lalu itu, [kita perlu] membuat yang namanya komisi kebenaran itu. Tetapi komisi kebenaran dalam konteks ini tidak bisa [bersifat] teknokrat. Rumusannya, misalnya, tidak hanya asal *aja* di atas kertas, tetapi [proses perumusannya] melibatkan semua pihak; di Aceh itu apa yang mereka mau, apa yang mau dituju. Sehingga, apa yang disampaikan oleh Teuku Nyak tadi dari Lhokseumawe bisa tertampung hasratnya di dalam itu (maksudnya, dalam komisi kebenaran dan rekonsiliasi, *ed.*). Tetapi kalau teknokrat, dia hanya ditentukan oleh segelintir orang yang mengaku dirinya akademisi [dari segi pendidikan], [atau orang-orang tertentu] dari sisi usia atau dari mana, atau dari Jakarta; nah, itu dipaksakan kepada masyarakat. Itu tidak kita harapkan. Kita inginkan semua rakyat Aceh masuk dalam proses itu dengan segala macam aktivitas dan kasus yang

dialaminya di Aceh. Dan mereka yang menentukan, apa bentuknya, bagaimana prosesnya, siapa yang boleh terlibat di dalamnya, secara bersama-sama; saya pikir itu. Saya ingin memaknai seperti itu apa yang disampaikan oleh Pak Imam dan Teuku Nyak dari Lhokseumawe tadi.

PENYIAR : Nah, kemudian masalah sarana, agar semua pihak di sini bisa saling berdialog, duduk bersama dengan damai, dan kemudian menyatukan mereka; ayolah kita kemudian mencari jalan terhadap persoalan-persoalan yang muncul di NAD. Ini mulainya dari mana?

AMIR : Prosesnya sebetulnya sudah dimulai. Saya sebetulnya memaknainya begini: ketika rakyat Aceh memilih saudara Irwandi untuk menjadi gubernur, artinya mereka menaruh kepercayaan kepada gubernur dengan segala aktivitas yang dia punya. Nah ini sudah dimulai. Tinggal bagaimana berbagai macam komponen itu bisa menempatkan diri dalam proses yang dibangun ini, sehingga kita mampu memasuki suatu tahap [yang baru, jadi kita tidak hanya menempatkan diri sebagai korban, karena kalau demikian] kita tidak akan mampu berbuat apa-apa. Nah, saya ingin [agar] rakyat Aceh sekarang, dengan visi baru, dengan pemimpin baru tadi, dia tidak meminta-minta kepada Jakarta. Aceh tidak pernah meminta kepada Jakarta dalam konteks apa pun. Nah, sekarang kita tunjukkan kepada Indonesia dengan segala dinamika politik barunya. Tadi dari awal saya katakan transisi yang terjadi di Aceh jauh lebih demokratis dari yang terjadi di Indonesia secara keseluruhan. Ini tampak dari pemilihan umum; Aceh *nggak* berdarah-darah, *nggak* ada orang rusuh segala macam, itu jalan baik. Yang kedua, calon independen Irwandi terpilih dengan baik oleh rakyat Aceh. Nah, ini dasar untuk memberikan suatu keadaan baru; nah,

dalam konteks inilah kita merawat perdamaian ini. Jadi, yang harus kita rawat adalah situasi damai ini dengan mendatangkan keoptimisan kepada masyarakat Aceh. Dan rakyat Aceh tidak perlu menjadi orang yang perlu dikasihani oleh Indonesia dalam konteks ini, tetapi betul-betul membangun dirinya untuk mewujudkan apa yang ada dalam UUPA dan MoU. Sehingga, Aceh itu betul-betul [merupakan] hasil kreasi dari semua tokoh-tokoh Aceh, intelektual Aceh, dan saya yakin, juga orang-orang muda di Aceh yang sangat berpengaruh saat ini.

**PENYIAR** : Ya, ke Pak Imam. Pak Imam, tadi penjelasan panjang sudah diutarakan oleh Bung Amir bahwa ini menjadi potensi bagi Aceh untuk membawa Aceh kepada yang lebih maju. Kemudian, [kita] tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat. Perjanjian Helsinki ini menjadi rujukan sekaligus perjanjian damai itu sendiri. Lalu, apakah semua aktor politik yang ada di NAD sudah menyadari semua hal itu?

130

**IMAM** : Saya kira komitmen itu harus dipegang teguh ya, bahwa MoU itu adalah jalan menuju damai di NAD. Maka itu, saya kira banyak pemikir di Aceh yang harus membangun sinergi untuk memberikan sumbangsuhnya, menyumbangkan pemikirannya, menyumbangkan sumber daya dirinya, agar Aceh yang kita maksudkan ini tidak lagi mempunyai nasib yang lalu. Apa yang dikatakan oleh Pak Amir tadi bahwa itu perlu komisi kebenaran, tapi kemarin kita melihat, tampaknya komisi kebenaran ini belum bisa kita harapkan. Karena itu, misalnya dalam segi persoalan ekonomi, sebetulnya pemerintah [melakukan upaya] lewat badan BBRI itu. Saya kira, ya, di sana sini, kita masih mendengar, masih ada korban-korban tsunami yang masih tinggal di barak-

barak. Ini kan sangat menyedihkan. Sudah tahun ketiga BRRRI berdiri di Aceh. Ini kan tinggal satu tahun lagi, tahun ke empat, 2008-2009 itu *udab* selesai. Apa kenang-kenangan dari BRRRI ini untuk masyarakat Aceh? Kemudian juga, nanti kita berharap – tadi yang dikatakan Pak Amir – dengan segenap kemampuan dari pemerintahan Irwandi; saya kira gubernur sekarang ini adalah [gambaran] untuk lulus ujian priode kepemimpinan sekarang. Sehingga pada priode ke depan masyarakat tetap akan memilih Irwandi ini. Kalau gagal, [seperti] yang dikatakan oleh Pak Amir tadi, nanti kira akan mengemis-ngemis lagi ke Jakarta; padahal kita tidak pernah mengemis, kita punya modal besar tanpa Jakarta dan Indonesia. Tapi sudahlah, janganlah kita sebut-sebutkan lagi bahwa Jakarta lupa dengan Aceh, karena kita ingin membangun Aceh baru, yang berdaulat, yang tetap mempunyai hubungan kedaulatan dengan RI yang kita cintai ini.

PENYIAR : Ke penelepon lagi. Ada Pak Dede di Bandar Siapi-api. Silahkan.

DEDE : Sebetulnya mau *ngomong*, *gimana* ini Pak?

PENYIAR : Ya, terputus, Saudara. Saudara, masih ada sisa waktu sekitar 5 menit sebelum kita akhiri kebersamaan dalam Kabar Aceh Interaktif siang ini. Saya akan membacakan beberapa pesan pendek yang sudah masuk, Pak Imam dan Bung Amir. Ada dari 08526039xxxx: “Menjamurnya pendirian partai politik lokal di Aceh hanya untuk kekuasaan semata, masyarakat dijadikan tumbal para politikus kotor, tidak ada agenda partai lokal yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi masyarakat di bawah.” Oh, dari Iqbal di Aceh. Ada dari Wen Gayo di Gayo: “Hukum di Aceh seperti hukum rimba, banyak rakyat

kecil Islam yang dicambuk, tetapi pejabat korup tidak di hukum, alasannya adalah qanun.” Dari Andika: “Di Aceh sendiri tidak adil dalam pembangunan, lihat daerah Gayo yang dulu paling cinta pada NKRI tapi sekarang dianaktirikan ..., lihatlah yang menderita.” Ini lebih kepada persoalan ekonomi [dari] rata-rata SMS yang muncul di sini; kemudian masih muncul kecemburuan di NAD sendiri.

AMIR : Ya, itu semua tadi yang saya katakan, tiga hal itu kuncinya, tiga hal itu diperbaiki dengan situasi baru. Nah, tadi saya mengatakan yang perlu kita tumbuhkan [adalah] sikap optimis. Kalau yang masih kita tumbuhkan [adalah] sikap pesimis saja yang berkembang dari kaum muda Aceh, ya kita *nggak* akan ke mana di Aceh ini, *gitu*. Ya, betul saya sangat apresiatif [terhadap] yang disampaikan oleh Teuku Imam Syu’ja bahwa kita akan perbaiki keadaan ini dengan segala kemampuan yang kita punya di Aceh, sehingga kita ke depan bisa menjadi Aceh yang baru, keluar dari sentimen-sentimen kelompok dan juga wilayah. Maka, tadi saya katakan, tantangan besar ke depan bagi gubernur baru ini dalam empat tahun pemerintahan yang ke depan ini adalah bagaimana membuat keseimbangan kesejahteraan antara Pantai Barat dan Pantai Timur di Aceh dan daerah pertengahan ini. Tadi ya, ada dari Gayo ya, mulai dari Aceh Singkit, Singkil, terus Aceh Tengah, Gayo Luwet, Benar Meriah; nah itu kabupaten-kabupaten di tengah yang bisa dikatakan ekonominya agak tertutup karena infrastruktur tidak terlalu baik ke daerah itu, dan masa lalunya juga tidak begitu baik. Jadi, bukan sekarang *aja* itu terjadi. Tetapi, untuk mewujudkan Aceh baru harus ada pola dan sistem ekonomi baru yang diwujudkan di Aceh. Nah, ini yang harus dikemukakan oleh bapak gubernur dan wakilnya sekarang dan juga para anggota DPR Aceh

di Jakarta ini; mereka perlu mengemukakan apa tawaran mereka ke depan sehingga keoptimisan muncul lagi pada rakyat Aceh. Sehingga, Aceh tidak dikepung oleh kepesimisan yang berlarut-larut seperti sekarang ini.

**PENYIAR** : Iya, langsung ke Pak Imam, ini terakhir. Apa kiranya yang mau ditawarkan, khususnya oleh Jakarta ya, atau pihak-pihak pusat agar optimisme terus ada untuk menjaga perdamaian dan juga transisi di NAD?

**IMAM** : Saya kira pemerintah Pusat harus bersungguh-sungguh ya, harus ihklas, harus betul-betul meyakinkan masyarakat Aceh bahwa tidak ada kamufase politik yang tadi disebutkan oleh beberapa, oleh salah seorang, penanya. Kemudian dengan UU No. 11 itu kan di Aceh akan lahir partai-partai politik lokal. Sebenarnya, tujuan dari partai-partai politik lokal ini adalah untuk menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, kemudian juga untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Aceh. Tentu tujuan-tujuan khusus juga disebutkan yaitu untuk memperjuangkan cita-cita partai politik lokal dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sesuai dengan kekhususan dan keistimewaan Aceh. Jadi, jangan nanti [terjadi] apa yang disebutkan tadi yaitu bahwa partai politik ini hanya [merupakan dan menampung] ambisi kekuasaan dari segelintir orang.

**PENYIAR** : Ya, OK. Baik, baik. Terima kasih sekali Bapak Imam Syu'ja. Sayang sekali, waktu kita sangat mepet, dan ini menjadi akhir kebersamaan kita dalam Kabar Aceh Interaktif [kali ini]. Terima kasih sudah bergabung, Bapak Imam dan juga Bung Amirudin al Rahab yang sudah hadir ke studio. Dan, Saudara semua, [ini] menjadi akhir kebersamaan kita. Saya Sri Wijayanti undur diri. Salam.

### Konsep KKR di Aceh

(Talkshow bersama Galuh Wandita dan Haris Azhar,  
9 Desember 2007)

**PENYIAR** : Salah satu indikator efektifnya perjanjian damai adalah penghentian kekerasan dan menurunnya insiden pelanggaran HAM, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Yang juga penting adalah berubahnya kondisi sosial dan politik. Di sana, posisi Aceh menjadi penting, karena daerah ini punya sejarah politik yang sangat keras yang diakhiri dengan perjanjian Helsinki. Lewat perjanjian damai itu dibuka ruang bagi seluruh rakyat Aceh untuk meneruskan agenda perdamaian. Satu hal yang harus diperhatikan dalam menggulirkan proses perdamaian di Aceh adalah penyelesaian pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu. Ini jelas telah menimbulkan luka yang teramat dalam, juga berdampak besar terhadap keseharian masyarakat di Aceh. Dalam konteks ini sejumlah kalangan menilai perlu membuat konsep kebenaran dan rekonsiliasi di Aceh atau KKR. Nah, Saudara, apa saja persoalan persoalan kemanusiaan dan HAM yang terjadi selama ini di Aceh? Apa saja konsep KKR yang perlu dilakukan di sana? Di Kedai Tempo telah hadir 2 narasumber kita, yang pertama adalah Mbak Galuh Wandita, aktifis HAM dari *International Center for Transitional Justice* [ICTJ], selamat siang, Mbak Galuh.

**GALUH** : Siang.

**PENYIAR** : Juga ada Haris Azhar, Kepala Divisi Pemantauan Impunitas dan Reformasi Institusi, Kontras. Selamat siang, Bung Haris.

- HARIS : Siang.
- PENYIAR : Saudara, nanti Anda bisa bergabung bersama kami untuk mengikuti [perbincangan] interaktif bebas pulsa. Bagi Anda yang berada di luar Jakarta, di Aceh khususnya, di [nomor] 08001403131 dan di Jakarta, di [nomor] 85909947. Dan [untuk] sms, bisa diketik KBR [ke nomor] 08121188181. Dan Anda yang hadir di Kedai Tempo juga siang ini bisa *ikut* [dalam perbincangan] interaktif bersama dua narasumber kita di studio. Dan sebelum kita mulai diskusi kita, saya mau membacakan radio yang mengikuti acara ini. Di Aceh yaitu Radio Prima FM dan radio Antero FM, di Banda Aceh, Radio Sonia Manis, Radio Getsunal FM dan Radio Anditya FM di Beureh, Radio Gitsi FM di Langsa, Radio Adiyem di Loksmawe, Radio Dalka, dan juga Radio Matahari di Melaboh. Ada sejumlah radio lain yang merelai [Inggris, *relay*, *ed.*] acara ini dan akan saya sebutkan di akhir nanti.

Dan pertama, kita langsung menuju Mbak Galuh, apa saja persoalan kemanusiaan yang terjadi di Aceh sepanjang masa DOM dan hingga kini?

- GALUH : Terima kasih, mungkin saya akan mulai dengan sedikit bercerita tentang hasil pengamatan sebuah penelitian yang dibuat oleh ICTI bersama dengan teman-teman di Aceh, karena itu menjadi semacam kerangka dari [perihal] kenapa saya pikir sebuah komisi kebenaran penting untuk dilakukan untuk Aceh. Kami berangkat dari pengalaman bahwa dalam situasi pasca-konflik, di mana dalam sebuah perjanjian damai sering kali korban tidak dilibatkan dalam proses perundingan itu sendiri, sehingga kepentingan korban tidak menjadi prioritas pada masa pasca-konflik. Dan karena itu, kami merasa



penting untuk mencoba mendengarkan apa *sib* pandangan korban tentang keadilan? Apakah yang menurut mereka sudah ada perdamaian yang bisa bertahan di Aceh? Kira-kira itu tentang awal mula kami juga, saya pikir sebagai latar belakang, ingin juga mengatakan bahwa kalau melihat perjanjian Helsinki yang tadi sudah disebut, sama, dalam perjanjian Helsinki ada beberapa mekanisme yang kita sebut mekanisme keadilan transisional. Berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM masa lalu dengan kaitannya membangun masa depan yang lebih baik. *Gitu ya*, jadi bahwa kita asumsinya adalah bahwa kita harus melihat ke belakang dan melihat apa *sib* kesalahan-kesalahan kita di masa lalu? Supaya kita tidak mengulangnya dan bisa membangun kehidupan demokratis yang damai di mana HAM bisa terlindungi. Dalam perjanjian Helsinki kita lihat ada beberapa mekanisme keadilan transisi yang sudah disepakati sebenarnya, salah satunya adalah KKR, yang mungkin akan lebih banyak lagi dibahas oleh Haris. Tapi juga sebuah pengadilan HAM telah juga ditawarkan dan disepakati dalam perjanjian Helsinki dan juga disepakati bahwa Indonesia harus menjalani segala macam kewajiban HAM-nya, berkaitan dengan berbagai instrumen yang sudah ditandatanganinya. Jadi, ada semacam upaya reformasi nantinya, ke depannya, harus lebih baik. Nah, kita tahu, bahwa dalam kenyataannya sekarang, sebuah KKR dan pengadilan HAM belum ada; karena itu sebuah masyarakat sipil di sana mencoba untuk melakukan advokasi mengkampanyekan ide ini. Tapi saya pikir, pas diskusi tentang modelnya, model ini berjalan bersamaan dengan proses pengadilan, bukannya menjadi substitusi dari itu. Nah, ICTJ dengan teman-teman NGO Aceh, kami keliling ke 9 kabupaten dan melakukan *focus group discussion*, sekitar bulan Juni,

Juli, Agustus. Dan kita berjalan berkeliling 9 kabupaten itu, sempat berdiskusi dengan 113 korban pelanggaran HAM, dan kita dapat beberapa inti perasaan mereka. Dan yang positif adalah beberapa korban senang dengan keadaan situasi yang riil, bahwa konflik dulu sampai dengan sekarang sudah tertutup pintunya. Tapi, ada beberapa persoalan yang cukup menguat, contoh, ada perasaan bahwa proses perdamaian ini belum mengakui penderitaan korban. Jadi, dengan keadaan yang demikian, mereka makin tersisih dan tidak mendapat pelayanan sebagaimana layaknya korban pelanggaran HAM. Kemudian, ada persepsi bahwa para mantan kombatan dan para mantan milisi malahan yang menerima banyak bantuan, karena ada program reintegrasi bagi mereka. Memang, di bawah program itu ada juga dana yang diberikan untuk korban yang disebut masyarakat sipil yang terkena dampak konflik, tapi pemberian itu tidak transparan dan belum ada pengakuan terhadap korban. Jadi, ini bermasalah bagi korban, dan ada kriteria korban yang dipakai dalam program itu di satu pihak sempit, di satu pihak luas. Sempit, karena bagi korban pemerkosaan misalnya, kekerasan seksual tidak masuk dalam bantuan tersebut, dan luas, karena bagi orang yang mengalami kerugian ekonomi misalnya, [yang] tidak dapat melanjutkan sekolah dimasukkan ke dalam program tersebut. Jadi, ini permasalahan inti dari proses perdamaian, karena bagi korban reintegrasi adalah mekanisme untuk para mantan kombatan, tapi kemudian korban disisihkan, itu yang jadi masalah bagi korban.

Kemudian satu hal yang muncul dari diskusi kita adalah adanya kerinduan dan desakan dari korban tentang apa *sib* yang sebenarnya terjadi pada keluarga mereka yang dibunuh dan dihilangkan? Dan apa sebenarnya latar belakang, sehingga peristiwa itu bisa

terjadi, baik secara lebih umum *kenapa* itu bisa terjadi maupun secara detail apa yang sebenarnya terjadi, sehingga ayah saya dibunuh? Ada juga korban yang ingin mendapatkan keadilan lewat tuntutan pidana, bahwasanya tanpa menghukum pelaku itu akan terjadi situasi yang selalu demikian. Kemudian dari pada itu, pengharapan korban adalah bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi tidak terulang di masa yang akan datang. Dan inilah yang menjadi inti dari diskusi kita, dan memang baru saja kita menyelesaikan penelitian, dan lalu melakukan *launching* juga. Dan penelitian itu berjudul “Memperhatikan Korban” dan adalah galian tentang proses perdamaian di Aceh dari perspektif keadilan transisional.

PENYIAR : Ya, Mbak Galuh, dari penjelasan tadi apa inti dari persoalan-persoalan mereka?

GALUH : Jadi, saya pikir kesimpulan dari penelitian itu adalah [bahwa] konsep keadilan itu tidaklah [bersifat] satu dimensi. Jadi yang menjadi harapan korban [adalah] adanya keadilan. Tapi, kalau kita tanya lagi apa itu keadilan? Keadilan itu adalah terpenuhinya hak-hak korban, bahwa ada pelayanan kesehatan mental bagi korban. Jadi ada yang berkaitan dengan kondisi hidup korban, tapi ada juga yang berkaitan dengan penghukuman pelaku. Dan juga berkaitan dengan janji bahwa pelanggaran HAM tidak terjadi lagi. Jadi, itu menjadi sangat penting bagi aspirasi korban dan bahwa sampai dengan sekarang mereka merasa belum didengar suaranya dan belum menjadi bagian dari Aceh baru pasca-proses perdamaian.

PENYIAR : Ya, Bung Haris, kalau kita melihat harapan korban HAM, apa model penyelesaiannya?

HARIS : Baik, kalau soal pelanggaran HAM itu, metode yang dikenal itu adalah lewat pengadilan HAM UU No. 26 Tahun 2000. Tetapi model pengadilan ini bukan satu-satunya yang dikenal, kita bisa menempuh cara yang lain. Nah, untuk konteks Aceh, metode penyelesaiannya itu [bisa] lewat komisi kebenaran; penyebutannya, kalau dalam perjanjian Helsinki dan UU Pemerintah Aceh, [adalah] KKR. Tapi, sebenarnya kita perlu tegaskan di sini, yang intinya, yang tadi secara tidak langsung Galuh sebutkan itu, adalah soal pengungkapan kebenaran, dan lebih penting adalah mengungkap apa yang sebenarnya terjadi dalam satu kurun [waktu] tertentu di Aceh. Nah, kalau kali ini, kita menawarkan model komisi kebenaran untuk Aceh ini dalam kurun waktunya sejak diberlakukannya DOM sampai 14 Agustus 2005, satu hari sebelum perjanjian itu ditandatangani. Jadi, kurun waktu itulah yang sebenarnya yang harus dipotret, siapa yang melakukan, siapa korban, apa kebijakan yang mendasari sehingga kekerasan meluas. Nah, itu sebenarnya model penyelesaian yang dilakukan. Jadi, selain pengadilan HAM, juga komisi kebenaran. Lalu pertanyaannya yang sering muncul adalah apakah [keduanya] saling menegasikan atau saling meminggirkan antara? Jika pengadilan saja, komisi kebenaran tidak perlu; saya pikir tidak juga seperti itu, kalau kita lihat masing-masing metode saling melengkapi. Artinya, komisi kebenaran bisa mengungkap, dan temuan dari komisi kebenaran bisa jadi petunjuk bagi otoritas hukum untuk melakukan penghukuman. Memang ada kendala di berbagai tempat, komisi kebenaran sudah ada di beberapa negara, itu memang temuan dari komisi tidak sesuai standard dari pengadilan, tapi itu tidak berarti komisi kebenaran tidak mendukung ke sana; justru temuan-temuan ini bisa ditindaklanjuti oleh otoritas hukum. Makanya

dalam tawaran rekomendasi kita, model-model penyelesaian pelanggaran berat di Aceh ini kita menyebutkan secara eksplisit bahwa temuan-temuan kebenaran itu bisa direkomendasikan oleh pengadilan, untuk dilakukan penyelidikan pelanggaran-pelanggaran HAM.

**PENYIAR** : Nah, kalau [soal] target dan bagaimana KKR ini bekerja? Target pertama ia memotret dalam satu kurun waktu tertentu dan memotret kebijakan-kebijakan yang muncul sebagai penyebab terjadinya konflik. Tetapi untuk konteks Aceh, kita melihatnya bukan sebagai daerah yang baru saja ada otoritarianisme, tapi baru selesai konflik. Jadi, mungkin saja bahwa pelaku itu bukan hanya negara tetapi musuh negara juga pelaku. Dan yang lebih penting adalah bagaimana kekerasan itu terjadi, dan komisi ini harus bisa mengungkap sejauh mana efeknya, harus bisa merekomendasikan bagi pemerintah dan pihak-pihak yang bertanggung jawab yaitu bentuk kerusakan yang dialami oleh masyarakat. Jadi, bukan hanya terjadinya kehilangan atau apa, tetapi juga di level psikologisnya terutama buat korban perempuan yang mengalami [kekerasan] berkali-kali. Dia tidak lari ke hutan, dia tidak dikorbankan, hanya penyiksaan saja, tapi ia juga harus menanggung [masalah ketika] aparat keamanan atau peserta konflik itu datang ke rumah, gedor rumah, menanyakan suaminya dan lain-lain, saya pikir itu menghancurkan saraf-saraf manusia, yaitu soal psikologis, dll..

**PENYIAR** : Ya, kami membuka partisipasi Anda yang mau bergabung bersama kami melalui telepon dan sms. Sebelum jeda iklan, saya akan membacakan sebuah kuis Kontras. Jangan lewatkan, Anda diundang berkreasi untuk menciptakan slogan bagi Kontras

dengan tema “Menuntut Keadilan”. Slogan tentu harus kuat, menarik dan pas bagi Kontras. Kuis ini berlangsung dari edisi pertama *talkshow* Kontras, 18 November sampai 30 Desember. Kontras menyediakan hadiah bagi 15 slogan terbaik. Hadiah tersebut adalah seperangkat alat kampanye. Dan dari 15 yang terbaik itu akan dipilih 3 teratas dan akan mendapatkan uang 500.000 rupiah. Dan pengumuman pemenang akan dilansir pada 30 Desember mendatang. Radio yang merelai acara ini adalah Radio Citra Pesona FM Aceh Singkil, Radio Megapon FM Sigli, Radio Fatali AM Belang Pidi, Radio Nakata AM di Loksukon, Radio Rapeja FM di Lamno, Radio Suara Indah di Tapak Tua, serta Radio Simeleh di Simeleh. Dan Kabar Aceh Interaktif akan kembakli setelah jeda berikut.

[Iklan ...]

Kembali lagi dialog interaktif kita edisi kali ini bekerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh dan tema kita kali ini ialah konsep KKR Aceh. Bersama dua narasumber kita yaitu Galuh dan Haris.

Bung Haris, model-model penyelesaian pelanggaran HAM juga dilaksanakan dengan KKR di beberapa negara; bagaimana penyelesaian masalah terkait dengan KKR ini?

HARIS : Ada beberapa model komisi kebenaran, ada yang seperti saya bilang pasca-sebuah pemerintahan yang sangat otoritarian, ada lagi komisi kebenaran pasca-konflik – jadi di satu wilayah yang baru saja konflik dibuat komisi kebenaran, ada juga komisi kebenaran yang bersifat lokal, hanya untuk menyelesaikan masalah di satu wilayah tertentu saja. Memang, sebetulnya, [menyangkut] komisi kebenaran ini, tidak

ada satu pakem yang bisa dibawa ke mana-mana; komisi kebenaran ini lahir dari sebuah perdebatan politik atau tekanan politik. Tekanan ini lahir dari sebuah kebutuhan, misalnya, di daerah tersebut sistem hukum belum direformasi secara baik, hingga diragukan belum dapat mengungkapkan suatu peristiwa dalam waktu kurun waktu tertentu. Nah, jadi tekanan-tekanan itu menghasilkan suatu lembaga, misalnya, kita pada waktu itu ada Ekstra-Judisial, jadi dia di luar dari proses hukum yang ada. Nah, Indonesia sendiri sebetulnya, yang mirip seperti itu pernah muncul, misalnya TPF Munir; jadi dia khusus meskipun dalam Kepresnya tidak digambarkan secara khusus jangka waktunya. Tapi, untuk kasusnya Munir, jadi dia di luar jalur hukum tapi rekomendasinya bisa digunakan [oleh] otoritas hukum. Nah, model-model seperti ini memang tidak punya pakem, tugas, tapi ia mengarah pada pengungkapan sebuah fakta [tentang] apa yang sebetulnya terjadi pada tempat, waktu atau kasus tertentu. Lalu yang diharapkan juga ialah temuan dari ekstra-judisial ini bisa [dipakai untuk] merekomendasikan serta mengubah secara luar biasa, misalnya, bukan semata ingin menyelesaikan kasus melainkan melihat siapa siapa yang ada dalam kasus tersebut, terhadap pelaku misalnya dikembalikan pada posisinya sebagai manusia, warga negara. Nah, kalau dia kehilangan hak-haknya sebagai warga negara maka negara penting untuk mengembalikan hak-haknya. Kepada pelaku, misalnya, selain dihukum tapi juga dapat, misalnya, ditemukan sebuah kerusakan yang cukup mendasar, maka komisi ini bisa mendorong untuk melakukan perbaikan; itu disebut reformasi institusi. Atau juga mereformasi isi dari sebuah pemaknaan.

PENYIAR : Oke, sebelum dilanjutkan ada penelepon yang mau bergabung...

Pak Hendrik dari Langsa. Halo, Pak Hendrik. *Oh*, sayang, terputus. Tapi ada beberapa pesan pendek, dari Bung Danil di Banda Aceh: “Kenapa LSM hanya peduli [dengan] korban-korban dari TNI POLRI, bagaimana korban-korban yang jatuh oleh GAM, kalau mau jujur mereka dua-duanya pelanggar hak asasi berat di Aceh.” Pesan selanjutnya dari Aden di Aceh: “Untuk saat ini, apa yang dilakukan pemerintah terhadap korban?” Lalu dari Andika di Takengon: “HAM di NAD harus segera diusut tuntas, kalau tidak bisa menimbulkan penyakit kronis bagi NKRI.”

PENYIAR : Silahkan, Mbak Galuh.

GALUH : Mungkin untuk pertanyaan pertama saya pikir salah satu mandat dari komisi kebenaran di mana pun ialah untuk dilihat oleh semua pihak yang berkonflik; jadi sebuah komisi kebenaran itu sifatnya independen dan imparisial. Memang [terhadap] pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh GAM pun [menjadi] salah satu proses pencarian kebenaran yang harus dilakukan komisi kebenaran di Aceh kalau nanti dibentuk; terus berkaitan [dengan] apa yang harus dilakukan oleh pemerintah, memang komisi kebenaran biasanya [merupakan] mekanisme resmi yang dibentuk pemerintah untuk mempelajari apa yang terjadi di masa lalu, agar bisa meminta maaf dan bertobat dan memperbaiki kerusakan-kerusakan yang ada. Jadi, mencoba memberi pelayanan kepada korban sekaligus mengangkat dan mengakui kesalahan-kesalahannya. Jadi, sebenarnya konsep komisi kebenaran inilah yang ditawarkan oleh masyarakat sipil kepada pemerintah, dan pemerintah di sini bukan hanya lokal tapi juga nasional.



- PENYIAR : Apa yang harus dilakukan pemerintah? Kalau Anda melihat, apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah?
- GALUH : Saya pikir sudah banyak juga pencapaian, jadi kita juga harus mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh, di bawah, badan reintegrasi yang memberi dukungan kepada mantan kombatan memberi dana. Dengan segala ketidaksempurnaan proses itu, sudah ada yang dilakukan, tapi perlu diperbaiki dan kinerja ini yang kita desakkan.
- PENYIAR : Dan, Bung Haris, apa yang harus diperbaiki dan upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Aceh selain KKR; atau mungkin ada yang harus dimasukkan dalam KKR?
- HARIS : Saya pikir, memang cukup krusial dalam memotret korban, jadi bukan saja orang-orang yang punya implikasi konflik. Kalau itu, misalnya, kita masukkan bukan hanya korban, tapi juga mantan kombatan dan mantan GAM atau milisi, dia juga terimplikasi dari konflik. Tadi Galuh sudah menggambarkan serta melingkari siapa yang sebenarnya menjadi korban. Nah, itu yang saya pikir tidak jelas dalam kebijakan-kebijakan di Aceh; apa lagi ada tumpang tindih antara pasca-konflik dengan penanganan pasca-tsunami. Nah, ini saya pikir seolah-olah dia [baca: kebijakan itu, *ed.*] menegasikan semua bentuk penderitaan dan kerugian akibat konflik. Patut dikhawatirkan bahwa melihat di Aceh itu hanya pada korban tsunami saja, konflik tidak. Padahal, saya pikir penting untuk membangun penanganan antara orang yang terimplikasi konflik dengan implikasi tsunami. Jadi, itu karena ada di beberapa wilayah lain di Aceh, ada yang tidak terkena tsunami, tapi korban konflik cukup parah di sana. Kira-kira *gitu*.

- PENYIAR : Anda yang hadir di Komunitas Tempo dan Gayuh, silahkan, yang ingin mengajukan pertanyaan, kami buka yang pertama. Atau, kita yang bertanya ... hehehe... *Oh*, ada. Oke, Hilman, mungkin ada sms yang masuk. Anda mau bertanya Mas? Silahkan maju ke depan, Mas.
- ALFIAN : Saya Alfian, dari *The Jakarta Post*. Mungkin bisa lebih diperinci lagi dari model-model komisi kebenaran Aceh. Oke, Mas. *Makasih*.
- PENYIAR : Satu lagi, yang mau tanya-tanya sekaligus. Oke, Husin, warga Aceh.
- HUSIN : Mungkin *gak* kalo perdamaian bisa diciptakan, ada konsorsium internasional, seperti pengamat atau konsultan asing, yang tetap ambil peran mengawal KKR ini? Terus, saya setuju [dengan] Haris tadi, korban-korban itu luar biasa, dan perempuan, itu memang yang harus direhabilitasi bagi putra-putri Aceh sekarang; Ada juga korban yang bukan konflik tapi tsunami dan itu seperti berturut-turut. Saya kira itu *aja*; ada gak partisipasi internasional mengawal ini? *Makasih*, Mas.
- AZRIANA : Saya Azriana dari Komnas Perempuan. Yang perlu dicatat dari pemaparan-pemaparan narasumber adalah bahwa korban tidak terlibat dalam proses penyelesaian kasus Aceh yang sudah diupayakan oleh pemerintah. Nah, komisi kebenaran ini [merupakan] salah satu model yang ditawarkan KontraS dalam penyelesaian kasus Aceh. Yang ingin saya tanyakan ialah persisnya seperti apa, sehingga korban terlibat dalam proses tersebut, sehingga korban tidak beranggapan bahwa mekanisme ini sama saja? Itu yang *pertama*. Terus, yang *kedua* [adalah] masyarakat

Aceh, khususnya yang menjadi korban konflik, itu kan sudah punya kekecewaan yang dalam terhadap lambatnya penanganan kasus-kasus konflik Aceh. Nah, mekanisme seperti apa yang dibangun [oleh] tawaran model tersebut untuk mengembalikan rasa optimis para korban yang sudah kecewa terhadap penanganan kasus Aceh; katakanlah dalam hal ini, pembentukan komisi kebenaran ini di tengah kekecewaan yang amat dalam seperti itu. Seperti apa strategi membangun rasa optimis itu? Terimakasih.

PENYIAR : Oke, terakhir Mas, yang itu.

ANDI : Saya Andi dari TIFA. Ada satu poin terhadap KKR Aceh bahwa sudah cukup lama pembicaraan ini sejak ada mandat dari MoU dan juga perdebatan nasional tentang KKR; jadi yang baru kita diskusikan ini adalah KKR yang sifatnya formal, besar, institusional yang kuat perlu *resource* yang besar. Saya mau tanya, kalau kemungkinan-kemungkinan kecil, dimulai dululah dari pada *nunggu* yang besar; istilahnya, di tingkat kampung ada yang dilakukan di mana masyarakat punya sebuah inisiatif tentang masa lalu mereka, bisa *nggak* dimulai dengan level *kayak gitu*, pada tingkat kampung keadilan bisa didapat. Oke, terima kasih.

PENYIAR : Oke, Mbak Galuh, Bung Haris, langsung saja.

GALUH : Oke, tentang desain KKR. Saya pikir ini satu hal yang penting. Kan kalau kita mau beli sepeda pun kita lihat-lihat dulu sepedanya *kayak* apa dan saya pikir demikian juga dengan sebuah komisi kebenaran; kita juga harus lihat dulu komisi kebenaran itu seperti apa karena modelnya bisa macam-macam dan memang yang dicoba untuk digagas untuk masyarakat sipil di Aceh dan Jakarta juga adalah

sebuah KKR yang bisa utamakan korban, jadi bisa menjadi semacam corong untuk suara korban. Itu juga bisa menjawab pertanyaan dari Azriana dari Komnas Perempuan. Tapi kira-kira satu proses yang penting adalah proses konsultasi dengan korban. Jadi, ini bagian dari proses kita hari ini adalah mencoba menjelaskan kepada orang sebanyak mungkin, apa *sib* konsepnya? Dan kita perbaiki bersama, tapi intinya adalah komisi kebenaran seharusnya bisa menaruh korban dan kepentingan korban sebagai jantung dari komisi kebenaran. Caranya bagaimana? Nah, dalam konsep yang kita tawarkan itu, kan dari segi strukturnya ada divisi yang nanti akan memperhatikan secara khusus persoalan-persoalan korban. Jadi, dukungan untuk korban dan juga dari segi pengungkapan kebenaran bisa mendengarkan sebanyak-banyaknya kesaksian dari korban baik dari TNI maupun bukan. Kita berharap bisa membuat sebuah ruang yang cukup aman untuk orang yang beri kesaksian itu kepada komisi kebenaran di Aceh. Nah, apakah itu nanti bersifat tertulis dan tertutup karena situasinya belum cukup aman atau bisa juga terbuka sehingga bisa terjadi semacam sidang publik di mana orang bisa mengungkapkan apa yang terjadi pada dirinya dan itu menjadi pilihan-pilihan dari komisi ini. Kita juga dalam desain komisi ini memikirkan bagaimana perlindungan korban dan saksi ini harus menjadi salah satu prasyarat dari komisi kebenaran. Juga menjadi bagian kerja dari komisi ini adalah membantu proses pemulihan korban tidak hanya pada saat komisi bekerja, tetapi juga nantinya merekomendasi sebuah program reparasi jangka panjang. Kami harapkan, nanti sesudah komisi mengumpulkan kesaksian sebanyak-banyaknya dari korban ini, bisa menghasilkan sebuah laporan [tentang] apa dan *kenapa* pelanggaran-pelanggaran

HAM ini terjadi. Saya ingin katakan, kadang-kadang orang punya gambaran di kepala tentang komisi kebenaran, yang terkadang itu [merupakan] model yang paling terkenal, yaitu model Afrika Selatan. Di mana komisi kebenaran bisa panggil polisi dan polisinya bisa berkeringat karena ada proses tanya jawab, karena mereka menawarkan kemungkinan mendapatkan amnesti di komisi kebenaran, tapi hampir 10 tahun kemudian kita melihat ke belakang di Afrika Selatan. Saya pikir, bagi korban, pemberian amnesti bagi pelaku akhirnya tidak memberikan pemuasan rasa keadilan. Jadi, ini pelajaran yang kita ulangi di Aceh; jadi yang kita tawarkan di Aceh adalah komisi yang sebanyak-banyaknya mendengarkan pengalaman korban. Dan dari segi pelaku, itu nantilah, menjadi bagian proses ke depan komisi ini.

PENYIAR : Bung Haris, silahkan mekanisme model yang lebih detail.

HARIS : Ya, saya hanya ingin menambahkan saja. Tadi, Galuh sudah menyebutkan, sebetulnya kalau di buku yang kita luncurkan ini ada satu bab yang berisi tentang KKR di Aceh. Nah, ada 2 yang cukup mendasar yaitu prinsip-prinsip komisi kebenaran. Nah, prinsip-prinsip ini, kita konsultasikan dan mengacu pada hukum nasional juga internasional soal tidak bisa diberikan amnesti pada pelaku pelanggaran HAM dan juga yang cukup penting, kadang-kadang orang lupa konteks lokal di Aceh itu sendiri. Jadi, sebenarnya, kalau *ngomong* komisi kebenaran atau bagaimana menyelesaikan wilayah-wilayah yang menyangkut kemanusiaan di Aceh, itu ada modalnya. Misalnya, sayam, sulo, pesejuk, *kayak gitu-gitu*. Nah, ini semua soal pemberian ganti rugi akibat kerugian. Lalu soal bagaimana sebuah seremonial yang sangat

bermakna mengembalikan harkat seorang pelaku secara setara dan pemberian sanksi sosial. Nah, itu semua yang dijadikan prinsip-prinsip dan tujuan komisi yang sudah saya gambarkan tadi sebelumnya. Tapi, 3 hal yang menjadi aras kerja komisi ini adalah soal pengungkapan kebenaran, soal reparasi dan soal rekonsiliasi. Saya berangkat dari yang terakhir.

Kadang-kadang ini dilihat sebagai [sesuatu] yang sangat kontroversial sekali dalam sebuah pelanggaran berat HAM. Tapi, sebetulnya, yang kita tawarkan di sini adalah rekonsiliasi komunitas. Kita berangkat dari satu pemikiran bahwa bagaimana Anda [sebagai] korban, hidup bertetangga dengan orang yang dulu menjadi pelaku. Misalnya, dia anggota TNI/Polri pada level rendah di kampung itu, atau dia mungkin mantan anggota GAM pada level yang sama, atau mungkin anggota milisi. Nah, ini yang seharusnya dipikirkan. Tetapi, catatan kita adalah tidak bisa, jika orang itu diduga terlibat pelanggaran berat HAM. Kalau levelnya masih level kriminal itu bisa kita pikirkan untuk direkonsiliasikan, tapi hanya level komunitas, bukan level pertanggungjawaban terhadap operasional. Lalu, soal reparasi, saya pikir yang penting jangan berpikir bahwa komisi ini akan memberikan reparasi. Tidak mungkin. Reparasi sosial itu butuh waktu mungkin 15 tahun, 20 tahun dan 2 generasi. Sedangkan komisi ini kita tawarkan hanya 2-3 tahun; jadi komisi ini hanya menemukan apa yang perlu direparasi dan temuan-temuan ini. Misalnya, ada beberapa orang yang tidak bisa ditunda-tunda lagi dan memang harus diberikan reparasi, ekonominya, kehidupan sosialnya, harus direkomendasikan dan diberikan. Nah, soal pencarian kebenaran ini, yang juga menjadi penting [sebagaimana] tadi sudah kita diskusikan soal waktu dan lain-lain. Tapi tadi Galuh menyebutkan Afrika

Selatan. Kira-kira gambarannya kalau *nggak* salah, di Afrika Selatan, yang dibawa ke komisi kebenaran itu bukan hanya korban – tapi yang utama korban, memang – tapi, selain korban dia [baca: Komisi] juga perlu mendengar dari aktor-aktor sosial yang lain, misalnya media, kolompok-kelompok organisasi, organisasi petani-buruh, dan lain-lain. Atau juga, pelaku nanti bisa dipanggil, lalu juga tentang pengungkapan secara forensik di Aceh, itu misalnya. Kita lihat ke belakang, kita lihat di berita, sudah lebih dari 10 kuburan massal dibongkar. Nah, itu seperti apa penanganannya. Nah, kira-kira itu juga penting dilakukan, dan hal-hal lainnya, soal laporan akhir, dan yang lebih penting [adalah] temuan-temuan itu mau disimpan di mana, dibakar, ditanam atau *diapain*? Nah, mungkin harus ada satu pusat dokumentasi tentang sejarah kelam masa lalu. Nah, saya pikir, di Aceh ini banyak situs-situs yang menggambarkan soal itu.

Nah, saya juga ingin menjawab saudara Andi dari TIFA. Apa yang mesti dilakukan sementara ini. Kembali ke perdebatan soal korban, sebetulnya komisi kebenaran ini tidak ada artinya kalau tanpa keterlibatan korban. Jadi, sebetulnya komisi ini mendengar lebih banyak. Kalau di pengadilan korban ada seribu, kita mendengar 10 atau 20 orang, *udab* cukup, *udab* tergambar; tapi kadang-kadang korban yang lain yang tidak dilibatkan dalam pengadilan, dia merasa tetap asing, teralienasi. Nah, ini sebetulnya yang harus ditanggulangi oleh komisi kebenaran. Jadi, dia mendengar semua titik koma, tanda seru, tangisan, dan apa pun yang keluar dari korban. Jadi, korban menceritakan itu, itu yang kita dengar, semuanya. Jadi, memang komisi ini seperti memberikan ruang. Seolah-olah Negara membuka ruang kembali: “Marilah kita, Anda ini warga Negara

kami, Anda manusia, Anda perlu didengar suaranya, dulu kami yang berkuasa yang berbicara, sekarang Anda yang berbicara.” Nah dari situ pun nanti ada proses keterlibatan yang cukup besar dan korban merasa memiliki dan berkepentingan terhadap komisi itu. *Lab*, kalau komisinya belum ada? Saya pikir penting dibikin, sekarang. Selain sosialisasi, misalnya soal bagaimana membangun dan merekonstruksi kebenaran di komunitas masing-masing, di level kampung atau pada level kasus bersama. Misalnya, kasus simpang KKA yang korbannya banyak, mungkin bisa dikumpulkan, dibikin satu forum untuk merekonstruksi seperti apa peristiwa dulu.

PENYIAR : Kita sudah terhubung lagi, ada telepon, atau sms. Ya, ada dari Langsa Timur kembali lagi, ini Pak Hendrik. Halo, Pak Hendrik.

HENDRIK : Halo selamat siang Pak. Begini, saya ingin menanyakan, sebenarnya tujuan pengadilan HAM ini ditujukan kepada siapa, pihak TNI atau GAM? Dan dalam pelaksanaan pengadilannya, itu hendaknya jangan hanya teorinya saja *gitu*, tetapi kalau bisa, dalam pelaksanaannya, praktiknya, itu betul-betul dijalankan. Karena, yang jadi korban itu masyarakat kecil.

PENYIAR : Baik, terima kasih, Pak Hendrik. Dan pesan selanjutnya dari Mas Bantul: “Untuk apa mencari kesalahan di masa lalu, bagiku tak penting, toh jika terungkap, dan bangsa kita pemaaf. Wajar saja pejabat kita korupsi dan [melakukan] pelanggaran HAM, sepertinya sudah dimaafkan oleh masyarakat.” Lalu, berikutnya pesan dari 08526024xxxx: “Saya mau tanya tentang milisi yang ada di Takingon dulu, dulu masa konflik, milisi banyak membantu Indonesia dalam menumpas GAM, tapi sekarang kenapa



mereka kurang diperhatikan. Bagaimana menurut narasumber?” Dan, pesan selanjutnya dari Ilham: “Menurut saya, banyak kebohongan yang dilakukan militer, contohnya di sini, mereka melakukan apa saja atas nama penguasa darurat. Saya juga termasuk korbannya.” Itu saja Budi silahkan.

**BUDI** : Ya, terima kasih Hilman. Dan, Saudara, beberapa menit lagi kita akan terhubung dengan KBR 68H. Dan sebelum kita akhiri diskusi ini, saya akan membacakan sejumlah radio yang merelai siaran radio ini, Radio Fama FM, Taspa FM di Kota Fajar, Radio di Tangengon, Radio FM di Sabang, dan Radio Talengko di Gayo Luwes, dan Radio di Aceh Pidi Barat, Radio Tasfa FM di Utara dan Selatan dan Radio Kru Tes di Kota Fajar, serta Radio Gurita FM di Suaka Baku Kandang Aceh Selatan, NAD, serta Radio Utan Kayu di Jakarta. Mbak Galuh, mungkin ada komentar singkat saja?

**GALUH** : Mungkin singkat saja. Saya mau klarifikasi pertanyaan pertama dari bapak di Langsa: apa tujuannya pengadilannya HAM. Jadi, kita kan sedang membahas Komisi Kebenaran, dan Komisi Kebenaran itu harusnya sebuah mekanisme yang beda dari pengadilan HAM, bisa bekerja berdampingan. Tapi komisi kebenaran itu lebih mendengarkan sebanyak-banyaknya suara dan penderitaan korban dan kemudian bisa menarik kesimpulan tentang apa kelasahan-kesalahan di masa lalu. Sedangkan, pengadilan HAM kan seharusnya mengadili pelaku. Dan ini proses yang berbeda dan tetap juga harus kita perjuangkan, karena ini juga demi demokratisasi dan proses perdamaian juga. Saya pikir itu jawabannya.

PENYIAR : Saudara, sebelum kita akhiri untuk *on air* diskusi kita, Kabar Aceh Interaktif siang ini, kami ingatkan kembali, Anda diundang untuk mengembangkan kreasi buat Kontras, dengan tema “Menuntut Keadilan”. Slogannya tentu harus kuat, menarik bagi Kontras. Kuis ini berlangsung dari edisi pertama *talkshow* Kontras dengan KBR 68H, 18 November sampai edisi terakhir Desember 2007. Saudara, kita segera bergabung ke KBR 68H untuk menyimak kabar baru.

## Konflik Perempuan dan Keadilan (Talkshow bersama Samsidar, 16 Desember 2007)

PENYIAR : Salam. Selamat siang Saudara, kita berjumpa kembali dalam Program Kabar Aceh-Interaktif dalam KBR 68H edisi Minggu 16 Desember 2007. Selama satu jam ke depan saya, Sri Wijayanti, dibantu oleh Mondy Krekers; kita akan menemani Anda dalam Kabar Aceh Interaktif siang hari ini. Saudara, pada Kabar Aceh Interaktif kali ini kita bekerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh dan kita akan angkat tema soal Konflik Perempuan dan Keadilan. Saudara, kadang konflik membawa luka yang berkepanjangan. Selama konflik berlangsung di Nanggroe Aceh Darussalam, ribuan orang terbunuh, hilang atau menjadi korban penyiksaan, tidak sedikit di antara para korban itu adalah perempuan. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan atau Komnas Perempuan serta kelompok perempuan Aceh mencatat sepanjang 1998 hingga tahun 2000 ada 56 perempuan ditembak, 26 dianiaya, 20 diperkosa serta 40 diserang secara seksual. Ini tentu saja menyedihkan, karena tidak semua kasus bisa diselesaikan secara hukum. Misalnya, untuk kasus perkosaan di mana si perempuan yang menjadi korban justru harus menjadi korban diskriminasi lanjutan baik oleh suaminya maupun oleh Negara lewat pengadilan. Kekerasan seksual, Saudara, masih tidak dilirik pemerintah; dianggap bukan bagian dari kekerasan itu sendiri. Ini bisa terlihat dari dana kompensasi pemerintah yang hanya ditujukan pada korban hilang dan terbunuh bukan korban kekerasan seksual.

Apa saja kekerasan yang dialami perempuan di wilayah konflik seperti Nangroe Aceh Darussalam? Apa saja kompensasi serta pemenuhan hak yang sudah diberikan kepada mereka? Apa saja perbaikan kondisi yang sudah dilakukan? Nanti kita akan berbincang soal tema kita pada siang hari ini dengan narasumber [kita, yaitu] Ibu Samsidar; dia adalah pelapor khusus Komnas Perempuan, peneliti *International Center for Transitional Justice* yang sedang berada di NAD.

Dan Saudara, saat ini kita sudah terhubung dengan Ibu Samsidar. Selamat siang Samsidar. Halo, halo, Mbak Samsidar? Saudara, ternyata terputus sudah. Dan seperti biasa, Saudara-Saudara, dalam Aceh Interaktif, kita juga membuka ruang interaktif bagi Anda yang ingin berpendapat terkait tema kita pada siang hari ini. Anda bisa menghubungi nomor telepon bebas pulsa [yang] sudah kita siapkan di 08001403131 atau di 02185909947, atau Anda juga bisa mengirimkan pesan pendek di 08121188181. Dan kita sudah terhubung kembali dengan Mbak Samsidar. Selamat siang Mbak Samsidar?

SAMSIDAR : Selamat siang.

PENYIAR : Ya, saat ini kita berbicara soal konflik perempuan dan keadilan. Nah, [berkaitan dengan] temuan dari ICTJ atau *International Center for Transitional Justice*, sebenarnya kekerasan terhadap perempuan di wilayah konflik seperti Aceh ini seperti apa Mbak?

SAMSIDAR : Ya, seperti di wilayah konflik lainnya. Jadi, memang perempuan di sana itu memang, ya, dijadikan alat penundukan strategi perang dan lainnya yang kemudian itu kan terwujud di dalam kekerasan yang

mereka alami, misalnya adalah kekerasan fisik maupun seksual; Nah itu kan terjadi.

PENYIAR : Dan, kalau dilihat selama konflik yang terjadi di NAD, mungkin bisa diceritakan bentuk-bentuk kekerasan itu seperti apa saja Mbak? Tentunya tidak hanya kekerasan secara fisik juga ya?

SAMSIDAR : Ya, katakanlah, misalnya, mulai dari 89 (maksudnya, tahun 1989, *ed.*), karena orang tuanya, atau saudaranya, atau suaminya misalnya, dituduhkan sebagai anggota GAM. Nah, di era kemudian mereka mengalami berbagai penyiksaan bahkan ada yang [menjadi] apa, misalnya kalau di rumah gedung itu, sebagai *sexual slavery* (perbudakan seksual, *ed.*). Nah, kemudian juga, misalnya, kalau yang tidak ada kaitannya dengan GAM karena, misalnya, aparat TNI lewat dan kemudian di sana terjadi kontak senjata, nah rumah-rumah penduduk yang di sana – yang kalau di desa itu mayoritas dihuni oleh perempuan ketika konflik – itu dibakar lagi; atau misalnya si aparat mendatangi rumah-rumah tersebut dan menanyai di mana anggota GAM [dan] sebagainya, kalau tidak tahu, dipukul; dan misalnya ketika ada serangan fajar untuk mengatakan menyerbu sebuah desa yang dikatakan sebagai basis GAM; nah, aparat masuk dengan memakai topeng dan sebagainya ke rumah-rumah kemudian menggrebek rumah, merusak barang-barang yang di sana, menghardik orang, memukul, bahkan sampai memperkosa.

PENYIAR : Nah, kemudian kalau dilihat dari kekerasan yang terjadi, posisi perempuan di sini Mbak, dalam setiap kasus kekerasan yang menimpa mereka, ini bagaimana?

SAMSIDAR : Sebenarnya, semakin lama konflik itu terjadi, sebenarnya *tuh* semakin tidak jelas diketahui. *Ya*, dalam artian siapa pun perempuan itu bisa mengalami kekerasan; alasan untuk mereka menerima kekerasan itu macam-macam. [Juga] seperti saya katakan tadi, kalau ada peperangan di sana, ya perempuan akan mengalami [kekerasan]; ketika di-*sweeping*; juga kalau kebetulan [ketika terjadi] kontak senjata kebetulan ada di sana, bisa kena peluru nyasar, kemudian juga diinterogasi, dipertanyakan; bahkan, ada yang hanya lewat pulang dari sekolahnya, karena melewati sebuah pos militer, itu ditarik dan kemudian diperkosa. Nah, itu kan terjadi begitu saja, bahkan juga istri dari aparat TNI yang lagi naik bus umum, karena ada *sweeping* dari GAM, juga mengalami kekerasan. Nah, itu kan terjadi juga di kedua belah pihak.

PENYIAR : Nah, kemudian *International Center for Transitional Justice* sendiri apakah pernah melakukan penelitian khusus seputar hal ini di wilayah konflik yang lain untuk kemudian bisa menjadi perbandingan antara di Aceh dan kemudian di daerah-daerah lain? Seberapa bedanya secara signifikan antara kasus kekerasan terhadap perempuan di Aceh dan di daerah-daerah lain itu Mbak?

SAMSIDAR : Ya, untuk di Indonesia, terus terang, ICTJ itu baru dan jadi kita baru melakukan penelitian di Aceh. Tetapi, secara pribadi, misalnya, orang-orang yang ada di ICTJ itu melakukan penelitian bukan hanya di Aceh, tetapi juga di Timor Leste, ada di Ambon dan kemudian ada di Poso. Katakanlah seperti saya. Nah, sebenarnya pola-pola kekerasan yang diterima oleh perempuan di wilayah konflik itu tidaklah jauh berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain. Katakanlah dalam hal ini Timor Leste dan Poso. Nah apa pun, dengan berbagai alasan apa pun, mereka

akan mengalami kekerasan itu. Apakah mereka yang disebut sebagai bagian dari pihak lawan. Nah, itu akan dijadikan sasaran. Atau misalnya masyarakat biasa karena di sana ada penempatan aparat, dan kemudian bersinggungan langsung dengan aparat, juga akan mengalami berbagai kekerasan. Jadi, sebenarnya pola-polanya *tuh* tidak jauh berbeda, hanya soal jumlah, waktu, di mana, dan kapan.

PENYIAR : Dan, jumlah di Aceh lebih besar dibandingkan dengan daerah-daerah lain ya Mbak?

SAMSIDAR : Kalau dibandingkan dengan Poso, tentunya *ya*. Karena kita melihat Aceh itu berapa tahun *sib* konfliknya? Itu kan cukup lama. Jadi, semakin lama konflik, tentunya semakin banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan.

PENYIAR : Nah, kemudian kalau melihat contoh-contoh kasus kekerasan terhadap perempuan, apakah ada yang kemudian menjadi sorotan khusus untuk melihat betapa Negara ini masih tidak memperhatikan nasib perempuan khususnya di NAD Mbak?

SAMSIDAR : Saya rasa penelitian-penelitian yang pernah dilakukan – saya terlibat di Komnas Perempuan kemudian di ICTJ, atau ketika menjadi aktivis perempuan di Aceh – nah ini sebenarnya sudah banyak sekali untuk didengarkan baik secara nasional maupun internasional, misalnya seperti *sexual slavery* yang terjadi di rumah gedung Aceh; dan kemudian ada juga korban pemerkosaan yang tahun 99 misalnya sempat bertemu dengan pelapor khusus kekerasan terhadap perempuan PBB. Nah, ini kan sebenarnya sudah bukan sesuatu yang baru lagi. Hanya, seperti apa kemudian kisah itu ditindaklanjuti? Ini yang menjadi masalah. Tentang kekerasannya itu sendiri,

saya rasa sudah cukup banyak dokumen yang berbicara tentang itu.

PENYIAR : Ya, Mbak Samsidar, ini pengantar dari Anda dan kita sudah membuka ruang interaktif khususnya bagi Anda warga Aceh dan daerah-daerah lain yang merelai program ini. Silahkan. Yang ingin berinteraksi atau bertanya terkait tema kita pada siang hari ini soal konflik perempuan dan keadilan, Anda bisa menghubungi di 08001403131 – ini adalah nomor telepon bebas pulsa, atau di 02185909947 – sementara untuk SMS atau pesan pendek Anda bisa kirimkan di 08121188181. Kabar Aceh Interaktif akan kembali setelah jeda berikut ini.

[Jeda iklan]

PENYIAR : Saudara, terima kasih, Anda masih bersama Kabar Aceh Interaktif. Kita bekerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh, dan siang hari ini kita mengangkat tema soal konflik perempuan dan keadilan bersama dengan narasumber kita, Mbak Samsidar, bekas pelapor khusus Komnas Perempuan untuk masalah Aceh, yang juga sekaligus sebagai peneliti ICTJ. Mbak Samsidar?

SAMSIDAR : Ya, halo!

PENYIAR : Ya, kita sudah terhubung dengan penelepon. Ya, sudah ada Pak Riza di Banda Aceh. Selamat siang, Pak Riza.

RIZA : Ya, selamat siang!

PENYIAR : Ya, silahkan Pak!



RIZA : Ya, begini. Saya mau nanya sama Mbak Samsidar. Mbak Samsidar, gini Mbak, saya mau tanya, kok penyelesaian masalah HAM di Aceh, terutama yang tentang masalah perempuan, mengapa sangat sulit diungkapkan ke permukaan? Kalau masalah-masalah lain kan, seperti mantan komplotan GAM yang menyerah, lebih mudah diselesaikan masalahnya, dan ada dana kompensasi untuk mereka. Apa sebenarnya masalah utama dalam mengungkapkan masalah itu Mbak?

PENYIAR : Baik, terima kasih. Dari Pak Riza di Banda Aceh. Pertanyaannya singkat padat. Dan langsung saja *nih* Mbak Samsidar, kenapa kemudian penyelesaiannya sangat sulit dan jarang diangkat ke permukaan untuk isu-isu perempuan ini?

SAMSIDAR : Ya, kalau kita lihat, itu bukan hanya untuk di Aceh. Bahkan di dalam Perang Dunia II pun kasus-kasus *sexual slavery* seperti *jugun ianfu* itu juga tidak tersentuh. Nah, sebenarnya ini lagi-lagi berangkat dari sebuah nilai ya, yang menganggap bahwa perempuan di dalam kondisi konflik itu sudah wajar menerima perlakuan-perlakuan seperti yang saya katakan tadi. Nah, saya mencatat, memang untuk di Aceh, itu hanya ada dua kasus yang diadili, kasus perkosaan pertama yang melalui pengadilan, dua-duanya melalui pengadilan militer. Nah, dalam artian itu kan banyak sekali kasus terhadap perempuan yang tidak diselesaikan. Nah, kalau ditanyakan kenapa, ya ini juga berangkat dari sejauh mana – katakanlah, pemerintah dalam hal ini sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, termasuk kekerasan terhadap perempuan – melihat betapa pentingnya pelaku bertanggung jawab. Jadi, jawabannya sebenarnya [terletak] pada pemerintah sendiri. Kalau kita melihat, *political will* pemerintah

dalam hal ini terhadap kasus-kasus terhadap perempuan sama sekali tidak ada. Satu lagi, ada anggapan bahwa khususnya kekerasan terhadap perempuan yang bernuansa seksual, itu kan sebagai aib; jadi kadang-kadang itu kan di satu sisi dijadikan sebagai sebuah dokumen untuk menyatakan terjadi kekerasan di dalam sebuah wilayah konflik, tapi di satu sisi lagi itu ditutup-tutupi; angka yang kita terima pun hanya permukaan saja, banyak yang tidak melaporkan itu.

Kemudian sulit sekali untuk kemudian kalau yang dijadikan dasar pegangannya itu misalnya seperti KUHP. Misalnya, untuk pemerkosaan di sana yang harus ada bukti dan sebagainya. Tapi menurut saya, ada kelemahan-kelemahan di soal substansi hukum yang ada untuk mengungkapkan, [tetapi juga] *political will* yang memang sampai sekarang tidak ada. Jadi itu kembali pada pemerintah, kenapa itu tidak dilakukan, padahal ... katanya bahwa perempuan itu merupakan sebuah tiang Negara. Jadi, ketika misalnya perempuan mengalami kekerasan, berarti kita tidak peduli dengan sebuah tiang yang mengokohkan, yang menopang bangsa ini. Jadi, jawabannya adalah soal memang [adanya] ketidakpedulian dan kemudian juga sebuah *image* bahwa kalau terjadi kekerasan terhadap perempuan itu adalah suatu aib; dan kemudian memang [ada upaya] menutup-nutupi bahwa tidak terjadi kekerasan terhadap perempuan, karena hukum perang internasional sebenarnya mensyaratkan bahwa perempuan dan anak-anak itu harus dilindungi, tidak seharusnya menjadi korban.

PENYIAR : OK Mbak, kita kembali ke penelepon. Sudah ada Pak Tarmizi di Sirgis. Selamat siang, Pak Tamizi.

TARMIZI : Ya, selamat siang juga ya. *Assalamu'alaikum wr.wb.*

- PENYIAR : *Wa'alaikum salam.* Silahkan, Pak.
- TARMIZI : Kita juga di sini ya, di sini kita tahu juga semua ya, bahwa selama ini terutama selama konflik, mungkin kekerasan yang diterima perempuan Aceh khususnya, mungkin semakin hari semakin meningkat; gitu ya. Seperti yang juga kita ketahui adalah bahwa sebenarnya hukum itu, di mata hukum, laki-laki dan perempuan itu sama saja, tidak ada perbedaannya. Tapi di sini kita punya pertanyaan dasar, ... kenapa permasalahan perempuan itu selalu ditutup-tutupui, padahal semua itu sama di mata hukum. Berarti, di sini, apakah lembaga yang selama ini berpihak kepada perempuan tidak bisa menjawab dengan bebas atau memang ... ada tekanan dari pihak lain? *Gitu aja. Assalamu'alaikum wr.wb.*
- PENYIAR : *Wa'alaikum salam.* Terima kasih Pak Tarmizi di Sigli, yang menggugat soal peran dari lembaga-lembaga yang kosong menyuarakan perempuan ini. Mbak Samsidar, ini tertutupi, *gimana nih* peran mereka untuk melindungi perempuan-perempuan yang menjadi korban konflik ini?
- SAMSIDAR : Ya, kita harus melihat bahwa masing-masing di Indonesia itu punya fungsi dan peran yang sudah diatur oleh Negara. Katakanlah dalam hal ini ada NGO-NGO perempuan yang sebenarnya yang mengangkat hal ini, ada NGO internasional, bahkan ada komisi nasional baik Komnas HAM maupun Komnas Perempuan yang dari sejak awal sebenarnya sudah mengangkat [isu kekerasan terhadap perempuan]. Hal yang sangat sulit [adalah] bahwa bagaimanapun, [orang] yang akan menjalankan ingin [tahu] kenapa kasusnya tidak diselesaikan, dalam artian diselesaikan dalam tanda kutip untuk keadilan. Komnas Perempuan pun sebagai sebuah komisi

nasional, dia hanya diberi wewenang untuk memantau dan memberikan analisis-analisis dan menyampaikan hasil rekomendasinya, sedangkan yang akan menyelesaikan hasil rekomendasinya itu adalah lembaga lain, yang dalam hal ini harusnya, katakanlah, pemerintah, dalam hal ini presiden sampai kemudian ke legislatifnya. Dalam hal ini, DPR dan juga yudikatifnya yang harus melakukan itu. Nah, di sinilah, bukan dalam artian itu, ada tekanan-tekanan; bukan soal tekanan tetapi memang ada sebuah sistem yang seperti itu, karena lembaga yang melakukan penyelidikan atau pemantauan itu bukanlah lembaga yudikatif yang menjalankan fungsi untuk pengadilan. Jadi, itu hanya sebatas melakukan pemantauan dan kemudian memberikan masukan-masukan dan rekomendasi.

PENYIAR : Ya, kembali ke penelepon, sudah ada Pak Bobi di Meulaboh. Selamat siang, Pak Bobi.

BOBI : Selamat siang.

PENYIAR : Silahkan, Pak Bobi.

BOBI : Ya, saya ingin memberikan masukan. Kebetulan teman-teman saya banyak yang pejuang-pejuang di sini. .... Itu kan masalah proses bagaimana masalah kekerasan perempuan ditutup-tutupi. Kenapa bisa muncul? Karena setahu saya – saya juga termasuk bagian dari konflik – jadi itu ... [ada] unsur *kayak sama suka* itu ya; jadi itu, kebanyakan saling membutuhkan. Itu karena kebutuhan, meskipun, banyak yang tidak ... Kenapa banyak yang tidak memunculkan itu? bagaimana Mbak?

PENYIAR : Itu saja, Pak Bobi?

Bobi : Ya, makasih. *Assalamu'alaikum*.

PENYIAR : Ya, *makasih*, selamat siang. Pendapat atau pertanyaan Pak Bobi kita akan jawab setelah jeda berikut ini. Mbak Samsidar tetap bersama kita.

[Jeda Iklan]

PENYIAR : Saudara, Anda masih bersama Kabar Aceh Interaktif. Siang ini kita membahas tema soal konflik perempuan dan keadilan, bekerja sama dengan Koalisi Pengungkap Kebenaran Aceh. Dan di ujung telepon sudah ada Mbak Samsidar, bekas pelapor khusus Aceh untuk Komnas Perempuan yang juga sebagai peneliti ICTJ; dan kita juga masih membuka ruang interaktif bagi Anda. Silahkan, Anda bisa menghubungi nomor telepon bebas pulsa di 08001403131 atau di 02185909947, sementara untuk SMS, Anda bisa menghubungi 08121188181. Mbak Samsidar, tadi ada pernyataan dari Pak Bobi yang mengatakan (suka sama suka – Samsidar menyela) ... Dia protes, katanya ditutup-tutupi, tetapi ada juga kasus-kasus di mana ini memang suka sama suka *gitu*.

Samsidar : Ini bukan soal protes atau tidak; satu lagi soal kenapa juga sulit untuk mengungkapkan kasus tersebut, katakanlah, melalui proses hukum. Yang pasti, kalau misalnya kita lihat yang saya katakan, angka itu cukup banyak, tetapi yang saya catat itu hanya ada dua yang sudah diadili lewat peradilan militer. Nah ...

PENYIAR : Baru dua ya?

SAMSIDAR : Baru dua dari sekian. Itu membuktikan, apa mungkin soal ini juga, apa sebenarnya ketika terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan, itu selalu diarahkan bahwa itu suka sama suka. Dalam hal ini, saya

mencatat, dalam artian kita harus melihat bahwa ada sebuah kondisi, misalnya ya, yang menempatkan perempuan menjadi korban; [ini] adalah soal kekuasaan. Di wilayah konflik, yang paling berkuasa itu adalah orang-orang yang memegang senjata; ketika orang-orang yang memegang senjata kemudian melakukan berbagai cara baik secara halus maupun kasar, itu adalah pemaksaan. Nah, kembali ke subjek, saya tidak setuju jika kita menegasikan terjadinya kekerasan yang lain itu karena ada suka sama suka. Nah, itu sebuah kondisi yang lain. Kalau katakanlah kita ingin punya niat baik untuk menyelesaikan ini, ya itu harus dibuka. Bisa *nggak* nanti akan ketahuan apakah itu suka sama suka atau ada sebuah realitas yang lebih besar dari hanya soal menegasikan yang lain dengan mengatakan suka sama suka. Kita harus melihat dalam hal ini ada sebuah kondisi tidak berkuatannya perempuan bahkan untuk menolak sekalipun. Nah, ini kan harus dilihat dari sisi yang lebih luas itu.

**PENYIAR** : Ada lagi penelepon, sudah ada Pak Huzaini di Loksmawe. Sayang, ini peneleponnya laki-laki semua ini Mbak Samsidar (Ya, jawab Samsidar). Selamat siang, Pak Huzaini. Halo-halo, terputus, Pak Huzaini, Anda bisa menghubungi kembali di 08001403131 atau di 02185909947. Sementara Anda juga bisa mengirimkan pesan pendek Anda di 08121188181. Mbak samsidar, kalau kita melihat belakangan ini bahwa pemerintah Indonesia atau GAM ini kan sudah menandatangani kesepakatan damai pada bulan Agustus 2005. Nah, posisi perempuan di sini bagaimana Mbak? Karena, kita tahu bahwa dalam konflik itu banyak juga korban perempuan yang berjuang, ya waktu itu menjadi anggota GAM. Seberapa [besar] kesepakatan damai ini dampaknya kemudian terhadap posisi perempuan, khususnya

bagi mereka yang dulu sempat ikut dalam perjuangan ini?

SAMSIDAR : Saya melihat soal pengakuan ya. Itu kan masing-masing ya, kalau perang itu pengakuannya adalah seberapa lama kamu setia mengangkat senjata. Banyak kenyataannya bahwa para perempuan yang eks-kombatan itu mereka turun karena ada fungsi-fungsi sosial yang harus mereka lakukan, misalnya ketika mereka harus hamil. Nah, mereka turun dan sebagainya atau mereka harus merawat anak-anaknya. Nah, ini kan dianggap bukan setia sampai akhir. Oleh karenanya, soal peran mereka di situ juga sedikit. Tapi apa pun, sebenarnya ada ruang yang diberikan untuk perempuan. Tetapi kalau saya melihat secara jernih, pengakuan itu sangat terbatas, karena saya juga berbicara dengan para eks-kombatan yang menyatakan bahwa mereka, dalam hal ini, bahkan tidak dihitung pada waktu itu. Mungkin karena ada alasan politik ya, dalam artian konsekuensinya ketika mereka tidak dihitung mereka tidak menerima apa yang menjadi hak mereka katakanlah dana reintegrasi. Sebagai contoh, misalnya, ada seorang kombatan yang berjuang kemudian ditangkap. Nah, untuk dia bisa keluar, untuk dia tidak dihukum lagi, hukumannya menjadi ringan, dia harus melakukan berbagai cara, termasuk memberikan uang kepada para penegak hukum; itu tidak bisa dipungkiri. Ya, dalam artian hukuman itu bisa dibayar; seperti itu. Tapi, dia tidak dimasukkan sebagai penerima dana reintegrasi, karena dia sudah tidak ada lagi di penjara sampai pada penandatanganan MoU ini. Nah, ini bagian-bagian kecil yang coba saya lontarkan. Saya melihat bahwa memang yang menghitung seorang itu adalah berdasarkan berapa lamanya kamu mengangkat senjata dan setia kepada kita, padahal dari awal sendiri pun, misalnya tugas-tugas dan peran

perempuan dalam hal ini eks-kombatan, itu kan juga agak dikhususkan. Misalnya, siapa *sib* yang menghidupi anak di kampung, siapa yang kemudian betugas untuk perawatan, untuk makanan, persediaan makanan, bahkan untuk kurir. Nah, ini kan sesuatu yang dilupakan menurut saya, dan hitungannya adalah apakah kamu mengangkat senjata atau tidak, *gitu*. Itu tidak [termasuk] peran-peran lain yang dari awal pun perempuan banyak diposisikan sebagai peran-peran perawat, pensuplai atau kurir, dsb. Apakah orang bisa aman, bisa nyaman berperang di dalam hutan kalau anak, ibu-bapaknya tidak ada yang *ngurus*; nah ini kan tidak dihitung.

**PENYIAR** : OK. Kita menuju ke Lhokseumawe. Ada Pak Husaini. Pak Husaini masih bersama kita; Pak Husaini? Terputus lagi ... Nah, Mbak Samsidar, kalau melihat soal kesepakatan damai Aceh, saya menyuplik sejumlah data bahwa kompensasi sudah dijanjikan untuk 3000 bekas pasukan GAM, kemudian 200 orang yang dibebaskan dari tahanan politik, dan 25.000 orang masyarakat sipil yang terkena dampak konflik sudah mendapatkan dana kompensasi. Tetapi tidak ada bantuan yang ditujukan secara khusus kepada para bekas pejuang perempuan, baik dari pemerintah Indonesia, maupun dari GAM, seperti tadi juga Anda telah singgung di situ. Nah, tentu saja ini juga bagi para perempuan yang menjadi korban konflik. Faktor yang paling menghambat terpenuhinya hak perempuan yang menjadi korban konflik ini apa *sib* sebenarnya Mbak?

**SAMSIDAR** : Ya, itu soal sejauh mana orang-orang yang selama ini membuat kebijakan itu punya sensitivitas terhadap hal-hal yang kita bicarakan tadi, misalnya ada *diyot*. *Diyot* yang diakui adalah orang-orang yang hilang dan orang-orang yang dibunuh, tidak ada perempuan-



perempuan yang diperkosa. Artinya, ketika itu tidak sampai pengkategorian itu, berarti kan ada sebagian orang yang jelas-jelas menjadi korban terpinggirkan atau diabaikan hak-haknya. Jadi, sebenarnya kembali kepada siapa yang menentukan kebijakan itu. Nah, jadi mungkin kita balik lagi, itu sebabnya juga. Tapi mungkin ada hal ke depan yang harus dilakukan; kita akui misalnya bahwa soal korban, soal perempuan, kita lihat misalnya siapa *sib* yang berunding, berapa orang perempuan, apakah di sana ia cukup diakui suaranya, khususnya korban? Korban kan tidak terlatih, tapi itu sudah selesai. Memang harusnya selesai perundingan, kita kembali membuka dialog, kalau kita mau menginginkan ada sebuah keadilan di masa transisi ini: adil untuk semua orang, baik untuk korban, untuk perempuan, maupun untuk eks-kombatan atau perempuan. Jadi, ruang dialog itu yang harus dibuka lagi, jadi tidak serta merta kemudian menentukan sebuah kebijakan di atas meja tanpa melibatkan mereka untuk mencari solusi-solusi seperti apa.

PENYIAR : OK. Pak Budi di Banda Aceh sudah bersama kita. Selamat siang, Pak Budi.

BUDI : Selamat siang, Mbak.

PENYIAR : Ya, silahkan Pak.

BUDI : Ini Mbak ya, saya ini sudah melihat juga perempuan ini, meskipun ... [menjadi korban kekerasan di bawah kaki laki-laki] tampak kompensasinya kurang adil. Saya melihatnya mungkin itu, Mbak.

PENYIAR : Itu saja ya? Baik, terimakasih. Dari Pak Budi di Banda Aceh. Mbak Samsidar, kalau kita melihat bahwa Aceh sudah damai seharusnya perempuan di sini bisa unjuk

gigi seperti yang dikatakan Pak Budi di Banda Aceh. Tetapi sampai sekarang belum terlihat atau belum tampak ini perempuan-perempuan untuk kemudian maju membangun, atau bagaimana, artinya mereka sudah ada kesempatan tapi kesempatan itu tidak dimanfaatkan secara maksimal *gitu*. Apakah memang kondisinya seperti ini di saat ini?

Samsidar : Saya rasa tidaklah seperti itu. Walaupun di atas kertas itu ada tertuang secara eksplisit, bukan serta merta kemudian perempuan bisa *lenggang kangkung* untuk bisa mengambil akses itu. Itu kan harus balik lagi ke soal budaya yang masih melekat, misalnya soal bahwa perempuan itu tidak bisa memimpin bahkan ketika dalam masa-masa kampanye – katakanlah berbagai macam kandidat kepala daerah dari Bupati, sampai ke walikota *gitu* – itu kan ada suara-suara miring yang menyatakan bahwa perempuan tidak layak menjadi pemimpin. Jadi, saya kurang setuju mengatakan bahwa perempuan tidak unjuk gigi; perempuan misalnya di dalam pembuatan UU untuk pemerintahan Aceh, perempuan itu punya kelompok khusus untuk mengawal, mengisi substansi-substansinya. Itu hal yang harus dilihat. Kemarin saja, misalnya, untuk rancangan Qanun untuk pemilihan kepala daerah langsung di Aceh itu, yang menggagas rancangan Qanun yang sekarang menjadi inisiatif DPR itu adalah kelompok perempuan. Jadi, saya mengatakan bahwa ruang dan kesempatan itu masih sedikit, perlu dieksplisitkan; walaupun dia sudah eksplisit bukan serta merta kemudian perempuan bisa *lenggang kangkung* untuk menikmati aksesnya itu. Ada banyak faktor sosial budaya yang mengingkari hak-hak tersebut. Kalau dikatakan tadi [bahwa perempuan kurang] unjuk gigi, yang pertama sekali berjumpa dengan pelapor khusus PBB untuk anti-kekerasan terhadap perempuan itu adalah perempuan yang

diperkosa dan setelah itu kan kemudian juga DOM itu dicabut. Jadi, saya rasa kalau mengatakan bahwa perempuan belum unjuk gigi, menurut saya *gini*: apakah perempuan itu harus berteriak-teriak mengemis untuk menjadikan sebuah bangsa ini, katakanlah Aceh, Aceh yang bermartabat, Aceh yang adil, mensyaratkan bahwa setiap siapa pun yang ada di sana menerima keadilan? Jadi, bukan hanya perempuan yang harus berjuang sendiri untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara, tapi juga laki-laki, dalam hal ini karena selama ini kita hidup, ya bermasyarakat *gitu*. Jadi, perjuangan perempuan itu harus juga didukung oleh laki-laki, karena ini bukan soal berjuang untuk menentukan jenis kelamin mana yang paling prioritas, tetapi keadilan apa yang akan kita ciptakan bagi semua orang. Saya rasa itu jawaban saya.

PENYIAR : Ya, Mbak Samsidar. Kita akan jeda kembali. Dan, nanti Kabar Aceh Interaktif akan kembali, masih kita akan membicarakan tema kita pada siang hari ini soal konflik perempuan dan keadilan. Anda masih punya waktu untuk berinteraksi atau berpendapat soal tema kita pada siang hari ini di telepon bebas pulsa di nomer 08001403131 atau di 02185909947, sementara untuk SMS di 08121188181.

[Jedah Iklan]

PENYIAR : Saudara, terima kasih. Anda masih bersama Kabar Aceh Interaktif. Dan siang ini, kita mengangkat tema soal konflik perempuan dan keadilan. di ujung telepon sudah ada Mbak Samsidar, bekas pelapor Khusus Aceh untuk Komnas Perempuan yang juga peneliti *International Center for Transitional Justice* atau ICTJ. Mbak Samsidar, (“Ya,” jawab Samsidar) tadi dikatakan ya bahwa baru dua orang yang kemudian

bisa diadili pengadilan, khususnya mereka yang melakukan kekerasan terhadap perempuan ini. Nah, ini bagaimana ke depannya, apa yang kemudian harus dilakukan? Khususnya, kalau kita mengandalkan pemerintah agak sulit ya waktu itu. Apakah memang ada upaya di tengah perempuan korban konflik sendiri, kemudian menggalang kekuatan untuk sama-sama menuntut hak mereka ini?

SAMSIDAR : Ya. Saya rasa upaya-upaya itu sudah dilakukan oleh teman-teman. Juga ada teman-teman yang tergabung di dalam solidaritas dan persaudaraan korban pelanggaran HAM Aceh, *gitu*. Tetapi, sebenarnya yang harus kita kritisi juga di sini [adalah] bahwa apakah keadilan itu juga harus melalui pengadilan, sebagai satu-satunya jalan untuk keadilan itu? Nah, itu yang harus kita lihat juga, karena menurut saya bahwa keadilan itu begitu kompleks. Pengadilan itu hanyalah menjadi salah satu agendanya. Masih banyak agenda yang lain, misalnya bagaimana hidup mereka selanjutnya, terus soal pengakuan bahwa memang mereka menjadi korban, ada soal pengungkapan-pengungkapan kebenaran tentang apa yang terjadi, dan kenapa perempuan dijadikan korban. Nah, itu kan juga harus dilakukan. Kembali lagi tadi soal pengadilan; pengadilan memang adalah mungkin salah satu cara untuk [memutus] rantai impunitas. Ya, dalam hal ini artinya, orang-orang yang melakukan kejahatan memang harus dihukum atau bertanggung jawab atas upaya tersebut. Tetapi memang, sebagai masyarakat sipil kita memang harus mendorong pemerintah untuk, dalam hal ini, bertanggung jawab; tapi juga untuk itu sebenarnya kita juga harus mendorong, bukan hanya pengadilan itu harus ada, tetapi juga harus ada terobosan-terobosan atau reformasi di pengadilan itu sendiri. Karena kalau kita lihat sistem hukum yang ada sekarang, misalnya

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 itu yang menyatakan pelanggaran HAM berat itu hanya dalam konteks hal yang tertentu saja. OK, bagaimana sebenarnya juga soal pelanggaran HAM [yang terjadi] sebelum ada UU tersebut? Sejauh mana misalnya pihak legislatif melihat pentingnya ada sebuah mekanisme untuk memutuskan rantai impunitas?

Jadi, sebenarnya banyak hal yang harus dilakukan. Saya setuju bahwa kita di masyarakat sebagai masyarakat sipil termasuk korban tidak bisa tinggal diam, tetapi yang harus kita sadari juga bahwa kewajiban ini adalah kewajiban Negara, jadi kita harus mendorong Negara untuk melaksanakan kewajibannya, plus peran pengadilan. Tidak bisa kita gantikan masyarakat sipil yang melakukan pengadilan, itu harus kita sadari benar, karena memang itu adalah tugas pemerintah dan aparat pemerintahlah yang ditugaskan untuk melakukan pengadilan-pengadilan tersebut. Tapi memang, saya setuju bahwa memang kita tidak bisa diam, kita harus terus berjuang untuk itu, tapi di satu sisi kita juga harus sadar bahwa ada sistem pengadilan yang seperti itu. Saya sangat setuju kalau ada penguatan-penguatan terhadap korban, karena proses pengadilan itu sendiri bukanlah suatu yang gampang, [ia] juga panjang, banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk itu, harus ada bukti-bukti verifikasi atau pelengkapan bukti-bukti yang perlu untuk mendukung itu; termasuk sebetulnya terobosan-terobosan hukumnya sendiri itu harus dilakukan. Tapi, saya katakan, apa iya ada orang memperlakukannya itu disaksikan oleh orang ramai? Itu kan tidak mungkin. Nah, jadi, harus ada kondisi yang diberlakukan untuk semua orang. Tapi yang terpenting bahwa apa pun kalau kita berbicara tentang keadilan bagi korban, itu adalah tanggung jawab utama dari pemerintah.

PENYIAR : OK. Kembali ke penelepon; sudah ada Ibu Eni di Jakarta. Ibu Eni, selamat siang. Silahkan, Ibu Eni.

ENI : Sebenarnya, saya hanya mau bertanya *aja* tadi, tapi sebelum bertanya [ternyata apa yang akan menjadi pertanyaan] saya sebagian sudah dijawab oleh Ibu Samsidar. Tapi saya *ulangin aja*. Saya komentar sedikit saja bahwa saya juga pernah diberikan buku tentang kasus pemerkosaan dan pelecehan wanita di Aceh, *tuh* banyak sekali, baik sebelum reformasi maupun setelah reformasi *gitu*. Yang saya ingin tanyakan pada Ibu Samsidar, ini [terkait dengan] peristiwa Tanjung Priok. Pada waktu peristiwa Tanjung Priok itu, waktu TNI menyerang mereka, perempuan-perempuan [yang kemudian dimasukkan] dalam penjara itu diperkosa. Di sana ada teman saya. Di sana banyak yang diperkosa. Ada buku KontraS yang saya juga miliki itu tentang kasus Tanjung Priok. Nah, kasus-kasus yang begini, [upaya] untuk menghilangkan kekerasan terhadap perempuan ini yang sebenarnya saya ingin tanyakan kepada Ibu Samsidar. Kira-kira kita yang dari masyarakat bawah ini bagaimana menghimpun *gitu*; langkah yang sekarang ini harus kita tempuh untuk melakukan reformasi di bidang TNI begitu susah – terus terang *aja*, jujur *aja*, saya juga banyak keluarga yang TNI yang juga melakukan hal yang demikian. Barang kali juga *insyaallah* mereka *nggak* melakukan hal yang demikian dan saya juga demikian, *nggak*. Dan saya kan karena kebetulan dekat *gitu* secara blak-blakan bertanya “Ikut *nggak?*” “*Enggak,*” *gitu*, ya *udab gitu*. Nah ini kan sangat menyakitkan kalau TNI masih dikatakan menyerang *gitu*, perempuan itu *dijadiin* objek. Jadi itu kan sangat memalukan *banget gitu* kalau TNI *tuh gitu*. Jadi bagaimana caranya menghilangkan ini dan mengangkat kasus-kasus yang sudah terjadi ini. Ini

terus terang menyakitkan bagi saya juga. Nah, itu *aja* dari saya, bagaimana ini harus selesaikan. Itu *aja*.

PENYIAR : Baik, terima kasih. Dari Ibu Eni di Jakarta. Menggebu-gebu sekali Ibu Eni ini. Silahkan Mbak Samsidar dijawab ini, bagaimana ini dari bawah untuk mendesakkan agar ini tidak kemudian menguap *gitu loh* karena kalau kemudian kita hanya mengandalkan atau menunggu respon dari pemerintah sangat sulit. *Gitu* kira-kira pertanyaan yang bisa kita tangkap dari Mbak Eni di Jakarta. Silahkan.

SAMSIDAR : Ya, kita memang sangat menyadari hal itu dari tadi. Untuk saya, [saya] memang menyatakan bahwa kita perlu bergandeng tanganlah dan juga untuk berbagi peran. Katakanlah ada teman-teman yang harus menguatkan korban, pengorganisasian di tingkat korban juga sebenarnya untuk meningkatkan kapasitas korban. Konsekuensi-konsekuensi yang harus dijalani oleh korban termasuk juga sebenarnya penguatan ekonomi dan kehidupan korban, karena tidak mudah untuk korban bisa hidup ya. Itu yang harus kita akui, bahwa sebenarnya mayoritas korban itu hidup di dalam kondisi yang sederhana sampai ke bawahlah; itu harus dilihat juga. Kita juga sebenarnya harus meyakinkan pihak pemerintah – saya sebenarnya masih punya optimisme bahwa orang-orang Indonesia ini bukanlah orang-orang yang biadab *gitu*, tapi orang-orang yang beradab, *gitu*. Kalau misalnya, dia (seseorang, *ed.*) berada di dalam institusi keamanan TNI, dalam hal ini misalnya ada di kepolisian, ada di kejaksaan, ada di Pengadilan, saya masih yakin sekali bahwa ada orang-orang yang masih memegang teguh nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai keadilan ini. Ya memang, yang lebih mudah dilakukan itu adalah reformasi institusi sektor keamanan dan judikatif; ini adalah mulai dari dalam.

Kalau kita sebagai masyarakat, [kita mulai] dari luar; kita memang hanya bisa menggalang kekuatan mendorong [supaya] itu terus dilakukan. Tapi, penting juga sebenarnya untuk kita punya semacam budaya di masyarakat [yaitu] budaya untuk terus melakukan pemantauan [tentang] apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah sudah meratifikasi berbagi instrumen HAM yang artinya itu bukan hanya dijadikan sebagai sebuah indikator ke PBB dan dunia internasional untuk menyatakan Indonesia sudah sangat peduli dengan penegakan dan perlindungan hak asasi manusia, tetapi sejauh mana ratifikasi-ratifikasi konvensi yang sudah dituangkan dalam UU itu, diharmonisasikan dengan UU yang ada dan kemudian ada implementasinya. Jadi, saya sebenarnya juga mengajak masyarakat, mari kita membangun sebuah budaya yang lebih intens, ya untuk terus melakukan pemantauan tentang kinerja pemerintah, khususnya kinerja dalam bidang perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

**PENYIAR** : OK. Mungkin ini karena waktu yang terus berjalan, Mbak Samsidar. Terakhir dari Anda. Kalau kita melihat Dewan Keamanan PBB, kan ia sudah mempunyai semacam resolusi, ya nomor 1325, yang secara spesifik membahas dampak perang terhadap perempuan dan apa yang bisa dilakukan perempuan dalam resolusi konflik dan perdamaian berkelanjutan. Untuk konteks Indonesia, untuk konteks NAD, apa yang menjadi prioritas untuk segera dilakukan terkait masalah untuk mengatasi para [korban] perempuan atau korban konflik yang perempuan ini? Silahkan.

**SAMSIDAR** : Yang *pertama*, yang sudah muncul di permukaan untuk Aceh adalah bahwa masyarakat sipil dan juga korban menginginkan ada sebuah mekanisme Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Nah, ini harus



ditindaklanjuti pemerintah dengan cepat. Tetapi juga tidak melupakan sebuah proses konsultasi yang lebih meluas, terutama dengan korban. Yang *kedua* adalah, bagaimanapun, soal misalnya pengadilan itu menjadi tuntutan pengadilan HAM; jadi tuntutan korban. Nah, ini kan susah juga sebenarnya dilaksanakan. Setahu saya, yang sudah disiapkan sejak lama itu kasus-kasus seperti Rumah Gedung, peristiwa simpang KKA, Mimicut, Dwikora, itu sudah dimintakan. Nah, data-datanya itu sudah ada, tinggal bagaimana itu diimplementasikan. Memang yang mengharap [agar] ini diimplementasikan adalah pemerintah pusat. Tetapi, balik kembali ke pemerintah daerah tadi soal KKR, dan sebenarnya mereformasi hukum juga [berarti] mengharmonisasikan hukum-hukum yang ada; jadi jangan sampai hukum yang baru justru mengingkari apa yang sudah bagus, untuk di tingkat nasional bahkan di tingkat internasional, dan termasuk mengkaji kembali dan membuat kebijakan yang lebih responsif dan berkeadilan terhadap korban perempuan.

PENYIAR : Baik terima kasih, Mbak Samsidar, sudah bersama kita dalam Kabar Aceh Interaktif siang hari ini.

SAMSIDAR : Terima kasih kembali.

PENYIAR : Ya, Saudara-Saudara, ini tadi jadi akhir kebersamaan kita dalam program Kabar Aceh Interaktif, tetapi masih ada sisa waktu sebentar, kita akan membacakan sejumlah SMS yang masuk. Dari pak Wiryono di Cibubur: “Kami setuju kekerasan terhadap perempuan selama konflik di NAD diusut secara tuntas baik yang dilakukan TNI maupun GAM.” Dari Ibu Nani: “Untuk saya, yang paling menyakitkan [dari tindakan] para pelaku itu adalah satu nusa satu bangsa

dan satu bahasa.” Ada yang tidak menyebutkan namanya: “Setahu saya, perempuan yang jadi korban seksual itu terkena ancaman, kalau tidak meladeni akan dibunuh, tetapi kalau coba buka mulut keluarga pun akan coba dihabisi.” Dari Rohana di Meulaboh: “Perempuan korban konflik di Aceh tentang pelecehan seksual ada dua kategori, ada yang memang kita katakan korban dipaksa, ada yang melakukan suka sama suka. Sekarang sudah damai, perempuan sekarang sudah berperan dan sudah mulai berkiprah terutama dalam pemerintahan.” Saudara, ini tadi menjadi SMS terakhir yang saya baca pada siang hari ini, dan Kabar Aceh Interaktif siang hari ini harus selesai. Saya, Sri Wijayanti, terima kasih, Anda sudah bersama kami. Salam.

## Islam, Ulama untuk Keadilan

(Wawancara dengan Teuku Faisal Ali, 30 Desember 2008)

PENYIAR : Salam, salam, salam dan salam Saudara. Selamat Siang! Kita berjumpa kembali dalam program Kabar Aceh Interaktif dari KBR 68 H edisi Minggu 30 Desember 2007. Selama satu jam ke depan saya, Budi Kurniawan akan menemani Anda dalam program Kabar Aceh Interaktif siang ini dan tema kita adalah *Islam Keadilan dan Peran Ulama di Aceh*. Tema ini adalah edisi khusus yang dilakukan dalam kerja sama dengan Koalisi Mengungkap Kebenaran Aceh. Nanti, narasumber kita adalah Teuku Faisal Ali yang merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Naggroe Aceh Darrussalam. Saudara, para pakar mengatakan dari dulu bahwa ulama Aceh memegang peran penting dalam sejarah Aceh hingga kini. Berbagai peran diambil oleh ulama. Di masa lalu, ulama bisa menjadi Pengawal Kedaulatan Kerajaan, Panglima Perang, Gubernur, atau menjadi ulama dalam arti yang biasa yaitu hanya mengajar atau memainkan peran dalam lembaga pendidikan agama. Semua itu menunjukkan bahwa ulama menjadi subkultur dalam tatanan masyarakat Aceh. Nah, dalam perjalanannya kemudian ada pihak yang menilai bahwa peran ulama mulai bergeser, misalnya dengan keterlibatan ulama dalam dunia politik. Ini berdampak bahwa ulama tersebut dinilai hanya menjadi milik golongan tertentu saja, bukan untuk melindungi seluruh masyarakat. Nah kemudian saat konflik, peran ulama sebagai bagian dari komunitas masyarakat, sebagai pelindung masyarakat atau penengah konflik, juga menipis karena ulama dinilai sebagai bagian dari komunitas masyarakat tertentu yang ikut terteror akibat konflik, terutama dengan meluasnya konflik TNI-GAM terutama pada masa

daerah operasi militer atau DOM. Kini setelah Aceh damai, peran ulama juga tetap menjadi kebutuhan penting masyarakat Aceh. Nah untuk membicarakan masalah ini, masalah peran ulama dan bagaimana keadilan bisa berjalan di Aceh. Kita nanti akan terhubung dengan Teuku Faisal Ali yang merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Kita sudah tersambung dengan Pak Teuku Faisal Ali. Selamat Siang Teuku; Oh, terputus. Nanti kita hubungi lagi. Dan nanti, Saudara juga bisa *ikutan* bergabung bersama kami di telepon bebas pulsa di 0800-140-3131 dan juga di 85909947. Kita membicarakan tentang peran ulama di Aceh yang kita tahu banyak sekali peran-peran mereka, di antaranya, misalnya ulama Aceh juga ikut membuat Qanun atau hukum di Aceh. Misalnya beberapa waktu yang lalu..., oh, kita sudah tersambung dengan Pak Teuku Faisal Ali yang merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Selamat siang. *Assalamu'alaikum* Teuku.

TEUKU

FAISAL ALI : *Waalaiikumsalam Wr. Wb.*

PENYIAR : Apa kabar Teuku? Teuku sehat?

FAISAL ALI : Ya. *Alhamdulillah* sehat-sehat.

PENYIAR : Ya Teuku, bisa digambarkan, seperti apa kedekatan Islam dan masyarakat Aceh dan di mana posisi ulama di Aceh, Teuku.

FAISAL ALI : Terima kasih. *Pertama*, kita telah memaklumi semuanya bahwa masyarakat Aceh adalah masyarakat yang kita katakan 90 persen lebih beragama Islam. Tentu, Islam itu kan dibawa oleh para ulama. Jadi, karena masyarakatnya begitu banyak yang Islam,

Islam yang dibawa oleh ulama-ulama, maka di sini ada keterikatan antara masyarakat dengan ulama itu; sesuatu yang kita katakan semacam ada pemerintahan tersendiri bagi masyarakat ulama itu. Ulama [adalah] tempat [yang] diikuti, ulama [adalah] tempat mereka merujuk atas permasalahan yang ditimbulkan di kalangan mereka. Itu, sepintas terlihat kedekatan antara ulama dengan pemerintah..., maaf, dengan masyarakat yang ada di Nanggroe Aceh Darussalam. Seperti itu.

PENYIAR : Nah, kemudian bagaimana kekompakan atau kesatuan mereka dalam menyikapi berbagai hal. Misalnya, dalam hal konflik, kemudian juga dari segi pemerintahan Aceh saat ini, bagaimana peran ulama?

FAISAL ALI : Peran ulama, tetap kita pada posisi menyampaikan kebenaran, menyampaikan bagaimana aspirasi masyarakat, bagaimana kemauan masyarakat baik di dalam hubungan kehidupan mereka, tentang ekonomi masyarakat, tentang sosial kemasyarakatan; itu yang kita sampaikan. Jadi, hal itu kita sampaikan kepada pemerintah daerah maupun kepada pemerintah yang lain. Karena, sebatas itu yang mampu disampaikan oleh ulama; seperti itu yang kita lakukan.

PENYIAR : Jadi ulama juga berperan dalam permasalahan sosial.

FAISAL ALI : Ya. Selama ini ulama tidak tinggal diam dalam setiap dekade munculnya permasalahan yang muncul di Aceh. Apakah pada masa Taufik dulu, apakah Pasca Tsunami, itu ulama yang tetap berperan dalam masyarakat dalam hal menjadi rujukan kesejahteraan mereka.

PENYIAR : Jadi tidak melulu mengurus soal *fiqh* ya, Teuku?

FAISAL ALI : Tidak, tidak, tidak! Memang tugas ulama yang lebih dominan, ya seperti itu, ya menyampaikan hukum-hukum agama, yaitu hukum-hukum *fiqh*-nya. Jadi ulama lebih berperan kepada pendidikan. Jadi itu hal yang utama. Di samping itu ada tugas-tugas yang berkaitan dengan masyarakat itu tetap menjadi bagian pekerjaan agama seperti yang kita lihat; seperti itu.

PENYIAR : Nah, di Aceh sendiri kan meskipun sebagian besar masyarakat Islam ada juga masyarakat lain dan golongan Islam yang lain yang berbeda-beda pandangan agamanya atau berbeda-beda pandangan ke-Islamannya. Nah, bagaimana kemudian ulama menyatukan mereka agar kemudian tercipta keadilan bagi berbagai ragam pemikiran di Aceh?

FAISAL ALI : Kalau di sisi perbedaan-perbedaan, di sini Aceh sudah sepakat semua. Baik kelompok apa misalnya, Muhammadiyah-kah di sini, Nahdhatul Ulama-kah di sini, kelompok Dayah-kah yang ada di Aceh; Semua itu sudah ada kesepakatan bahwa Islam kita di Aceh ini adalah *Abluss Sunnah Wal Jamaah*. Jadi selama dalam bingkai Islam *Abluss Sunnah Wal Jamaah*, kita lihat tidak ada permasalahan yang timbul di antara mereka. Tapi, kalau ada Islam yang di luar *Abluss Sunnah Wal Jamaah* sudah menjadi kesepakatan bersama bahwa ada penolakan secara bersama-sama. Karena, [ada] kedekatan ulama dengan pemerintah, dengan masyarakat yang ada di Nangroe Aceh Darussalam. Seperti itu.

PENYIAR : Nah kemudian soal konflik di Aceh, kita tahu kan dulu, kasus-kasus kekerasan sebelum perjanjian perdamaian Helsinki ditandatangani. Nah, bagaimana peranan ulama Aceh ini memandang kasus-kasus kekerasan di masa lalu.

FAISAL ALI : Kalau kita memandang, melihat kasus-kasus masa lalu, kan kita ada upaya mendorong memenuhi hak-hak korban. Karena manusia, yang katakanlah korban yang masuk ke dalam masa konflik Aceh, kan mereka mempunyai hak untuk hidup, mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan. Sesuatu yang kita harapkan, mesti kita selesaikan secara baik karena tanpa ada semacam mencari kebenaran untuk mencari rekonsiliasi kepada mereka kan sangat susah. Kebanyakan kita kan sekarang masuk kepada rekonsiliasi, yaitu bagaimana mendamaikan kedua pihak yang dirugikan dan yang merugikan, seperti itu. Kan, seperti itu; tidak menghilangkan *su'udzon* yang telah timbul begitu lama. Kalau ada suatu masalah, suatu kejadian yang ada di masyarakat tanpa ada pembenaran dulu siapa yang melakukan. Semua orang kan akan terus bertanya-tanya. Dugaan atau *su'udzon* itu akan berkembang di masyarakat. Masyarakat si A bilang si D, masyarakat si D bilang si C. Ini kan terus berkembang. Tetapi dengan adanya semacam, kita katakan, pencari kebenaran, siapa yang melakukan, tentu *su'udzon* yang banyak itu akan hilang. Maka di situ akan terjadi semacam *islah*-lah yang kita lakukan. Seperti itulah yang kita lakukan.

PENYIAR : Artinya ulama juga mendesakkan supaya kebenaran yang diusahakan benar-benar terjadi.

FAISAL ALI : Ya kebenaran itu kan bagian daripada Islam. Kebenaran itu kan bagian daripada agama kita. Maka, kita tetap menginginkan itu tetap ada kebenaran yang berujung pada keadilan bagi semua pihak. Seperti itu.

PENYIAR : Kemudian bagaimana mekanisme penyampaian kebenaran; pengungkapan kebenarannya bagaimana. Saran Anda bagaimana?

FAISAL ALI : Ya kalau kita lihat kebenaran yang kita inginkan di Aceh adalah kebenaran yang mengadopsi nilai-nilai lokal dalam mengungkapkan kebenaran itu. Jadi misalnya, kita bereferensi kepada lembaga-lembaga yang telah berbuat dalam hal rekonsiliasi di daerah-daerah yang lain. Itu sebagai Badan Ringan. Jadi, kalau kita mengharapkan nilai-nilai budaya lokal yang Islami, itu bersendikan dua hal yaitu Adat dan Islam untuk Aceh. Seperti itu.

PENYIAR : Nah tadi sempat Anda sebut, tentang upaya mengungkap kebenaran itu sendiri, apakah perlu ada semacam penyampaian testimoni dari para korban? Kemudian [apakah perlu] komisi khusus bagi korban-korban yang pernah mengalami siksaan dan kekerasan pada masa lalu itu, [supaya] kemudian terungkap?

FAISAL ALI : Kalau hal itu, Aceh sudah terjamin dalam UUPA [Undang-Undang Pemerintahan Aceh] yaitu ada satu pasal yang menyatakan akan di bentuknya KKR, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Itu adalah upaya kita [untuk] menemukan keadilan dengan pengungkapan kebenaran terhadap kasus-kasus yang terjadi di Aceh.

PENYIAR : Artinya ulama juga mendukung pembentukan KKR?

FAISAL ALI : Ya ulama mendukung pembentukan KKR. Karena kita melihat bahwa pada dasarnya semua pihak kan mendukung, bukan hanya ulama. Karena itu kan wujud dari bagaimana perdamaian yang ada di Aceh ini bisa langgeng. Perdamaian itu bisa untuk selama-lamanya. Apa pun upaya yang dilakukan untuk melakukan perdamaian untuk selama-lamanya, saya pikir semuanya mendukung. Bukan hanya ulama saja.



PENYIAR : Nah kalau begitu, jika Islam dan ulama mendukung upaya pemenuhan keadilan bagi Aceh, menurut Anda, bagaimana cara dan bentuk yang terbaik yang dilakukan oleh masyarakat dan ulamanya di Aceh sendiri?  
[Ada permintaan mengulang pertanyaan oleh Faisal Ali, dan pewawancara mengulangnya]

FAISAL ALI : Keadilan yang paling bermanfaat bagi rakyat Aceh adalah kesejahteraan. Jadi kesejahteraan paling penting. Urutan tingkat kesejahteraan Aceh sangat luar biasa. Kita lihat data bahwa Aceh ada di urutan ke-4 [perihal] kemiskinan dari provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Maka, kita mengharapkan baik dari pihak korban maupun kepada masyarakat Aceh yang lainnya bagaimana mereka keluar dari keterpurukan ini. Ke depan bagaimana mereka bisa sejahtera. Dalam kehidupannya, anak-anaknya bisa diberikan pendidikan, kesehatannya bisa terjamin. Itu yang kita harapkan [dari] pemerintah untuk dipenuhi baik [bagi] pihak korban maupun pihak masyarakat yang lain. Karena ketika kita melihat korban dan masyarakat Aceh, semua masyarakat Aceh itu korban; korban daripada suatu kejadian yang terjadi di Aceh. Bukan korban secara langsung, tetapi korban di sisi ekonominya dan korban di sisi pendidikannya. Seperti di Aceh, kalau di daerah-daerah ada yang tidak mendapatkan pendidikan, tidak mendapatkan pelayanan kesehatan, itu diakibatkan satu daerah yang di dalamnya konflik, jadi adalah kesejahteraan yang diinginkan bagi masyarakat Aceh.

PENYIAR : Kemudian saat ini Anda melihat kondisi real Aceh sendiri tentang keadilan dan di daerah-daerah pelosok Aceh.

FAISAL ALI : Kita melihat kenyataan dari lembaga yang melakukan penelitian di Aceh melihat bahwa masyarakat Aceh masih sangat tertinggal, baik di sisi ekonominya, dan pendidikannya yang ada sekarang ini. Lebih-lebih di daerah yang penghasil gas terbesar di se-Aceh Utara. Nah, itu masyarakat di sekitar penghasil gas itu sungguh sangat menyedihkan kondisi mereka.

PENYIAR : Artinya masih dalam kondisi yang ... [dipotong oleh Teuku Faisal Ali]

FAISAL ALI : Ya masih dalam kondisi yang memperihatinkan. Belum lagi bencana Aceh, tsunami, yang lebih banyak menimpa daerah pesisir selatan. Lebih lagi kita melihat Meulaboh, lihat ke Aceh yang begitu parah korban tsunami; infrastruktur yang ada sekarang bagaikan daerah itu belum merdeka. Listriknya belum ada, teleponnya belum ada, jalannya belum ada, transportasinya belum ada.

PENYIAR : Pantauan Anda atau pengamatan Anda terhadap kinerja Pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini?

FAISAL ALI : Kalau Pemerintahan Aceh yang ada sekarang ini, karena bagi mereka ini adalah tahun pertama mereka, tentu mereka dipilih dari kelompok masyarakat yang independen. Tentu untuk tahun ini, kita mengatakan mereka belum optimal dalam berbagai upaya ntuk melakukan pengentasan kemiskinan. Tapi tidak bisa kita salahkan mereka dalam hal membangun Aceh dalam satu tahun ini, karena banyak sekali problem masa lalu yang masih menyelimuti Pemerintahan Aceh. Seperti itu.

PENYIAR : Baik Teuku, kita akan jeda dulu sejenak untuk beberapa iklan nanti kita sambung lagi. Dan Saudara,

Anda juga kami undang untuk ikut bergabung bersama kami. Kita masih bicara tentang peran ulama Aceh, peran agama Islam di Aceh dan juga peran ulama tentunya dalam menciptakan keadilan bagi rakyat Aceh. Anda bisa menghubungi kami di telepon bebas pulsa di 0800-140-3131 dan juga di 85909947. Dan Saudara, sebelum kita jeda iklan, saya ingin menyapa juga pendengar-pendengar yang mendengarkan siaran ini dari beberapa radio di Aceh. Di antaranya adalah radio Delta FM, di Meulaboh, kemudian Fatali FM di Blang Pidi, kemudian Sit FM di Tapak Tuan, Citra Pesona FM di Subulus Salam, Amanda Raisisonia FM di Takengon, kemudian BB 99 FM di Kuta Cane dan ada Radio Gipsi FM di Langsa. Masih ada sejumlah radio lain yang nanti akan kita bacakan. Dan kita jeda untuk iklan berikut.

[Setelah jeda iklan, pewawancara kembali menghubungi Teuku Faisal Ali. Telepon sempat terputus, tetapi akhirnya berhasil. Wawancara pun dilanjutkan.]

**PENYIAR** : Ya Teuku kita lanjutkan perbincangan kita tentang peran ulama ini. Kita tahu sendiri, di Aceh sendiri kan banyak partai-partai politik yang bermunculan. Nah, sejauh mana keterlibatan ulama dengan partai politik di Aceh saat ini dan bagaimana keberpihakan ulama terhadap rakyat kebanyakan?

**FAISAL ALI** : Sebenarnya, ulama, secara kelembagaan ulama, misalnya di Aceh, ada Lembaga Himpunan Ulama Dayah Aceh, ada Hisaffudin, berbeda lembaga ulama. Itu secara kelembagaan kita ulama Aceh tidak terlibat aktif dalam politik baik lokal maupun nasional. Tetapi, pihak ulama sendiri banyak yang terlibat dalam berbagai partai, baik nasional maupun lokal. Nah ini kan bentuk bagaimana keinginan untuk mewarnai

demokrasi itu dengan nilai-nilai agama. Seperti yang diinginkan oleh ulama-ulama kita. Kan ulama itu tidak semuanya di pendidikan atau di lembaga pendidikan. Ada ulama yang tidak terjun [ke bidang] pendidikan tetapi ke bidang politik. Itu tidak menafikan ulama bahwa ada tuntutan sebagian masyarakat kita untuk terjun ke hal politik untuk terwujudnya masyarakat sejahtera yang diinginkan.

**PENYIAR** : Ya. Tapi banyak juga kalangan yang berpendapat dengan keterlibatan ulama di salah satu partai politik, misalnya, dikhawatirkan bisa mengkooptasi peran ulama oleh kepentingan tertentu, sehingga tugas ulama sebagai pelindung masyarakat kemudian menjadi pelindungan masyarakat tertentu saja. Nah, itu bagaimana Teuku?

**FAISAL ALI** : Bisa saja analisis seperti itu. Tetapi, harus kita pahami bahwa seperti yang saya katakan tadi bahwa tidak semua ulama terlibat ke dalam lembaga pendidikan. Tidak seperti itu, tetapi ada sebagian ulama yang naluri politiknya lebih kuat. Seperti itu. Silahkan ia berpolitik dan hal itu tidak akan membuat kegiatan ulama selaku pelindung masyarakat ternafikan. Tidak begitu. Karena banyak sekali ulama-ulama yang bermacam peran itu yang ada di masyarakat. Jadi bukan semua ulama akan terjun ke politik. Tidak, tetapi ada ulama yang naluri politiknya lebih tinggi mereka didorong untuk ikut terjun ke dunia politik. Begitu.

**PENYIAR** : Nah kalau saran Teuku sendiri? Kalau ada ulama yang terjun ke dunia politik tertentu, yang menurut Teuku sah-sah saja ya, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat agar kepemilikan seseorang atau masyarakat terhadap ulama itu terjaga? Artinya, agar ulama itu tidak hanya menyuarkan kepentingan

kelompok-kelompok tertentu saja misalnya. Apa yang bisa di dorong oleh masyarakat, Teuku?

FAISAL ALI : Sekarang ini kita perlu memahami, untuk menciptakan keadilan bagi masyarakat itu kan harus melalui sistem. Kita tidak boleh lagi melakukan, apa itu, menyuarakan di luar sistem. Itu tidak akan ada lagi manfaatnya. Yang penting sekarang, ulama yang masuk ke dalam sistem itu ikut memperbaiki sistem, bisa berkomitmen demi kesejahteraan masyarakat. Itu yang penting. Siapa pun boleh. Jadi tidak ada permasalahan ulama untuk keterlibatan di dunia politik. Kan tidak mungkin kita ingin mengalokasikan anggaran untuk kesejahteraan masyarakat tanpa ada orang-orang yang berpihak pada masyarakat di DPR.

PENYIAR : Jadi, biar perannya lebih terarah.

FAISAL ALI : Ya betul, biar perannya lebih terarah. Karena selama ini, mulai dari masa kemerdekaan, saya yang merasakan hal tersebut sampai yang kita rasakan sekarang ini. Apa yang kita sampaikan di luar sistem ini tidak akan terakomodir, kita terus menyuarakan untuk masyarakat, bagaimana ini, anggaran dialokasikan untuk hal ini, untuk hal itu, dsb. Itu tidak akan tercapai, karena di dalam sistem itu, tidak akan ada orang-orang yang menyahuti apa yang kita sampaikan walaupun *nota bene* anggota DPR itu adalah wakil daripada kita. Tapi itu berbeda. Seperti itu.

PENYIAR : Bagaimana kemudian sejarah peran ulama di Aceh sendiri? Bisa Teuku jelaskan?

FAISAL ALI : Ya, mulai dari masa mengusir penjajah di Aceh, ulama bisa dikatakan sebagai panglima perangnya. Jadi, dengan adanya istilah di Aceh dulu, Hikayat Perang Sadi. Hikayat Perang Sadi itu adalah cerita-cerita yang

membangkitkan jiwa kepahlawanan masyarakat Aceh untuk menentang penjajahan. Itu pada masa kemerdekaan dulu. Jadi itu sudah luar biasa, tapi dalam masa menuju kemerdekaan banyak ulama yang masuk. Kita dapat lihat peran Teuku Abu Daud Beureuh, Buya Muda Wali, Teuku Hasan Kurung Kali. Itu banyak sekali, di dalam proses-proses kemerdekaan ulama Aceh. Nanti dalam pasca-kemerdekaan, Abu Daud Beureuh pernah menjadi Gubernur Aceh, Professor Teuku Hasimi pernah menjadi, itu kan bagian dari bentuk keterpanggilan ulama untuk menciptakan kesejahteraan rakyat Aceh. Juga dalam hal masa konflik, ulama terus menyuarakan, berbagai upaya kita lakukan, bagaimana kedua belah pihak ini, antara RI dan GAM; mereka bisa duduk bersama-sama mencari solusi perdamaian, mencari solusi terhadap masalah Aceh. *Alhamdulillah*, itu pun sudah terlewati. Kita sangat bergembira dan bersyukur kepada Allah terhadap hal itu. Ketika terjadinya tsunami, ulama berperan menyampaikan beberapa program, beberapa hal, kepada badan bakor BRN untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Ulama Aceh berperan dalam penyusunan UU Pemerintahan Aceh. Jadi, *alhamdulillah*, peran ulama yang telah mengerti dan memahami bagaimana kaitannya dalam hal menyingkapi perkembangan Nanggroe Aceh Darussalam. Kita tidak mengatakan banyak, tetapi keterlibatan ulama ada di mana-mana dalam hal konteks ingin mencari kesejahteraan di masyarakat Aceh.

PENYIAR : Panjang jadinya kisah ini ya.

FAISAL ALI : Ya. [tertawa]

PENYIAR : Kemudian kalau di dalam memberikan keadilan bagi Aceh sendiri, bagaimana peran ulama untuk membuat masyarakat Aceh ini adil? Teuku masuk dalam sistem atau membuat program-program tertentu dengan pemerintah misalnya?

FAISAL ALI : Ya, ini ada dua kelompok, ada ulama MPU. MPU itu adalah ulama mitranya Pemerintahan Aceh, yaitu eksekutif, legislatif, MPU itu mitra sejajar. Tugas dari pada MPU ini sendiri adalah menyampaikan fatwa-fatwanya baik diminta atau tidak diminta oleh eksekutif dan legislatif dalam hal mereka membuat program-program untuk agenda-agenda bagi masyarakat. Ada semacam lagi yaitu ulama di luar MPU, sedangkan MPU ini adalah badan resmi dari pada Pemerintahan Aceh. Ada yang lain yaitu ulama yang tidak termasuk ke dalam MPU. Ada Himpunan Ulama Dayah atau HUDA, ada Hisaffudin. Mereka ini ada di mana-mana dan bergerak dalam bidang pendidikan. Berapa banyak masyarakat Aceh yang menitipkan pendidikan anak-anaknya di pesantren-pesantren yang ada di Aceh. Kalau kita lihat dengan volume anggaran yang ada, untuk pesantren, itu adalah pendidikan yang sangat kecil biayanya. Banyak ulama Aceh yang terjun ke dunia pendidikan yang menyediakan pendidikan-pendidikan kepada anak-anak fakir miskin di Nanggroe Aceh Darussalam.

PENYIAR : Teuku, mungkin pendengar juga ingin tahu, ada berapa banyakkah ulama di Aceh ini yang terorganisir, yang MPU tadi maupun yang tidak?

FAISAL ALI : MPU itu adalah Majelis Permusyawaratan Ulama yang ada di tingkatan provinsi dan ada di tingkat kabupaten. Di tingkat provinsi ada 42 orang ulama, sedangkan untuk tingkatan kabupaten disesuaikan dengan jumlah dan kondisi di daerah masing-masing.

Ada lagi tingkatan ulama yang tidak termasuk MPU yaitu Himpunan Ulama Dayah Aceh; itu adalah ikatan ulama-ulama yang memimpin pesantren-pesantren yang ada di seluruh Nanggroe Aceh Darussalam. HUDA itu mempunyai anggota sekitar 600, tetapi tidak semuanya pesantren, ada balai-balai pengajian, ada pesantren. Ada Hisaffudin yang bergerak juga di bidang-bidang pendidikan, selain itu ada upaya untuk menciptakan kemandirian pesantren. Bagaimana pesantren itu bisa mandiri, itu ada upaya-upaya dari kelompok-kelompok di luar pemerintahan.

PENYIAR : Dan mereka ada sampai ke tingkat desa?

FAISAL ALI : Ada sebagian sampai ke desa-desa, namun ada sebagian yang tidak sampai ke desa, tergantung daerah, karena ulama ini kan tergantung pada masyarakatnya. Karena, ulama ini kan jadinya itu karena lepasan [lulusan, *ed.*] dari pesantren [kemudian] pulang ke kampungnya, dan duduk di situ. Tapi kan ada desa-desa atau pun daerah-daerah yang tidak ada orang yang pergi ke pesantren.

PENYIAR : Baik Teuku. Semakin menarik perbincangan kita tentang ulama, agama Islam dan peran ulama di Aceh. Kita jeda dulu untuk beberapa saat sambil kita terus umumkan kepada pendengar. Saudara pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di telepon bebas pulsa di 0800-140-3131 dan juga di 85909947, dan juga Anda bisa mengirimkan sms pendapat Anda, nanti kita bacakan, ke 08121188181. Silahkan Anda yang mau bergabung. Kami tunggu sekarang. Nanti Anda bisa menyampaikan pertanyaan dan pendapat ke Teuku Faisal Ali yang anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darrussalam.



[Ada jeda iklan]

PENYIAR : Kita masih di Kabar Interaktif Program Aceh dari KBR 68 H yang siang ini membicarakan peran ulama, peran agama Islam, dalam membangun keadilan, kehidupan yang adil bagi masyarakat Aceh. Anda bisa bergabung bersama kami di telepon bebas pulsa di 0800-140-3131 dan juga di 85909947. Dan juga Anda bisa mengirimkan sms pendapat Anda ke 08121188181. Nanti Anda bisa menyampaikan pertanyaan dan pendapat ke Teuku Faisal Ali yang anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darrussalam. Di ujung telepon masih ada Teuku Faisal Ali anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Nanggroe Aceh Darrussalam. Nah, kita terima telepon dulu dari Pak Mustofa di Klender Jakarta Timur. Oh, terputus. Baik silahkan yang lain. Anda masih bisa menghubungi kami, bertanya mungkin atau menyampaikan pendapat tentang peran ulama di Aceh, kaitannya dalam upaya membangun keadilan bagi Aceh. Kita dengar tadi dari pemaparan Bapak Faisal Ali bahwa peran ulama Aceh tidak melulu persoalan *fiqh* dan hal-hal semacam aturan seperti itu. Tetapi, juga lebih dari itu, bagaimana ulama Aceh berperan dalam hal sosial misalnya, peningkatan taraf hidup, dan juga mendorong kebenaran-kebenaran dari peristiwa-peristiwa masa lalu, kekerasan yang pernah dialami oleh rakyat Aceh dapat diungkap. Tadi Pak Teuku Faisal Ali juga mendukung terbentuknya komisi kebenaran dan rekonsiliasi. Jadi dia mendorong kebenaran dulu diungkap kemudian ada rekonsiliasi. Silahkan Anda bisa bergabung bersama kami di telepon bebas pulsa di 0800-140-3131 dan juga di 85909947. Dan juga Anda bisa mengirimkan sms pendapat Anda ke 08121188181. Kita juga masih tersambung dengan Pak Teuku Faisal Ali yang anggota Majelis

Permusyawaratan Ulama Nangroe Aceh Darrussalam. Di jung telepon masih ada Teuku Faisal Ali anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Nangroe Aceh Darrussalam. Baik, terputus. Kita bacakan saja berapa sms yang masuk ini. Ada David di Aceh Jaya. “Menurut Teuku apakah tindak lanjut ulama sekarang dengan kondisi Aceh sejak diberlakukan Syariat Islam yang masih banyak pelanggaran Qanun yang tidak ditindak tegas? Apakah upaya para ulama, sedangkan Syariat Islam sudah beberapa tahun berjalan?” Kemudian ada telepon dari Pak Raisi di Langsa Aceh. Selamat siang Pak Raisi.

RAISI : Selamat Siang.

PENYIAR : Silahkan.

RAISI : *Assalamu’alaikum*, Pak Teuku.

PENYIAR : *Wa’alaikum salam*. Mungkin di ujung telepon, mungkin tidak mendengar. Silahkan.

RAISI : Halo. Saya mau tanya ini, untuk masyarakat Aceh kan, apa peranan ulama dalam menindak atau mengatasi yang sepertinya di Aceh korupsi itu bertambah besar? Demikian yang saya tanyakan kepada Teuku, terima kasih. *Wasalamu’alaikum Wr. Wb.*

PENYIAR : Ya. *Wa’alaikum salam Wr. Wb.* Ya, silahkan yang lain, Anda bisa menghubungi kami di telepon bebas pulsa di 0800-140-3131. Dan ada lagi sms yang lain. Ini tidak menyebutkan nama. “Sekarang ini di Aceh banyak bantuan tetapi kenapa di Aceh masih banyak masalah dan masih banyak masyarakat yang tinggal di barak-barak pengungsian. Jadi kerja Pemda Aceh

apa *dong*? Apa cuma nonton aja?” Terima kasih, katanya dari 0852778717xxxx. Kemudian, “Di Aceh trias politika, legislatif, yudikatif, dan eksekutif semestinya tidak dapat berlaku lagi; kalau menurut hadist nabi, ilmuan dan ulama atau cendekiawan, keadilan akan marak, kekayaan pengusaha dan doa dukungan rakyat.” Tidak menyebutkan nama, tapi dari 081360250xxx. Dan di ujung telepon juga masih ada Teuku Faisal Ali yang merupakan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh. Pak Teuku masih bersama kami? Tadi banyak sms yang kita bacakan dulu, kemudian tadi ada penelpon juga Pak Resi, dia bilang, “Saya menanyakan peran ulama dalam menangani kasus korupsi yang kayaknya semakin tinggi di Aceh ini.”

FAISAL ALI : Ya, itu, sebenarnya masyarakat telah bisa memahami bahwa fungsi ulama kan menyampaikan. Kalau hal urusan kaitannya dengan korupsi, dari dulu kita sudah menyarankan bagaimana pihak aparat keamanan, aparat penegak hukum itu untuk menindak semua pihak yang melakukan korupsi. Itu sebelum ada reformasi di badan hukum, di hukumnya sendiri, badan penegak hukum, kita telah menyuarakan bagaimana semua. Karena, kita melihat bagaimana angka kemiskinan di masyarakat itu adanya, salah satunya disebabkan korupsi yang dilakukan berbagai orang yang memanfaatkan kelemahan-kelemahan sistem itu, untuk memperkayakan diri. Nah, jadi ini telah kita lakukan baik melalui rekomendasi atau melalui pertemuan-pertemuan; ya, sebatas kemampuan para ulama yang telah menyampaikan itu kepada aparat penegak hukum.

PENYIAR : Ya, ada juga dari Pak Nafiq, di Aceh Jaya, yang mengirimkan sms ini, “Teuku, apa tindak lanjut para ulama sekarang dengan kondisi Aceh, sejak

diberlakukan Syariat Islam, yang masih banyak pelanggaran Qanun, dan tidak ditindak tegas? Apakah upaya para ulama, sedangkan syariat Islam sudah ... Bagaimana peran ulama?"

FAISAL ALI : Peran ulama dalam hal penerapan syariat Islam itu, kita telah berupaya pada awalnya bagaimana menyampaikan Qanun tentang penerapan syariat Islam ke eksekutif, atau legislatif, dengan melibatkan banyak pihak; bagaimana penerapan syariat Islam itu terus lebih bagus, dari hari ke hari. Kami melihat, karena ada persoalan di pemerintahan Aceh, mulai dari pada penandatanganan Helsinsky, MoU dan sebagainya, kan setelah itu ada satu kewajiban bahwa Pemerintahan Aceh harus ada satu undang-undang pemerintahan tersendiri. Bahkan, dengan disahkan UU pemerintahan sendiri, semua yang sudah ada, Qanun-Qanun itu perlu direvisi kembali. Dan ini sudah dibahas kembali di DPR A di NAD. Maka, kaitan dengan ulama, khususnya kaitannya dengan syariat Islam, selain mendorong semua pihak untuk mengoptimalkan pelaksanaan syariat Islam itu secara *kaffah*, juga terlibat di dalam penyusunan Qanun untuk mendukung pemberlakuan syariat Islam itu.

PENYIAR : Tadi Teuku bilang ada yang perlu direvisi misalnya, apa itu misalnya yang direvisi?

FAISAL ALI : Ya, ada beberapa yang perlu direvisi, misalnya dulu dalam Qanun yang dulu sebelum direvisi ada *khalwat*, misalnya. *Khalwat* itu yang tidak jelas definisinya yang bagaimana, kewenangan *wilayah al-itsbat* itu bagaimana? Itu semua sudah direvisi kembali yang sekarang menunggu pengesahan dari DPR A Aceh.

PENYIAR : Seperti apa kira-kira yang baru ini, misalnya?

FAISAL ALI : Kan dulu kalau dalam *kebahwat* itu, yang dimaksudkan dengan *kebahwat* adalah “telah berdua-duaan di antara perempuan dengan laki-laki” itu tidak ada kita sekat, dan bisa dipahami bias oleh semua orang. Tapi sekarang sudah disekat, misalkan kalau di kantor itu ada pengecualian, jadi ada beberapa ini, sehingga terjadi bias lagi terhadap pemahaman *kebahwat* itu sendiri.

PENYIAR : Jadi ada perbaikan ya?

FAISAL ALI : Ya, ada perbaikan.

PENYIAR : Juga ada pertanyaan dari Johan dari Jakarta Selatan, “Seperti apakah orang yang dapat dikategorikan sebagai ulama di Aceh?” Itu dulu mungkin, silahkan.

FAISAL ALI : Ya, kalau di Aceh ini ya, yang memberikan label, yang memberikan titel ulama, [adalah] masyarakat. Pihak kita, pihak ulama sendiri, tidak tahu bagaimana mekanismenya, masyarakat memberikan titel, mereka menyebutkan orang-orang itu ulama. Jadi, kebanyakan yang disebut ulama ini orang yang produk dari pesantren salafi, seperti itu. Orang yang sudah pernah belajar di pesantren salafi, pesantren tradisional, barang sudah 10 tahun, 15 tahun, mereka pulang ke desanya membimbing masyarakat, itu tadi dikatakan dengan ulama. Khususnya di Aceh.

PENYIAR : Ya, dari Zulhelmi di Bireuen, ada usul misalnya, “Gimana kalau ulama-ulama itu dikedepankan dalam segala bidang, termasuk di pemerintahan?” Itu aja katanya.

FAISAL ALI : Pertama, kita mengucapkan terima kasih. Tapi, itu tidak mungkin dilakukan oleh ulama, tapi ada peran-peran yang mesti dilakukan oleh ulama, sudah jelas

itu ulama sebagai *warastatul anbiya'* tetap akan kita lakukan. Jadi, harapan yang begitu besar untuk kita berperan, ini [maksudnya, usulan pendengar tadi, *ed.*] saya rasa tidak memungkinkan untuk kita lakukan. Karena, misalnya, dalam hal pemberdayaan ekonomi masyarakat, itu tidak mungkin kita memberdayakan masyarakat. Paling-paling itu bagaimana membimbing masyarakat amanat terhadap pinjaman yang diberikan oleh orang-orang lain; seperti itu. Jadi kita hanya sebatas *taushiyah* aja. Jadi modal *qoul*, modal perkataan. Tidak ada modal yang lainnya, bisa kita optimalkan untuk masyarakat.

PENYIAR : Ini ada juga dari Pak Agus dari Jakarta Barat. Dia bertanya, “Dengan adanya syariat Islam [yang] diberlakukan di Aceh, yang kami tanyakan [adalah] bagaimana kedudukan Pancasila di Aceh? Kedudukan Pancasila?”

FAISAL ALI : Tidak ada pertentangan antara Pancasila dengan penerapan syariat Islam di Aceh, karena pemberlakuan syariat Islam di NAD mendapat legitimasi hukum dari pemerintah RI, ada undang-undangnya, ada UU No. 11, ada UU No 18, itu semuanya sudah dikaji dan semuanya tidak ada pertentangan [dengan] Pancasila itu sendiri.

PENYIAR : Nah, Anda juga kan anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh ya, dan juga pimpinan pondok pesantren *Mahya al-Ulum* Aceh Besar ya. Nah, kalau agenda dari Majelis Permusyawaratan Ulama sendiri ke depannya apa ini?

FAISAL ALI : Majelis Permusyawaratan Ulama itu, sebetulnya itu [saya] tidak bisa mengomentari, karena yang berhak mengomentari terhadap majelis ini adalah MPU sendiri, Pak Prof. Dr. Teuku Muslih Ibrahim. Tapi

agenda dari pada ulama MPU itu adalah mensikapi dan menfatwakan beberapa permasalahan yang dibutuhkan oleh pemerintah, baik diminta atau tidak diminta, dalam mewujudkan pemerintahan dan menciptakan masyarakat yang seperti kita katakan tadi. Ada agenda-agendanya, berapa kali dalam setahun sidang, itu ada agenda tersendiri.

PENYIAR : Dan penekanannya juga lebih kepada mendorong ya?

FAISAL ALI : Itulah fungsi kita ulama ini ya, tidak ada fungsi pemeriksaan, tidak ada fungsi pembatalan. Tidak ada, juga fungsi di MPU.

PENYIAR : Nah ini penegasan lagi aja, bagaimana kemudian ulama menyikapi beberapa kasus kekerasan yang pernah terjadi di masa lalu, sebelum perdamaian ditandatangani di Helsinki. Apa desakan-desakan ulama agar kebenaran ini bisa diungkap?

FAISAL ALI : Itu kita sudah rekomendasikan kepada Pemerintah Aceh. Rekomendasi kita itu bukan suatu yang baru, tetapi sangat beralasan, dan kita akan meningkatkan Pemerintahan Aceh. Dan ada salah satu butir daripada MoU Helsinki itu yang belum diimplementasikan oleh pemerintah sekarang ini, yaitu salah satunya pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Kita sudah mengingatkan pemerintah supaya dibentuk, karena kalau melihat dari ketentuan yang diberikan setahun dari pemberlakuan, ini sudah lewat, maka hak kitalah untuk mengingatkan bahwa itu ada sesuatu yang sudah terlewat yang belum dilakukan oleh pemerintah.

PENYIAR : Bagaimana nanti kerja KKR ini dalam bayangan Anda dan siapa saja yang akan duduk dalam KKR ini?

FAISAL ALI : Itu sangat teknis ya, saya rasa, itu membicarakan tentang mekanisme, itu teknis ya. Tapi kita, dalam rekomendasi kita, kita mengharapkan kepada Komisi Kebenaran yang ada di Aceh untuk mengakomodir nilai-nilai syariat dan Adat yang ada di Aceh. Itu saja secara garis besar. Tetapi untuk teknis kepada mereka tidak terlalu kita sarankan. Tetapi yang ada adalah pedoman-pedoman besar yang mereka lakukan dalam rekrutmen dalam komisioner-komisioner yang akan duduk di KKR, itu betul-betul orang-orang yang independen, orang-orang yang berkomitmen betul untuk mencari kebenaran untuk rekonsiliasi itu.

PENYIAR : Baik, Teuku, sudah satu jam kebersamaan kita dalam Kabar Aceh Interaktif kita siang ini. Terima kasih atas kebersamaannya Teuku dan salam buat para ulama di Aceh yang terus mendorong agar kebenaran dan keadilan tercipta bagi masyarakat Aceh sendiri. *Assalamu'alaikum*, Teuku.

FAISAL ALI : *Walaikumussalam*. Terima kasih banyak.

PENYIAR : Ya pendengar demikian perbincangan kita dalam Kabar Aceh Interaktif bersama Teuku Faisal Ali yang anggota Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, dan juga pimpinan Pondok Pesantren Mahya Al-Ulum, Aceh Besar. Sebelum ditutup kita ingin menyapa lagi beberapa pendengar kita yang mendengarkan siaran siang ini di radio-radio di Aceh yang di antaranya adalah radio Nakata di Lhok Sukhon, Andita FM di Matang Lumpang Dua, Radio Talangke di Gayo Luwes, Naro FM di Nagan Raya, Nadiya Madya di Lhoksemeuawe, Prima FM di Banda Aceh,



Nikoya di Banda Aceh juga, dan juga pendengar Radio Utan Kayu di Jakarta. Dan akhirnya, saya, Budi Kurniawan, ditemani oleh produser Laban Abraham, Boy Choky Rafles di operator, undur diri. Salam.